

BRUNEI DARUSSALAM

MALAYSIA

BALIKPAPAN

SELAT MAKASSAR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



CITRA KALIMANTAN TIMUR DALAM ARSIP

KALIMANTAN TIMUR
 2 Desember 1956
 Samarinda
 211.645 km²
 2.712.452 jiwa (th2003)
 9 Kab., 4 Kota
 Flora: Agavecc, Hutan
 Fauna: Pasak Mahakam
 Kayu Bulat dan Kayu Otahan
 Gasi Alam, Cui, Minyak Bumi

LAUTS

SELAT MAKASSAR



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, April 2008

SAMARINDA

- Perubahan Laut Nasional
- Perubahan Lain / Lain
- TEMPAT MENARIK
- Wisata Pantai
- Air Terjun
- Gua
- Arang Jeram
- Pesut
- Rumah Adat Dayak
- Museum
- Peringatan Sejarah
- Kura-kura
- Olah Raga Selatan
- Hutan



CITRA KALIMANTAN TIMUR DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, April 2008



Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomis melainkan karena wilayah ini berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Malaysia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi maupun politik. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Melalui khasanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu program, yang disebut dengan Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Melalui khasanah arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai

peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah berasal dari arsip baik dalam bentuk teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah dinamika perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menjadi bukti akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nasional yang merupakan gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang.

Mencermati tumbuhnya semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif bagi kelangsungan kehidupan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya daerah yang pada gilirannya menjadi proses dinamika nasional.

Adanya keterbatasan penyajian materi sekiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Citra Daerah selanjutnya. Akhirnya dengan kehadiran Citra Daerah ini, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 28 April 2008

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lambang Provinsi Kalimantan Timur	ii
Sambutan Kepala ANRI	iii
Daftar Isi	v
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Letak Geografis	2
C. Perkembangan Sejarah Kalimantan Timur	4
1. Masa Kerajaan	6
2. Masa Kolonial	10
3. Masa Pergerakan Kebangsaan	12
4. Masa Pendudukan Jepang	15
5. Masa Republik Indonesia	16
D. Kalimantan Timur dalam Khasanah Arsip	19
Daftar Pustaka	23
CITRA KALIMANTAN TIMUR DALAM ARSIP	24
Geografis dan Keadaan Alam	25
Pemerintahan	40
Pertahanan dan Keamanan	68
Keagamaan	77
Kesehatan	82
Pendidikan	90
Kebudayaan	99
Pemukiman dan Kependudukan	114
Perdagangan dan Perindustrian	127
Perhubungan	139
Kehutanan	152
Pertambangan	160
DAFTAR ARSIP	167
PENUTUP	186

Pendahuluan

CITRA KALIMANTAN TIMUR DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangun pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah beralihnya kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis secara mandiri dan bertanggung jawab pada masa mendatang. Pemaknaan mengenai pentingnya masa lampau yang terekam dalam arsip harus dimaknai oleh kearifan lokal

dan nasional dalam upaya mempertahankan nilai-nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan *nations and character building* sesuai cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui Program Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan.

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional RI sejak tahun 2003 dilaksanakan dalam bentuk penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy* dan *soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2008 ini adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Arsip mengenai Kalimantan Timur yang diserahkan mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereeniging Oost Indische*

Compagnie (VOC) sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Timur pada periode tersebut. *Citra Kalimantan Timur Dalam Arsip* ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Kalimantan Timur pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. LETAK GEOGRAFIS

Menurut geografis, letak Kalimantan Timur berada pada $4^{\circ}29^1$ LU, $2^{\circ}25^1$ LS dan $113^{\circ}4^1$ – 119° BT. Wilayah Kalimantan Timur bagian utara berbatasan dengan Malaysia Timur, di selatan dengan Kalimantan Selatan, di sebelah barat dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Ibukota provinsi Kalimantan Timur adalah di Samarinda. Provinsi ini mempunyai daratan seluas 211.440 km^2 dan secara administratif mencakup 4 Kota dan 9 Kabupaten, yaitu:

1. Kota Samarinda;
2. Kota Balikpapan;
3. Kota Tarakan;
4. Kota Bontang;
5. Kabupaten Paser;
6. Kabupaten Berau;
7. Kabupaten Bulungan;
8. Kabupaten Kutai Kertanegara;
9. Kabupaten Kutai Timur;
10. Kabupaten Kutai Barat,
11. Kabupaten Nunukan;
12. Kabupaten Malinau, dan
13. Kabupaten Panajam Paser Utara.

Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan melimpah. Sementara dalam hal kekayaan budaya, provinsi ini mewarisi aneka ragam budaya,

antara lain budaya Dayak dan Melayu Banjar yang menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Timur.

C. PERKEMBANGAN SEJARAH KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, Kalimantan Timur telah dihuni manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Manusia pertama yang masuk wilayah Kalimantan Timur ialah dari ras *Negroid Weddid*, saat ini ras tersebut telah punah. Mereka datang dari daratan Asia pada zaman glasial (es).

Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, menyusul masuk ke wilayah Kalimantan Timur kelompok yang lebih besar, yang disebut *Proto-Melayu* atau *Melayu Tua*. Mereka berasal dari Yunan Selatan (China Daratan), daerah selatan Gurun Gobi, dan datang secara bergelombang menuju Semenanjung Asia Selatan, kemudian menyeberang ke Kalimantan Barat. Sebagian dari arus gelombang migran itu ada yang meneruskan perjalanannya ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Bahkan di antaranya ada yang menyeberang ke Sulawesi Tengah dan Utara.

Gelombang migran pertama itu memasuki Kalimantan Timur melalui dua jalan. Pertama, mereka datang ke Kalimantan Utara, lalu melanjutkan perjalanannya ke pedalaman hingga ke Kalimantan Timur. Penduduk ini tergolong dalam ***Suku Dayak Kenyah***, yang memiliki daerah pemukiman di Kalimantan Timur, yaitu di daerah *Apau Da'a*, Kecamatan *Kayan Ulu*. Mereka menyebar ke daerah-daerah lainnya di Kalimantan, sehingga menciptakan sekitar 40 anak suku yang sedatuk dengan suku Kenyah. Kedua, migran langsung memasuki Kalimantan Timur dengan menyusuri sungai-sungai, seperti Sungai Mahakam, Sungai Segah, dan Sungai Kayan. Selanjutnya mereka bermukim di daerah Apo Kayan, Kecamatan Kayan Ulu. Penduduk ini tergolong dalam ***Suku Dayak Kayan*** yang datang ke Kalimantan Timur lebih dahulu dari pada Suku Kenyah. Perjalanan mereka dari daerah asal di Yunan Selatan, Cina, sampai di Kalimantan Timur berlangsung selama dua abad dengan menggunakan perahu bercadik. Karena rentang waktu yang

begitu panjang, mereka yang sampai di Kalimantan Timur adalah keturunannya.

Salah satu bukti bahwa gelombang migrasi penduduk itu berasal dari Semenanjung Asia Selatan (Myanmar dan Thailand) adalah ciri-ciri mereka yang termasuk *Paleo Mongoloide*, kulit kekuning-kuningan atau sawo matang, berambut lurus, hidung kecil dan ukuran tubuh sedang. Ciri-ciri seperti ini dimiliki oleh Suku Dayak, penduduk asli Kalimantan Timur

Bukti lain adalah kebiasaan memberi nama yang menggunakan tiga suku kata sebagaimana kebiasaan nenek moyang mereka di Cina Selatan. Nama-nama seperti *Liah Hon Ling*, *Apui Bi Lung*, dan *Kun Dung Ga* masih banyak dipakai hingga sekarang.

Sekitar tahun 500 SM datang gelombang migran kedua. Mereka berasal dari Semenanjung Kra dan termasuk kelompok *Deutro-Melayu*, atau *Melayu Muda*. Dari Semenanjung Kra mereka berangkat ke timur menyeberangi pantai bagian selatan Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Di antaranya ada yang melanjutkan perjalanannya ke Kalimantan Timur. Bahkan ada yang menyeberang ke Sulawesi Selatan.

Gelombang migran kedua ini sudah bercampur baur dengan ras Melayu, dan kemudian dalam perjalannya yang memakan waktu dua abad mereka bercampur pula dengan ras *Wedoide* — terutama yang melalui jalur Sumatera— dan ras *Mongoloide*.

Bukti bahwa gelombang perpindahan penduduk ini berasal dari campuran ras Mongoloide, Melayu, dan Wedoide adalah terdapatnya ciri-ciri yang sama pada penduduk asli Kalimantan Timur, yaitu pada suku Dayak dengan anak-anak sukunya Bahau, Melanti (kelai Kuno), Punan, Basap, Benuaq, Tidung, dan lain-lainnya.

Sebagian besar penduduk, baik dari gelombang pertama maupun kedua, mendiami tempat-tempat di sekitar kawasan pantai Kalimantan Timur. Sedangkan sebagian yang berasal dari gelombang pertama mendiami daerah-daerah pedalaman, seperti Kerayan yang dihuni sejumlah anak Suku Dayak Kenyah.

Mereka yang menghuni kawasan tepi Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman berkembang lebih cepat dari kelompok lainnya, sehingga mereka tercatat dalam sejarah Indonesia

sebagai pendiri kerajaan tertua di Nusantara. Kemajuan yang mereka capai merupakan salah satu bukti bahwa percampuran budaya di antara berbagai ras di sana membawa pengaruh positif bagi perkembangan suatu masyarakat.

1. MASA KERAJAAN

Sejarah mencatat bahwa Kalimantan Timur adalah wilayah yang memiliki sejarah tertua di Nusantara. Para ahli arkeologi membuktikan bahwa daerah Kalimantan Timur telah meninggalkan masa pra sejarah sejak abad ke-5 M, hal ini didasarkan dengan penemuan benda-benda bersejarah berupa tujuh *yupa* (tiang batu) pada tahun 1879 dan 1940 di sekitar desa yang kini disebut *Muara Kaman*. Prasasti *yupa* tersebut berisi tentang raja pertama *Kutai* bernama *Kundungga*, raja terkenal bernama *Mulawarman*. Pada masa raja *Mulawarman*, ia mengadakan upacara *Vaprakecwara* dengan menyembelih 20.000 ekor sapi untuk itulah dibuatkan tugu peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut dahulu berdiri sebuah kerajaan Hindu yang sudah maju.

Selain prasasti juga ditemukan sebuah kalung Cina yang terbuat dari emas, sebuah arca Budha dari bahan perunggu, serta sejumlah barang lainnya yang berasal dari orang Hindu di sebuah gua *Gunung Kombeng*, sebelah utara *Muara Kaman*.

Namun, data dan fakta yang diperlukan para ahli sejarah untuk mengetahui secara pasti kelahiran dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur sampai saat ini masih kurang.

Dalam kesusasteraan, nama *Kutai Kertanegara* pertama kali diketahui dari kitab *Negarakertagama*, sebuah kakawih untuk Raja *Hayam Wuruk* dari *Majapahit*, yang disusun oleh *Mpu Prapanca* pada tahun 1365. Dalam kitab tersebut *Kutai* disebut sebagai wilayah kekuasaan *Majapahit*. Kemudian nama *Kutai* juga muncul dalam tulisan-tulisan kuno lainnya seperti *Hikayat Raja-raja Pasai* dan *Pararaton*. Masuknya Kalimantan dalam wilayah *Majapahit* merupakan perwujudan ambisi *Gajah Mada*, yang diangkat sebagai patih pada tahun 1331, untuk menyatukan kawasan Nusantara.

Sekitar abad ke-14 di *Kutai* muncul *Kerajaan Kertanegara* yang berpusat di *Tepian Batu* atau *Jahitan Layar*, yang sekarang

bernama Kutai Lama. Letaknya tidak jauh dari Selat. Kerajaan ini muncul sebagai akibat dari ramainya arus perdagangan melalui Selat Makassar, yang pada waktu itu perairan tersebut merupakan jalur utama dalam pelayaran Jawa - Cina.

Menurut hikayat, Kerajaan Kutai Kertanegara berkembang pesat begitu ia didirikan oleh **Aji Batara Agung Dewa Sakti**. Ia menjalin hubungan dengan Majapahit, Brunei, Sambas, Sukadana, Campa, Kamboja, Siam, dan Cina. Para penerus takhta Aji Batara Agung Dewa Sakti memelihara hubungan yang telah terbina itu.

Pengaruh Kerajaan *Singasari* dimulai ketika Raja Kertanegara singgah di Muara Kaman dalam ekspedisinya ke luar Jawa. Ekspedisi ini sebenarnya merupakan pelaksanaan politik luar negeri Singasari untuk menghadapi ekspansi Mongol di Asia Tenggara yang dilancarkan oleh *Khubilai Khan*. Kertanegara bersama pasukannya dan para bangsawan Singasari singgah di sini untuk istirahat sambil memperbaiki kapal dan menambal layar yang sobek. Oleh karena itu, tempat mereka istirahat kemudian disebut **Pulau Jahitan Layar**, dekat dengan **Tepian Batu** (Kutai Lama).

Dalam persinggahan itu salah seorang bangsawan Singasari menikah dengan putri raja Tepian Batu. Ia kemudian mengembangkan kerajaan tersebut dan sejak itu kerajaannya diberi nama **Kutai Kertanegara**. Dalam perkembangan selanjutnya Kutai Kertanegara menundukkan Kerajaan **Kutai Martapura**.

Kerajaan Kutai Kertanegara berkembang dengan pesat. Pengaruh Islam masuk ke kerajaan ini sejak Aji Betara Agung Paduka Nira masih berkuasa (1325 -1360). Pengganti Paduka Nira adalah **Aji Maharaja Sultan**, nama yang sarat dengan pengaruh Islam. Namun Islam secara resmi menjadi agama kerajaan mulai tahun 1525 ketika **Aji Raja Mahkota Mulia Islam** naik takhta. Ia segera mengubah bentuk kerajaan menjadi kesultanan. Pada masa Sultan Kutai ke-IV **Aji Mandarsyah**, Islam berkembang pesat, dengan hadirnya ulama **Tuan Tunggang Parangan**. Selain itu kedekatan Kutai dengan Kesultanan Gowa juga menghadirkan ulama **Dato Ri Bandang** dari Makasar.

Kesultanan Kutai saat itu juga telah mempunyai sistem pemerintahan yang baik, yakni terbukti dengan berlakunya *Undang-undang Panji Selaten* dan *Maharaja Nanti atau Beraja Niti*. Kedua undang-undang ini dibuat setelah bersatunya Kesultanan Kutai dan Martapura di Muara Kaman. Undang-undang Panji Selaten mengatur sistem pemerintahan, yaitu dari dusun, kampung, negeri, dan kerajaan. Sedangkan Undang-undang Beraja Niti, mengatur hubungan rakyat dengan rakyat.

Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa kerajaan ini pernah mendapat pengaruh langsung dari raja Singasari. Selain dari kata "Kertanegara", hal ini juga bisa disimpulkan dari penggunaan nama "Panji Salaten" dan "Beraja Nanti" pada undang-undang yang diberlakukan di daerah itu, serta penggunaan gelar "Aji" bagi para bangsawannya.

Selain Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur juga berdiri *Kerajaan Pasir*. Semula kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Kutai Mulawarman. Tetapi setelah wibawa kerajaan tertua di Indonesia itu merosot akibat kalah perang melawan Kutai Kertanegara, Kerajaan Pasir segera melepaskan diri dari Mulawarman.

Kerajaan Pasir merupakan kelanjutan dari *Kerajaan Sadurangas* yang didirikan oleh orang-orang pelarian dari *Kerajaan Kahuripan* dan Daha di Kalimantan Selatan. Pemimpin para pelarian ini adalah seorang wanita bernama Putri Petung. Kerajaan ini mencapai puncak kemajuannya di bidang sosial ekonomi semasa pemerintahan *Sultan Aji Anom Singa Maulana* pada pertengahan abad ke-17. Selain kedua kerajaan itu, pada tahun 1400 di Kalimantan Timur juga muncul *Kerajaan Berau*. Rajanya yang pertama adalah *Baddit di Pattung* yang bergelar *Aji Raden Surianata Kesumaningrat*. Pusat kerajaannya berada di daerah pedalaman sekitar Sungai Lati, Sungai Ulak, dan Sungai Pengawas. Pada mulanya kerajaan tersebut berada di bawah kekuasaan Kutai Mulawarman. Setelah Mulawarman pudar, Berau langsung masuk ke dalam pengaruh Kerajaan Majapahit. Namun sistem pemerintahannya tidak menganut pola Jawa, tapi Melayu.

Sebagai kerajaan yang letaknya di ujung utara Kalimantan Timur, Kerajaan Berau memang lebih banyak dipengaruhi oleh Melayu. Kendati berada di bawah pengaruh Majapahit, Kerajaan Berau menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Kerajaan Brunei, terutama pada masa pemerintahan *Aji Temanggung Berani* yang menjadi raja keenam dari tahun 1557 sampai tahun 1589.

Setelah *Aji Dilayah* sebagai raja yang kesembilan turun takhta, pemerintahan dipegang oleh dua putranya, Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Wilayah kerajaan pun dibagi dua: Pangeran Tua dan keturunannya menguasai daerah sebelah selatan Sungai Kuran dan tanah sekitar Sungai Kealay, sedangkan Pangeran Dipati dan keturunannya menguasai bagian utara Sungai Kuran dan daerah sekitar aliran Sungai Segah.

Raja yang memerintah secara bergantian dari kedua keturunan tersebut adalah pada mulanya Pangeran Tua menjadi raja dan Pangeran Dipati menjadi mangkubumi. Selanjutnya Pangeran Dipati mendapat giliran menjadi raja, sedangkan yang menjadi raja muda adalah Pangeran Tua yang bernama Hassanuddin.

Setelah Pangeran Dipati mengundurkan diri, takhta kesultanan diserahkan kepada putranya sendiri yang bernama *Aji Kuning*. Akibatnya terjadilah perselisihan, sebab sesuai konsensus yang seharusnya mendapat giliran menjadi sultan adalah Hassanuddin. Namun perselisihan ini tidak berkembang menjadi parah berkat kerelaan Hassanuddin untuk mengalah. Setelah Sultan Aji Kuning meninggal, barulah dia diangkat menjadi sultan (1731). Oleh karena Sultan Hassanuddin menikah dengan putri raja Solok, Kepulauan Sulu, Filipina, dia memindahkan pusat pemerintahannya dari Benua Marancang ke Benua Kuran. Pada saat meninggal, Sultan Hassanuddin dimakamkan di sana pada tahun 1767, sehingga dikenal sebagai "*Marhum di Kuran*." Penggantinya adalah *Sultan Zainal Abidin*, keponakan Sultan Aji Kuning.

Sistem penggiliran raja seperti itu ternyata rawan perselisihan. Perpecahan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Aji Kuning II. Pengangkatannya sebagai raja menimbulkan kemarahan keturunan PangeranTua yang merasa diperlakukan kurang adil. Keturunan Pangeran Dipati memang telah lima kali

mendapat giliran menjadi raja, sedangkan keturunan Pangeran Tua baru tiga kali. Oleh karena kelompok Pangeran Tua tidak mengakui Sultan Aji Kuning II. Selanjutnya mereka memisahkan diri dan pada tahun 1833 mendirikan *Kerajaan Sambaliung* dengan rajanya yang pertama Raja Alam. Riwayat Kerajaan Berau berakhir di sini sebab Sultan Aji Kuning II pun kemudian mendirikan kerajaan baru dengan nama *Kerajaan Gunung Tabur*. Perselisihan di antara kedua kerajaan ini segera mengundang Belanda untuk masuk.

2. MASA KOLONIAL

Vereniging Oost Indische Compagnie (VOC) sebenarnya telah tiga kali berusaha untuk memonopoli perdagangan di wilayah Kalimantan Timur, namun tidak berhasil. Pada tahun 1634, VOC mengirim 3 kapal dagang ke Kutai dan Pasir, mereka berniat mengadu domba kerajaan tersebut dengan pedagang, yaitu dengan mengusir pedagang-pedagang Makasar dan Jawa. Namun maksud tersebut langsung ditentang oleh Sultan Kutai Kertanegara dan Pasir. Pada tahun 1635, VOC mengirim *Gerrit Thomasen Pool* ke Kutai untuk memperingatkan agar Kutai membayar upeti ke Banjarmasin. Namun sistem *divide et impera* ini gagal kembali, karena ditolak oleh Sultan Kutai. Pada tahun 1671, VOC kembali mengirim pedagang mereka, *Paulus de Beck* dengan kapal *Chialop de Nourman* ke Kutai dan Berau untuk mengadakan hubungan dagang, namun gagal lagi akibat sikap VOC yang ingin memonopoli perdagangan.

Kerajaan Gunung Tabur merupakan kerajaan pertama yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Saat itu Kerajaan Gunung Tabur meminta bantuan Belanda untuk menyerang Kerajaan Sambaliung. Setelah Sambaliung jatuh pada tahun 1834, maka Gunung Tabur pun menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Setelah itu Belanda menaklukkan Kerajaan Berau beserta dua kesultannya pada tahun 1837. Selanjutnya, Kerajaan Pasir pun menjadi wilayah Belanda pada tahun yang sama. Kali ini Belanda melakukannya dengan cara memecah-belah masyarakat Pasir sehingga menimbulkan perselisihan antara rakyat biasa dengan kaum bangsawan. Perselisihan itu dipertajam dengan adanya usaha Belanda untuk meracuni

penduduk dengan candu, seperti yang dilakukan oleh *Alexander van Saow*.

Dalam posisi terdesak *Aji Adil bin Sultan Sulaiman Alamsyah*, yang bergelar *Sultan Adam Alamsyah*, terpaksa menandatangani perjanjian persahabatan dengan Belanda pada tanggal 25 Oktober 1843. Perjanjian yang dikenal dengan nama *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek) itu berisi:

- 1) Pasir adalah sahabat Belanda;
- 2) Musuh Pasir adalah musuh Belanda dan sebaliknya musuh Belanda adalah musuh Pasir; dan
- 3) Sultan Pasir adalah sahabat setia Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu.

Perjanjian tersebut menimbulkan pertentangan yang serius. Pelantikan *Aji Timur Bulan* sebagai sultan dengan gelar Sultan Kesuma Ningrat oleh Sultan Sepuh mendapat protes keras dari para bangsawan, kaum ulama dan kaum adat. Pertentangan itu dipertajam dengan adanya dukungan Belanda atas keinginan Sultan Sepuh untuk melantik Aji Timur Bulan sebagai penguasa Kerajaan Pasir, serta paksaan kebesaran pemberian Belanda yang dikenakan oleh Sultan Sepuh pada saat pelantikan.

Akibat pertentangan tersebut posisi Sultan Pasir menjadi semakin lemah, sehingga ia menandatangani perjanjian baru yang sifatnya sangat mengikat dan membuat Kesultanan Pasir tergantung kepada Belanda. Perjanjian baru itu berbunyi, antara lain, sebagai berikut: Pasir berada di bawah lindungan Belanda; Sultan harus setia dan taat kepada Ratu Belanda untuk selamanya; dan Pasir tidak akan mengadakan hubungan dengan pihak lain selain Belanda. Akhirnya Pasir diperintah oleh dua sultan, yaitu Sultan Kesuma Ningrat yang menjadi boneka Belanda dan Sultan Muhammad AH Alamsyah yang dinobatkan oleh para bangsawan, kaum ulama dan kaum adat yang menentang kehadiran Belanda.

Sedangkan runtuhnya Kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan *Sultan Salehuddin* (1782-1845). Saat itu dua buah kapal Inggris mengunjungi Kerajaan Kutai yaitu kapal *The Young Queen* dan *The Anna* di bawah pimpinan *James Erkin Murray*. Mulanya kedatangan mereka disambut hangat oleh Sultan, tetapi kemudian terjadi sengketa karena Inggris meminta sebidang tanah untuk mengawasi perdagangan mereka.

Permintaan ini ditolak Sultan Kutai sehingga terjadi pertempuran. J.E. Murray sendiri tewas dalam pertempuran itu dan kedua kapalnya melarikan diri.

Peristiwa ini membuat pemerintah Inggris berang, sehingga mempersiapkan armada untuk membalas dendam. Tetapi pemerintah Hindia Belanda yang mengetahui niat Inggris itu dari kedutaannya di London, mengingatkan bahwa Borneo Timur termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. Segera sesudah itu Belanda mengirimkan armada angkatan lautnya ke Kutai untuk melindungi Kutai dari gempuran Inggris. Tetapi "pertolongan" Belanda ini ditolak oleh Sultan sehingga terjadi pertempuran. Dalam pertempuran ini Sultan Kutai mundur ke Kota Bangun untuk melanjutkan perlawanan. Pada tahun 1842 rakyat Kutai yang dipimpin oleh *Awang Long* kembali melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, namun perlawanan tersebut berakhir dengan gugurnya Awang Long.

Pada tanggal 17 April 1844, kota Tenggarong dihancurkan oleh Belanda dan Sultan Kutai dipaksa untuk mengakhiri perang dengan menandatangani *Traktat Tepian Pandan* tanggal 29 April 1844. Dalam traktat tersebut Raja Kutai mengakui Gubernur Belanda sebagai penguasa tertinggi di seluruh kepulauan Hindia Belanda. Walaupun begitu perlawanan rakyat Kutai terhadap Belanda berlanjut terus.

Pada masa Hindia Belanda ini, Kalimantan Timur merupakan Wilayah Timur dari Residensi Kalimantan Bagian Selatan dan Timur (*Oosterafdeling van Residentie Zuid en Oost Borneo*) yang berkedudukan di Banjarmasin. Sebagai wakil-wakilnya di daerah ini ditempatkan dua asisten residen yang mengepalai dua *onder afdeling* yaitu *onder afdeling Samarinda* yang meliputi Kutai Timur, Balikpapan, Kutai Barat, Pasir dan Boven Mahakam dan *onder afdeling Bulungan en Berau* yang mencakup Tarakan, Tidung, Apau Kayan, Bulungan dan Berau. Selain itu Samarinda dan Long Iram merupakan daerah-daerah yang langsung diperintah oleh Belanda atau *rechtstreeks bestuur gouvernement gebied*, sehingga di wilayah ini ditempatkan garnizun militer KNIL yang cukup besar.

3. MASA PERGERAKAN NASIONAL

Seiring dengan tumbuhnya organisasi dan kegiatan pergerakan di Pulau Jawa, di wilayah Kalimantan Timur juga memperlihatkan aktivitas politik yang cukup semarak. Berbagai organisasi pergerakan yang tumbuh dan berdiri di Pulau Jawa, segera membuka cabang atau perwakilannya di daerah ini. Bahkan sebelumnya, pada tahun 1915 di Tanah Grogot (Pasir) terjadi perlawanan terhadap Belanda oleh rakyat yang dipimpin *Pangeran Singa Maulana* dari Modang, sebagai bagian dari pemberontakan nasional yang dilakukan *Syarikat Islam*, namun berakhir dengan gugurnya Pangeran Singa Maulana.

Pada tahun 1917, organisasi Sarikat Islam (SI) resmi berdiri di Samarinda. Kemudian menyusul berdirinya cabang-cabang di Balikpapan dan Tenggarong. Adapun para pengurus SI di Samarinda itu antara lain *H. Abdul Manap, M. Yusuf Arif, Kamaluddin*, dan *H.M. Halid*. H.M.Yalid sempat diutus menemui Ketua Umum SI di Pulau Jawa ketika itu, yakni **Haji Oemar Said Tjokroaminoto**. Dalam perkembangannya, SI mendirikan pula *Jong Mohammadan* atau bagian pemuda yang bergiat di bidang olahraga dan kesenian. Di samping itu, mereka giat mendidik anggota dalam memperdalam agama Islam.

Pada tahun 1927, di Samarinda berdiri pula *Muhammadiyah*. Anggota pengurusnya ketika itu adalah H Abdul Manap dan M Sidik. Organisasi keagamaan (Islam) lainnya yang juga membuka cabang di Kalimantan Timur khususnya Samarinda adalah *Nahdlatul Ulama*. Organisasi ini membuka cabangnya di Samarinda pada awal 1925. Adapun para pengurus cabangnya ketika itu adalah H Abdussamad dan A Madjid. Sementara itu, sebuah organisasi keagamaan (Islam) lainnya yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yakni *Musyawatut-Thalibin*, pada sekitar pertengahan tahun 1930 juga masuk ke Kalimantan Timur.

Selain organisasi-organisasi bersifat keagamaan itu, di Kalimantan Timur menyusul pula masuk organisasi lain yang bersifat politis. Pada tahun 1933, sekelompok pemuda mendirikan cabang *Persatuan Bangsa Indonesia (PBI)* di Samarinda. Pelopornya adalah *Horas Siregar*, pemimpin redaksi dan penanggung jawab sebuah surat kabar mingguan

Panggilan Waktu. Menyusul berdirinya PBI, tahun 1934 salah seorang tokoh PBI di Kota Baru (Kalimantan Selatan) Rustam Effendi pindah ke Samarinda. Dengan kedatangan Rustam Effendi, pengurus PBI Samarinda direorganisasi. Rustam Effendi duduk sebagai ketua, sementara Achmad Noor yang sebelumnya sekretaris menjadi wakil ketua. Sejak itu PBI Samarinda makin besar, anggotanya semakin bertambah. Pada tahun 1935 PBI Samarinda dilebur dengan beberapa organisasi lain menjadi **Partai Indonesia Raya (Parindra)**.

Pengurus cabangnya ketika itu adalah, Rustam Effendi (eks Ketua PBI) sebagai ketua, H Arief Rachim wakil ketua, sementara Achmad Noor menjadi sekretaris. Sementara itu, pada tahun 1937, **Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)** membuka cabang di Samarinda yang antara lain diprakarsai oleh Aswin Yoyo, Ishak Sani, Oemar Dahlan, dan M Djunaedi. Dua tahun setelah Gerindo membuka cabang di Samarinda, menyusul berdiri pula **Penyadar**. Organisasi ini merupakan pecahan dari Partai Sarikat Islam Indonesia yang tumbuh karena adanya perbedaan pendapat yang tajam di kalangan pengurusnya menyangkut siasat perjuangan. Di Samarinda, salah seorang pengurusnya adalah pemimpin lama SI, yakni A.M. Sangaji.

Pada masa-masa itu banyak tokoh pergerakan di Pulau Jawa mengunjungi Kalimantan Timur dan menumbuhkan semangat kebangsaan di daerah ini. Di antara mereka adalah M.H.Thamrin (1936), Dr. A.Kapau Ganie (1938), dan Adam Malik (1939).

Pada tahun 1940, partai-partai politik yang terdiri atas PSII, Parindra, Gerindo, Pasundan, Partai Katolik, dan Partai Islam Indonesia, menggabungkan diri dalam **Gabungan Politik Indonesia (GAPI)**. Pengurusnya berbentuk presidium yang terdiri atas enam orang, sedang yang diperjuangkannya adalah menuntut Indonesia berparlemen. Di Kalimantan Timur, GAPI membuka cabang-cabangnya di Samarinda dan Balikpapan. Namun, tidak seperti di Jawa, di daerah ini partai pendukungnya hanya Gerindo dan Parindra, sebab partai lain yang tergabung dalam GAPI memang tidak membuka cabangnya di Kalimantan Timur. Namun demikian, GAPI mendapat dukungan moril dan

materiel dari organisasi-organisasi nonpolitik yang ada seperti Muhammadiyah.

Pada awal tahun 1940, GAPI berhasil mengorganisir suatu rapat umum di Samarinda yang dihadiri oleh berbagai lapisan rakyat. Organisasi lain yang juga membuka cabangnya di Kalimantan Timur adalah Majelis Islam Ala Indonesia, yaitu suatu badan federasi dari partai dan organisasi Islam seperti PSII, Partai Islam Indonesia, NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan pergerakan Islam lainnya.

Di samping organisasi-organisasi yang memiliki sifatnya politis, juga muncul sejumlah organisasi lainnya yang fokus kegiatannya di lapangan kepemudaan dan kependuan. Organisasi-organisasi tersebut pada umumnya adalah "*onderbouw*" dari berbagai organisasi/ partai politik yang ada. Di antaranya bisa disebut Surya Wirawan dari Parindra, Hisbul Wathan dari Muhammadiyah, Nashrul Ulum dari Musywaratut Thalibin, atau Anshor dari NU. Selain itu, terdapat juga organisasi kependuan yang berdiri sendiri dan bukan *onderbouw* suatu partai/organisasi, yakni cabang Kependuan Bangsa Indonesia.

4. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pada masa perang Asia Pasifik terjadi, wilayah-wilayah pendudukan bangsa Eropa di Asia bagian Timur dan Tenggara diserbu bala tentara Jepang, termasuk wilayah pendudukan Belanda di Indonesia. Bangsa Jepang pertama kali memasuki wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 10 Januari 1942, melalui Tarakan. Kemudian Jepang melanjutkan serangannya dan berhasil menghancurkan Lapangan udara Belanda di Tarakan dan Samarinda. Pada tanggal 13 Januari, Komandan KNIL di Tarakan menyerahkan diri kepada bala tentara Jepang.

Jepang segera mengubah susunan pemerintahan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Di bawah pemerintahan militer Jepang, *onder afdeling* Samarinda dan *onder afdeling Bulungan en Berau* yang merupakan Wilayah Timur dari Residensi Kalimantan Bagian Selatan dan Timur (*Oosterafdeling van Residentie Zuid en Oost Borneo*) bentuk Belanda sebelumnya dihapuskan. Berdasarkan *Osamu Seirei* No. 27 tahun 1942 ditetapkan bahwa *Shu (provinsi)*, sebagai wilayah pemerintahan

tertinggi. Di bawah *shu* terdapat *ken* (kabupaten) dan *si* (kotapraja), sementara di bawah *ken* adalah *gun* (kawedanaan) dan di bawah *gun* ada *son* (kecamatan), yang paling bawah adalah *ku* (desa). Pada tahun 1944 Jepang memperkenalkan *tonarigumi* (rukun tetangga) yang beranggotakan 10 hingga 20 kepala keluarga dengan seorang pemimpin. Pada masa pemerintahan Jepang ini, kegiatan pemerintahan Kalimantan Timur berada di bawah kekuasaan Pemerintah militer Angkatan Laut (*Kaigun*) Armada Selatan Kedua bersama dengan wilayah Kalimantan lainnya, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makasar.

Pada awalnya kedatangan Jepang disambut hangat oleh rakyat Indonesia, karena diharapkan dapat membawa perbaikan sebagaimana propaganda yang dilancarkan oleh Jepang sebelumnya. Bahkan di Samarinda pada bulan-bulan pertama kedatangannya, Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengadakan rapat umum di lapangan terbuka dengan mengibarkan bendera Merah Putih.

Tetapi harapan itu ternyata segera pupus, karena sikap Jepang yang keras dan kejam. Organisasi pergerakan rakyat ditekan, dilarang mengadakan kegiatan, dan bahkan dibubarkan. Kegiatan masyarakat hanya diijinkan berlangsung melalui badan atau organisasi yang didirikan Jepang, seperti *Seinendan* untuk para pemuda dan *Fujinkai* untuk kaum wanita. Banyak rakyat yang dihukum tanpa melalui proses pengadilan. Demikian pula harta benda rakyat diambil secara paksa untuk kepentingan perang. Hal ini menyebabkan kehidupan rakyat yang sudah menderita menjadi semakin berat. Dibentuknya *Giyugun* maupun *Pembela Tanah Air (Peta)* semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam perang untuk menguasai Asia Timur Raya.

Di Tanjung Redeb, Sambaliung, dan Gunung Tabur terjadi penangkapan besar-besaran oleh Jepang terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan gerakan bawah tanah. Oleh karena itu, pada bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang, di beberapa tempat terjadi perlawanan, seperti di Hulu Sungai Mahakam, di pedalaman Muara Amuntai, di Kampung Biduk Talisayan, dan di kampung Talassau, Gunung Tabur.

Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah tak bersyarat kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945.

5. MASA REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan Timur sebenarnya telah dikuasai sekutu sebelum Indonesia merdeka, yaitu ketika sekutu berhasil menyerbu kota minyak Tarakan, pada bulan Mei 1945. Oleh sebab itu, ketika masyarakat mengadakan upacara bendera menyambut Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Nanang Besar Balikpapan Seberang, para peserta upacara (Abdul Rasyid dan kawan-kawan) langsung ditangkap Sekutu.

Pada pertengahan September 1945 tentara Sekutu mendaratkan kembali pasukannya di Samarinda, mereka bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang tersisa. Saat itu, tentara Sekutu mendapatkan perlawanan rakyat di Tarakan yang dipimpin oleh *Kopral Husen dan Sugiyanto*, namun perlawanan itu berakhir dengan ditangkapnya para pemimpin pejuang tersebut. Walaupun mengalami berbagai hambatan, akhirnya pada bulan Desember 1945 terbentuk *Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI)* di Samarinda dipimpin *M. Juniat Sanusi*, di Balikpapan dipimpin *Kasmani* dan *Dasuki* dan di Sanga-Sanga dipimpin *Sukasmo*.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan di bawah pemerintah Propinsi Kalimantan yang beribukota di Banjarmasin.

Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia, ternyata diikuti oleh tentara *Netherlands Indies Civil Administration (NICA)*, mereka berusaha mendirikan pemerintahannya kembali. Setelah dianggap kondusif, tentara Sekutu meninggalkan Kalimantan Timur pada pertengahan Desember 1945. Sejak itu Kalimantan Timur berada di bawah pemerintahan NICA. Untuk mengukuhkan kekuasaannya, pada bulan Januari 1946, NICA mendirikan *Oost Borneo Residentie* dengan ibukotanya Samarinda. Selain itu pemerintah kolonial Belanda mengusahakan pembentukan negara-negara yang bersifat kedaerahan yang nantinya akan menjadi negara bagian dari Negara Indonesia Serikat.

Pada tanggal 15 Juli 1946, pimpinan NICA di Indonesia, yaitu *Luitenant Gouverneur Generaal (LGG)* Dr. H.J. Van Mook mengadakan konferensi 10 hari di Malino. Pada Konferensi di Malino itulah Belanda meletakkan dasar-dasar untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat. Kelanjutan dari Konferensi Malino diadakan konferensi golongan minoritas di Pangkalpinang dari tanggal 1-12 Oktober 1946. Pada umumnya peserta kedua konferensi ini menyetujui asas negara federal yang ditawarkan oleh Belanda. Langkah selanjutnya menuju ke arah federasi Indonesia tersebut ialah diadakannya *Konferensi Denpasar* tanggal 7-24 Desember 1946, yang melahirkan *Negara Indonesia Timur (NIT)*. NIT merupakan negara bagian yang pertama dari Negara Indonesia Serikat yang direncanakan.

Perlawanan rakyat terhadap Pemerintah Kolonial Belanda terus berlangsung dimana-mana. Puncak perlawanan rakyat terjadi saat "*Peristiwa Sanga-Sanga*" pada tanggal 27 Januari 1947, dimana para pejuang berhasil mengusir Belanda dan menguasai Sanga-Sanga selama tiga hari sebelum Belanda merebutnya kembali.

Pada bulan September 1947 Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook kemudian meresmikan pembentukan "*Federasi Kalimantan Timur*" di Samarinda. Federasi Kalimantan Timur wilayahnya meliputi *landscap* (swapraja) Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Neo-Landschap Pasir. Federasi ini diketuai oleh Sultan Kutai *A.M. Parikesit* dan sebagai penasihatnya ialah Residen Belanda. Pemerintahan federasi ini memiliki status kenegaraan yang berdiri sendiri dan dilengkapi pula dengan badan perwakilan (legislatif).

Tetapi keberadaan pemerintahan federasi ini segera diketahui oleh tokoh-tokoh pergerakan dan rakyat sebagai politik kolonial Belanda untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan itu. Karena itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin ditingkatkan tidak saja melalui perlawanan bersenjata tetapi juga perjuangan melalui badan legislatif Dewan Federasi Kalimantan Timur. Para pejuang yang gigih itu terkenal dengan nama Pasukan Merah Putih. Rakyat segera menuntut penggabungan dengan Republik Indonesia di Yogyakarta.

Sesudah tercapainya Piagam Pengakuan Kedaulatan *Republik Indonesia Serikat (RIS)* oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, sebagai hasil *Konperensi Meja Bundar (KMB)* yang dilaksanakan di Den Haag, keadaan cepat berubah. Di seluruh Indonesia dilakukan penyerahan kekuasaan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam waktu yang relatif singkat mulai terasa adanya perbedaan dalam soal kebebasan rakyat. Demikian pula di daerah Kalimantan Timur, di mana rakyat segera menuntut dibubarkannya Dewan Federasi Kalimantan Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (RI).

Dewan Federasi Kalimantan Timur yang sudah rapuh itu tak dapat dipertahankan lagi. Pada bulan Februari 1950 badan perwakilan federasi ini mengeluarkan mosi yang menuntut penggabungan segera Kalimantan Timur ke dalam Republik Indonesia yang ketika itu berpusat di Yogyakarta. Tuntutan ini kemudian diperkuat oleh Badan Pemerintahan (Dewan Kesultanan) Federasi Kalimantan Timur pada awal Maret 1950. Tuntutan rakyat ini juga dilaporkan oleh Residen *A.P. Afloes* yang menjabat sebagai Wakil Republik Indonesia Serikat di Kalimantan Timur kepada Pemerintah RI dengan saran agar tuntutan tersebut dapat segera dipenuhi.

Akhirnya pada tanggal 10 April 1950 di Samarinda berlangsung upacara penggabungan Kalimantan Timur ke dalam Republik Indonesia. Pemerintah RIS diwakili oleh Residen A.P. Afloes, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI *Mr. Soesanto Tirtoprojo*. Pada hari itu pula Gubernur Propinsi Kalimantan Dr. Murjani mendekritkan pembubaran seluruh badan pemerintahan bentukan Belanda dan menetapkan Kalimantan Timur sebagai daerah keresidenan Republik Indonesia yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan. Sebagai residen pertama adalah *K. Roeslan Mulyoharjo*.

Pada tahun 1952, rakyat Kalimantan Timur mulai memperjuangkan peningkatan status daerahnya dari karesidenan menjadi provinsi. Sebagai langkah lanjut dari perjuangan ini, pada tahun 1954 di Samarinda dilangsungkan Kongres Rakyat yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Propinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 1956, Pemerintah Pusat memenuhi keinginan tersebut dengan

mengeluarkan *Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956* tentang Pembentukan Propinsi-propinsi Otonom Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur pertama ialah *A.P.T. Pranoto*.

Sementara itu, para gerilyawan Kalimantan Timur yang telah berjuang membebaskan Kalimantan Timur dari Pemerintahan Kolonial Belanda diresmikan menjadi *Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS)* yang tergabung dalam Sub Teritorium Militer IV yang pada tahun 1950 berubah menjadi Brigade C dan Brigade E. Pada tahun 1952 brigade ini dilebur menjadi Resimen Infanteri 22 dan Resimen ini pada tahun 1958 diresmikan menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Mulawarman. Tahun 1985 ketika terjadi reorganisasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Kalimantan Timur berada di bawah pembinaan Korem 091 Ajsurya Natakusumah dalam lingkungan Kodam VI Tanjungpura.

D. Kalimantan Timur dalam Khasanah Arsip

Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa reproduksi arsip yang akan diserahkan melalui program **Citra Daerah** ini adalah khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI mengenai berbagai aktivitas dan interaksi di Kalimantan Timur. Reproduksi arsip meliputi arsip tekstual, peta dan foto yang menggambarkan berbagai aktifitas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur abad 17 sampai dengan abad 20.

Dalam Citra Daerah Kalimantan Timur ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai **Geografi dan Keadaan Alam** di Kalimantan Timur. Penjelasan geografi ini digambarkan melalui arsip peta kalimantan yang dibuat tahun 1783 dan beberapa peta dari Dinas Topografi yang menggambarkan beberapa pulau dan wilayah seperti tarakan, Malinau, Balikpapan dan Samarinda.

Kegiatan **Pemerintahan** menggambarkan arsip-arsip pada masa kejayaan kerajaan/kesultanan di Kalimantan Timur seperti Kutai Kertanegara, Gunung Tabur sampai pada pembentukan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan pemisahan dari Provinsi Kalimantan pada tahun 1956.

Kegiatan **Pertahanan dan Keamanan** memperlihatkan arsip-arsip yang berkaitan dengan upaya pemerintah baik pada masa kerajaan/kesultanan maupun pada masa Kolonial dan Republik Indonesia dalam mempertahankan wilayah Kalimantan Timur.

Bidang **Keagamaan** memperlihatkan beberapa foto tempat ibadah di Nunukan, Balikpapan, dan Samarinda.

Bidang **Pendidikan** adalah bidang informasi lain yang terdapat dalam naskah ini. Dalam bidang pendidikan ini arsip yang disajikan antara lain kunjungan Presiden Soekarno ke salah satu sekolah teknik, suasana belajar di suatu sekolah untuk membebaskan buta huruf dan beberapa arsip lain berupa teks mengenai akreditasi bidang pendidikan untuk perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur oleh Departemen Pendidikan Nasional (d/h. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Dalam bidang **Kebudayaan** diperlihatkan profil penduduk Kalimantan Timur antara lain Dayak Kenyah, tari-tarian khas Kalimantan Timur serta kerajinan rakyat.

Kegiatan **Kehutanan** adalah salah satu komoditi penting Kalimantan Timur. Arsip yang ditampilkan antara lain adalah foto berbagai jenis pohon yang merupakan kekayaan alam Kalimantan Timur.

Pertambangan juga merupakan komoditi penting di Kalimantan. Sayangnya, tidak banyak arsip yang merekam pertambangan di Kalimantan Timur sehingga sangat sedikit yang dapat disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

Hall, D.G.E. (1990). *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional.

Muljana, Slamet (1984). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Nasution, A.H. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid II. Bandung: Angkasa.

Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notokusanto (1984). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka,

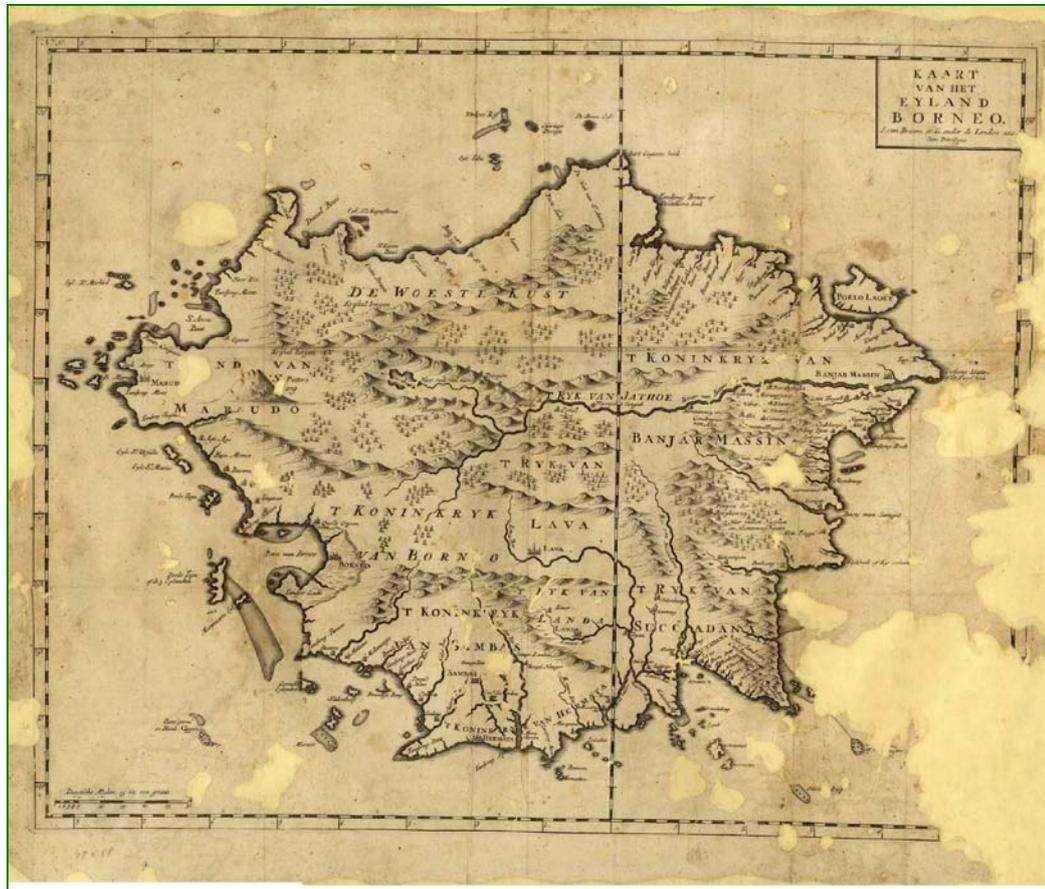
Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara (1992). *Profil Provinsi Republik Indonesia: Kalimantan Timur*. Jakarta: Yayasan Bhakti Nusantara

www.kaltim.go.id

www.wikipedia.org

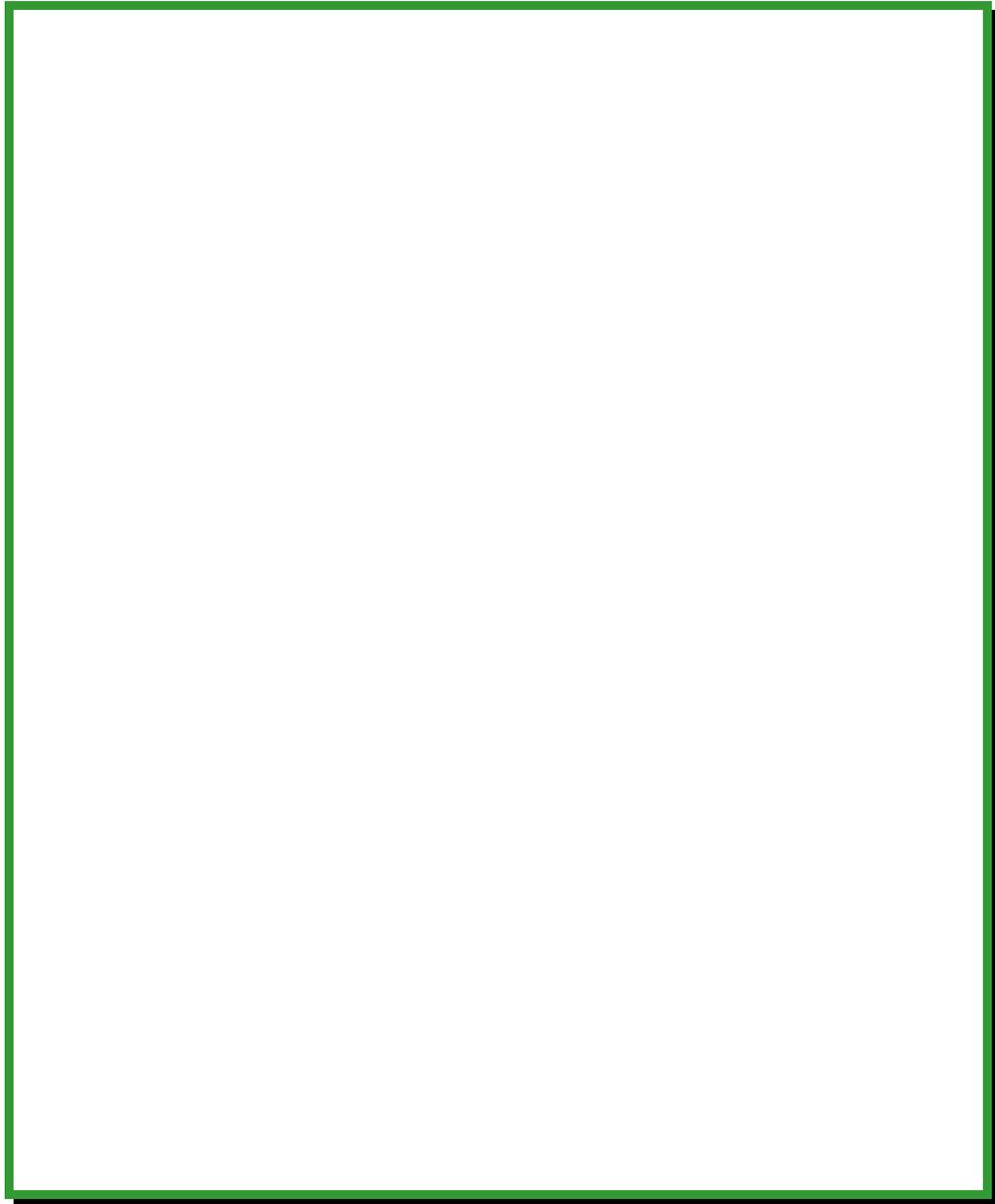
CITRA KALIMANTAN TIMUR DALAM ARSIP

Geografi dan Keadaan Alam



Peta Pulau Kalimantan (*Kaart van het Eyland Borneo*),
Tanpa tahun (\pm 1900)

*ANRI: J. Van Braam et G. Onder de Linden exc Cu.m
Privilegie No.2.*



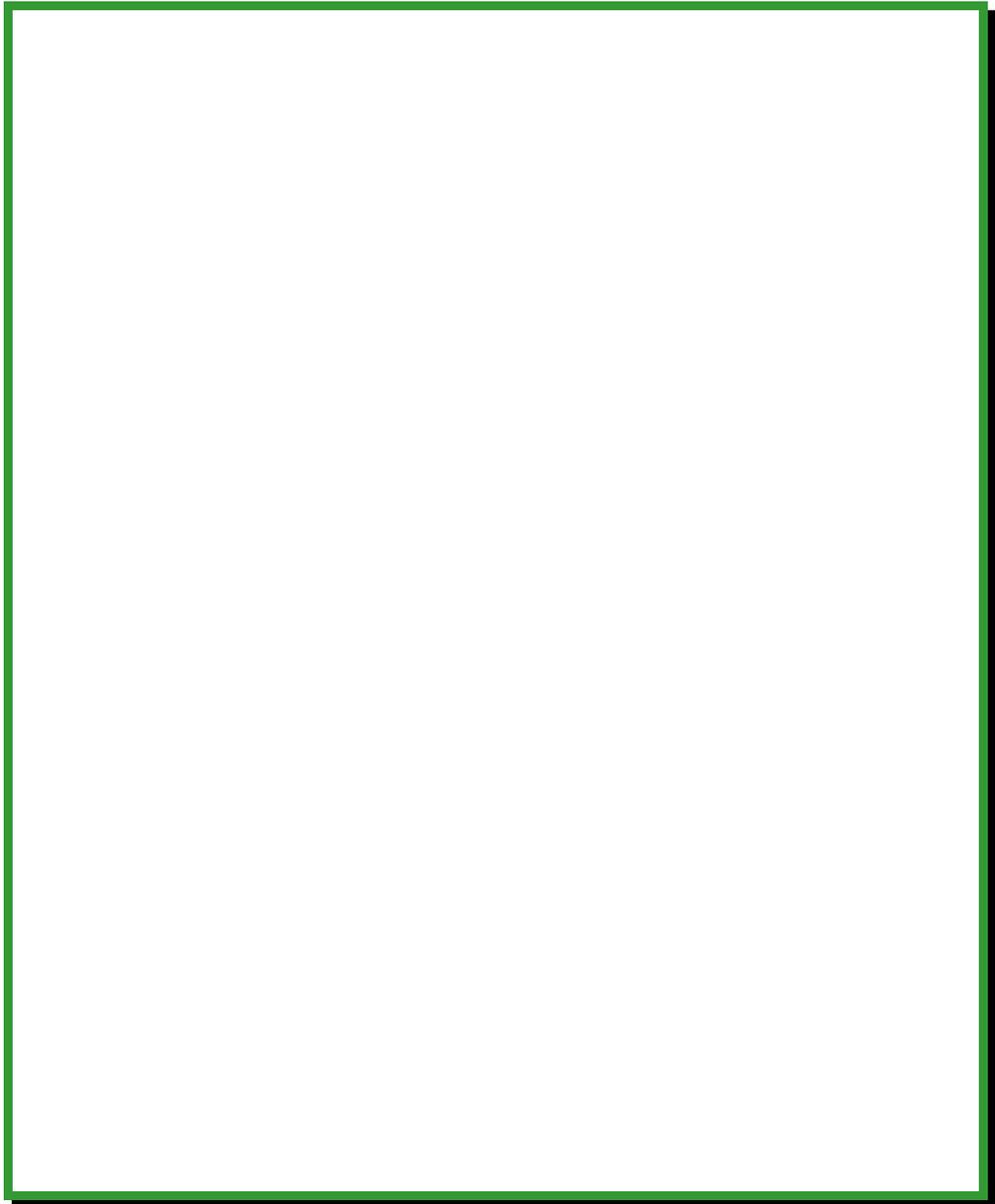
Peta Tarakan, 1945.
ANRI: Dinas Topografi No. 2392/NA NoD/129



Peta Malinau, 1945.
ANRI: Dinas Topografi No. 63/NA 50 NW/5.



Peta Kalimantan Timur (*Oost Borneo*), 1946.
ANRI: Dinas Topografi No. 10/NA-50/3.



Peta Samarinda, 1946.
ANRI: Dinas Topografi No.2394/SA 50 D/129.



Pemandangan di sekitar Sungai Mahakam, Kalimantan Timur

± 1946

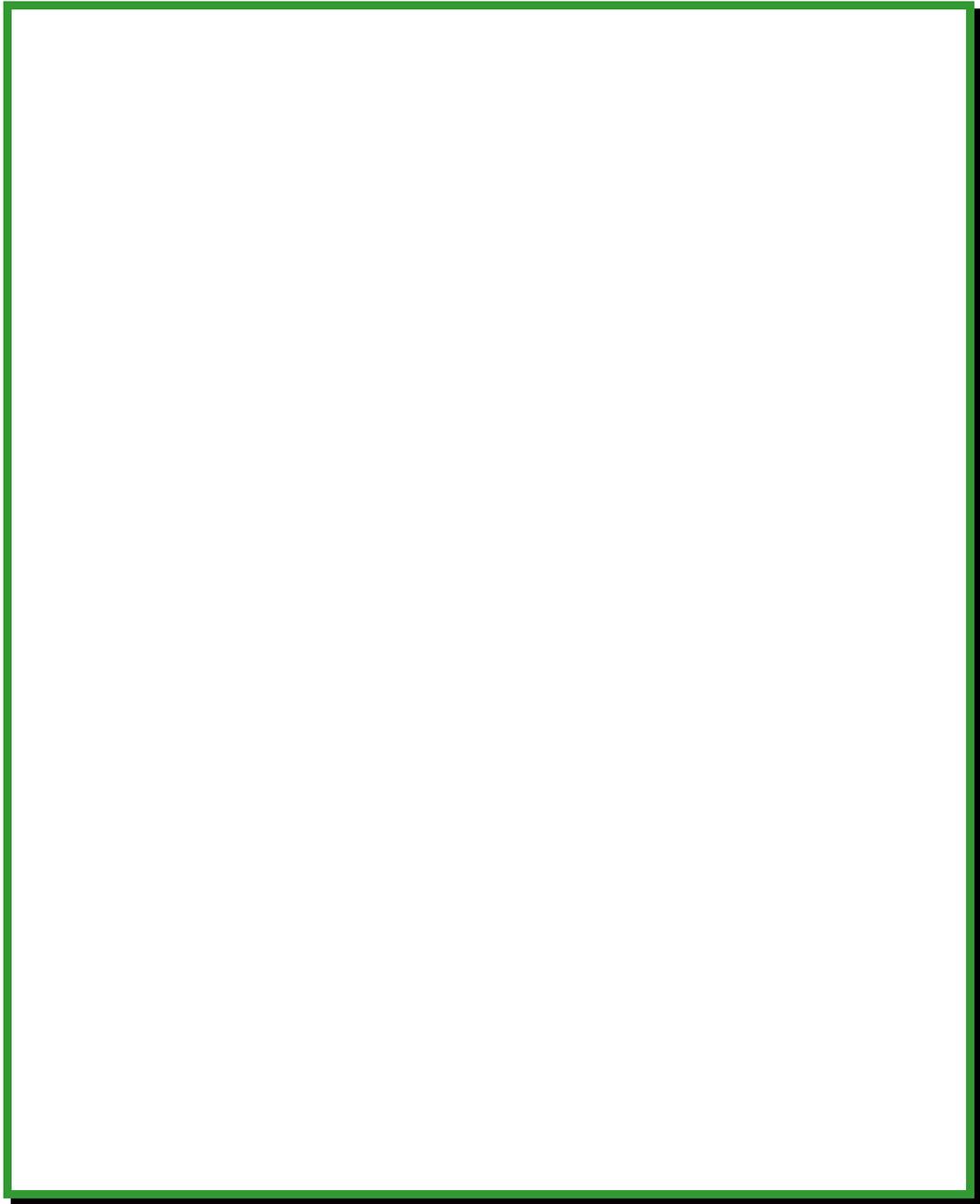
ANRI: KIT 762/47



Pegunungan kapur Liang Karing di daerah Mahakam Atas,
Kalimantan Timur.

± 1946

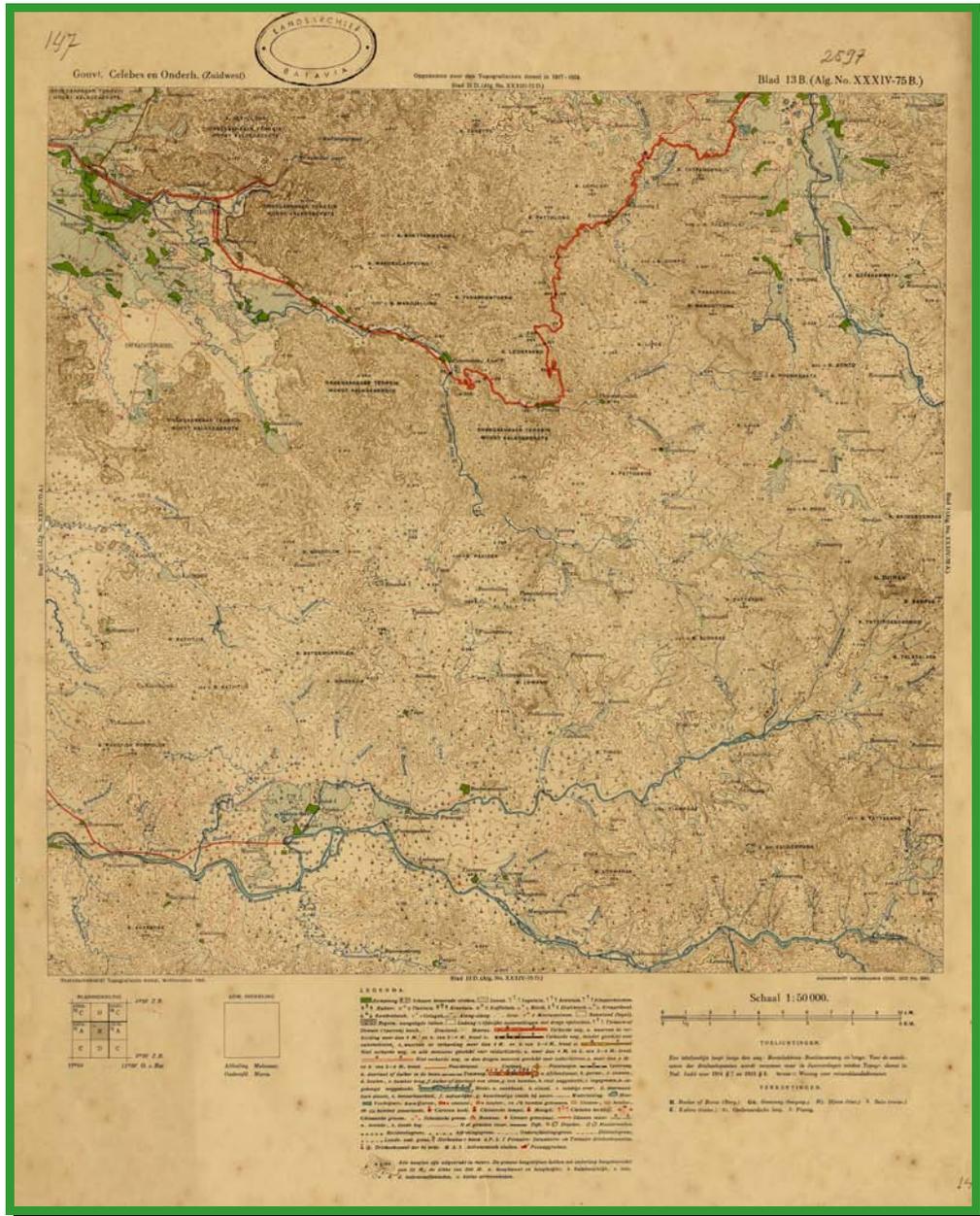
ANRI: KIT 968/1



Peta Balikpapan, 1946.
ANRI: Dinas Topografi No. 2397/SA 50 i/129.



Pemandangan di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.
± 1946
ANRI: KIT 64/23



Peta Bontang, 1946.
 ANRI: Dinas Topografi No.2597/
 Blad 13 B (Alg No. XXXIV-75 B) 147



Pegunungan kapur di tepi Sungai Kutai,
tanpa tahun (\pm 1946)
ANRI: KIT 966/6



Pemandangan di sekitar Sungai Pujungan, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1946)
ANRI: KIT 945/41



Pemandangan di sepanjang Sungai Sanga Muara, Balikpapan,
tanpa tahun (\pm 1946)
ANRI: KIT 472/70



Peta Provinsi Kalimantan Timur,
2003

ANRI: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

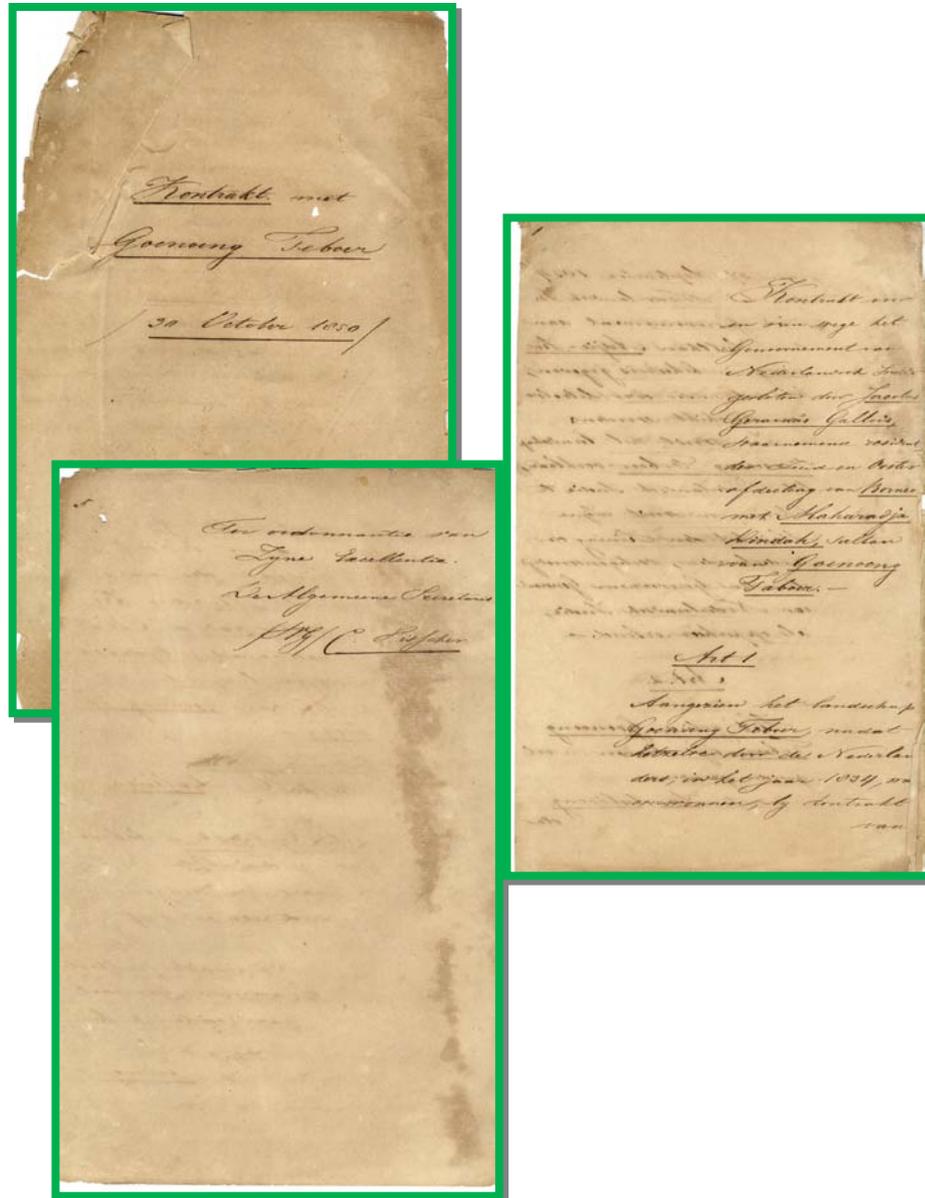
Pemerintahan



Surat perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Kutai, Muhamad Sholehudin tentang pembagian wilayah Kesultanan Kutai dan penggunaan bendera Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Kutai.

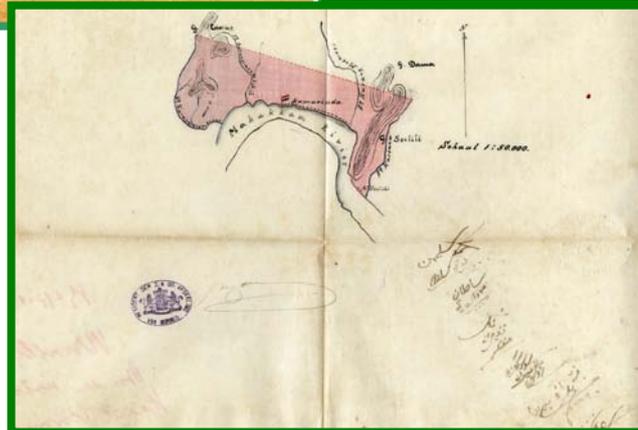
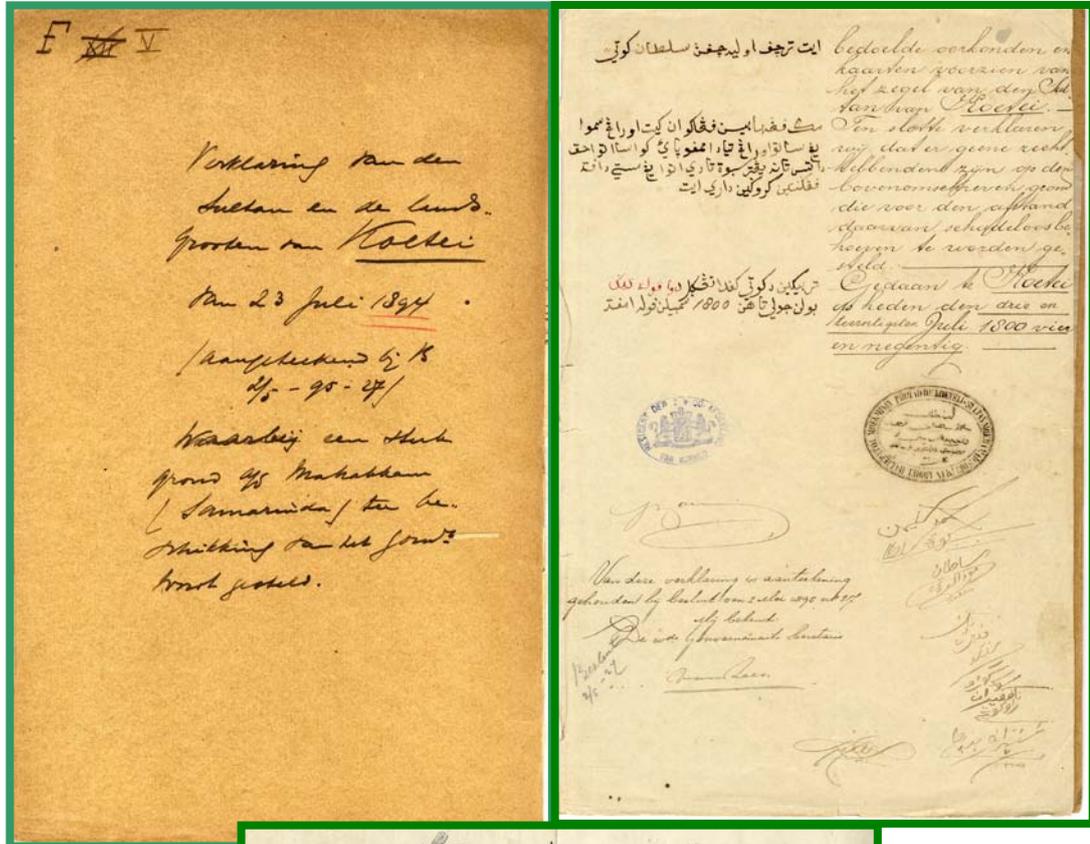
11 Oktober 1844

ANRI: Kontrak Kalimantan No. 28



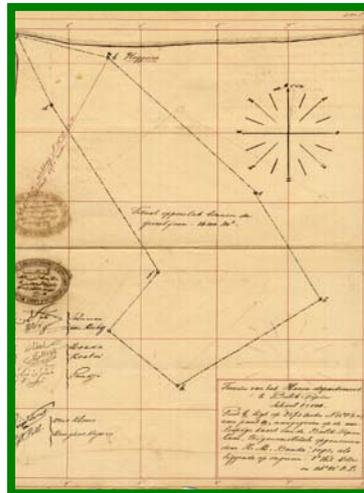
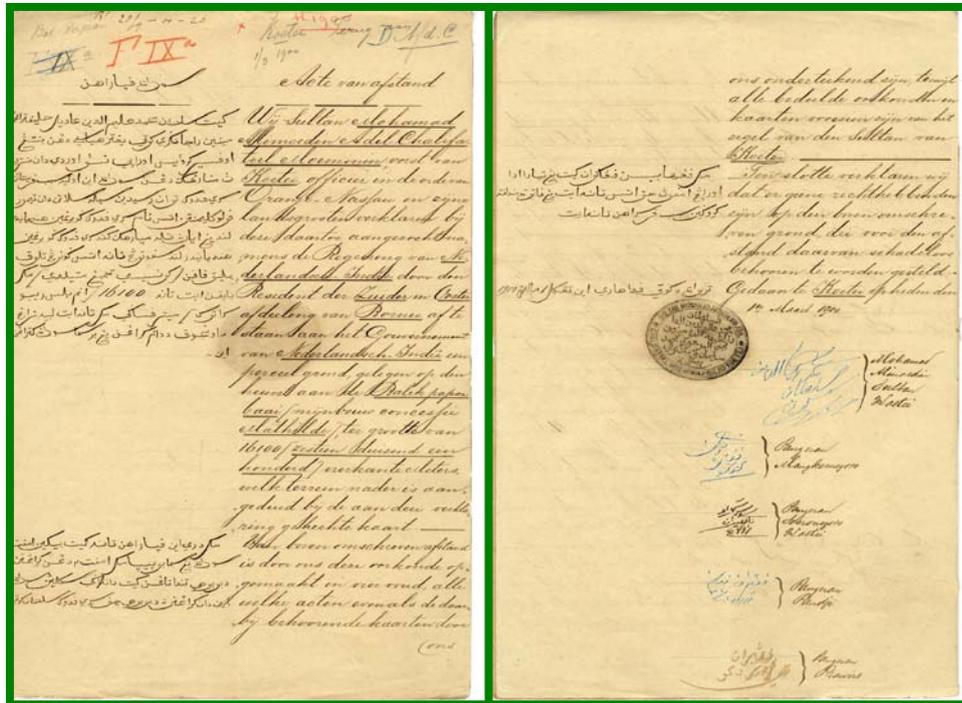
Kontrak antara Residen Kalimantan Timur - Selatan, Jacobus Gerardus Gallois dengan Sultan Gunung Taboer, Maharaja Dindah mengenai pembagian daerah (wilayah) Gunung Taboer, Kalimantan Timur.
20 Oktober 1850

ANRI: Kontrak Kalimantan No. 11



Surat pernyataan Sultan Kutai, Mohamad Soelaiman Adil Chalifatul Moekminin tentang penyerahan sebidang tanah sebelah kiri Sungai Mahakam kepada Pemerintah Hindia Belanda 23 Juli 1894

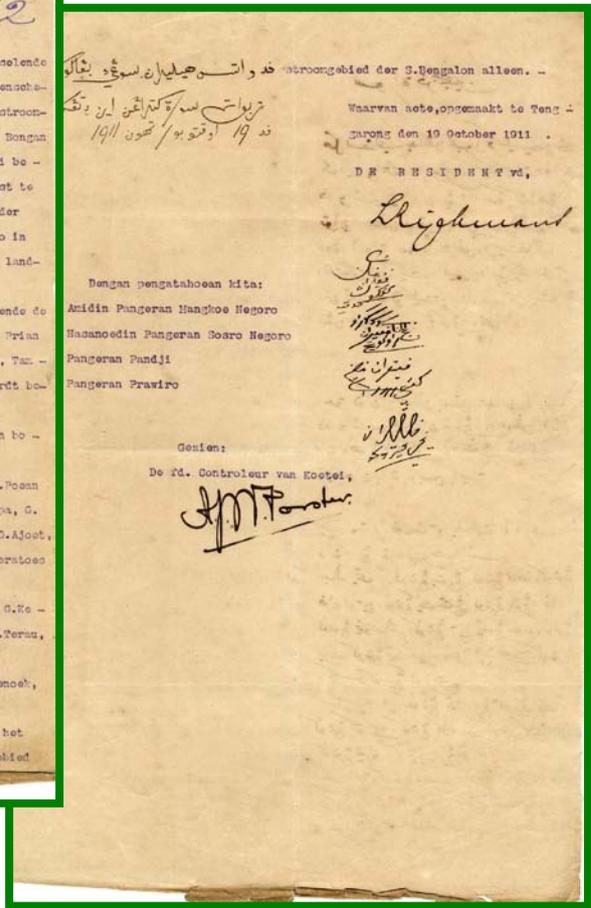
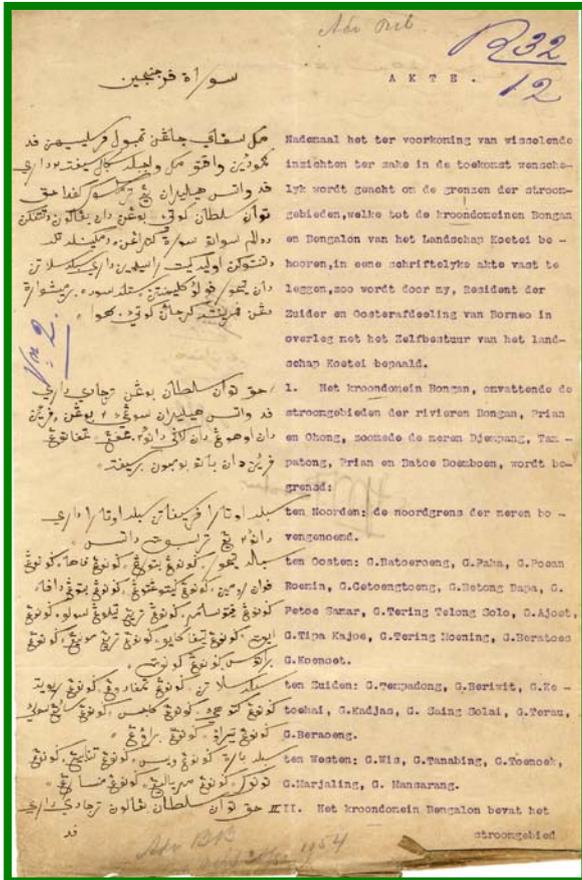
ANRI: Kontrak Kalimantan No.30



Akta Penyerahan dari Sultan Kutai, Mohamad Alimoedin Adil Chalifatoel Moekminin kepada Pemerintah Hindia Belanda mengenai penyerahan sebidang tanah (16.100 m²) di Gunung Taluk Balikpapan (Konsesi tambang *Mathilde*).

1 Maret 1900

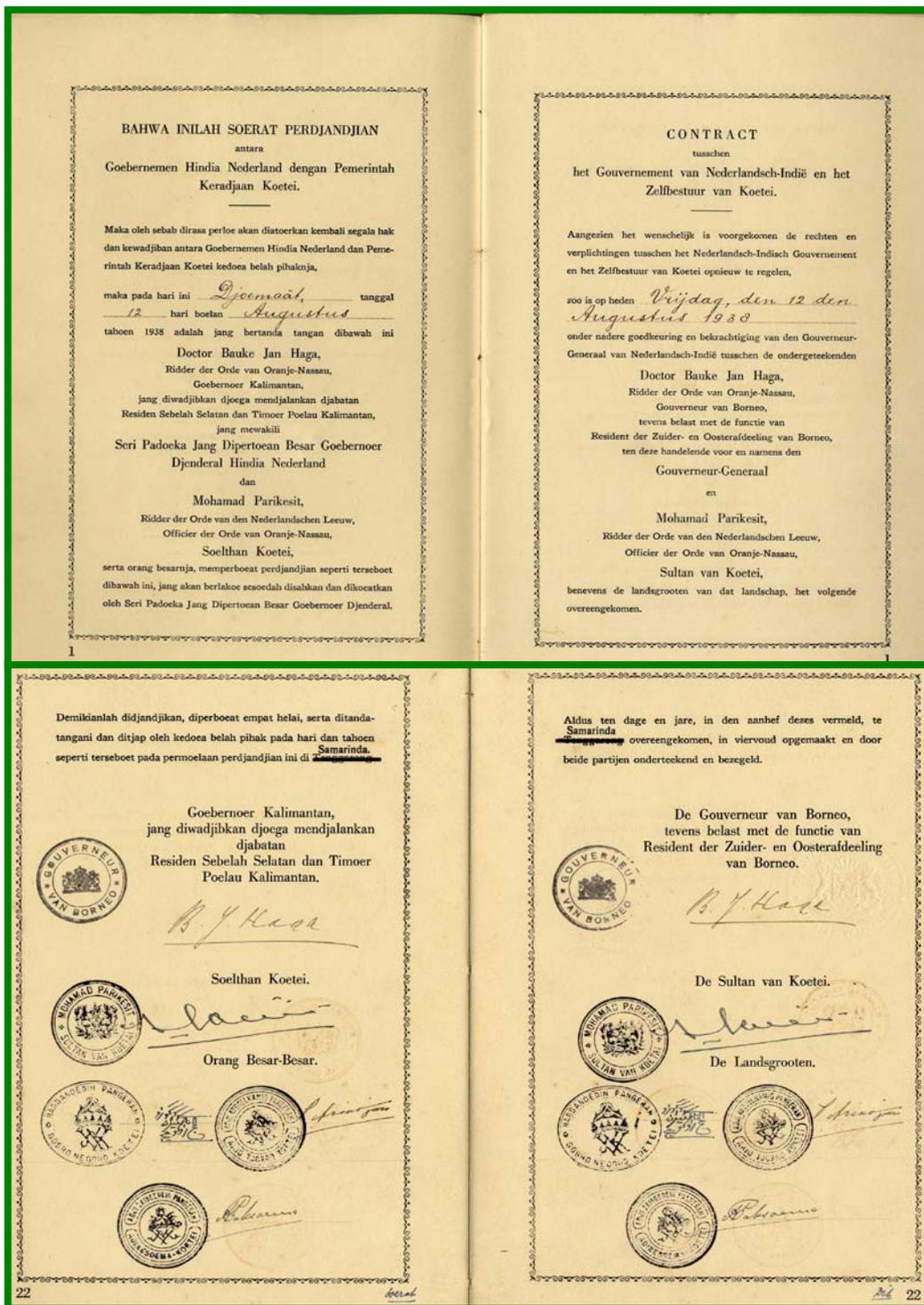
ANRI: Kontrak Kalimantan No. 2 (F.IX a)



Akte perjanjian antara Kesultanan Kutai dengan Residen Kalimantan Timur-Selatan tentang pembagian wilayah yang termasuk Kesultanan Kutai (Bongan dan Bengalon).

19 Oktober 1911

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 115



Bagian awal dan akhir dari Surat Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kesultanan Kutai mengenai batas-batas wilayah Kesultanan Kutai.

22 November 1938

ANRI: Kontrak Kalimantan No. 3



Sultan Maulana Mohammad Kasim Aldin dari Bulungan,
tanpa tahun
ANRI: KIT 325/44

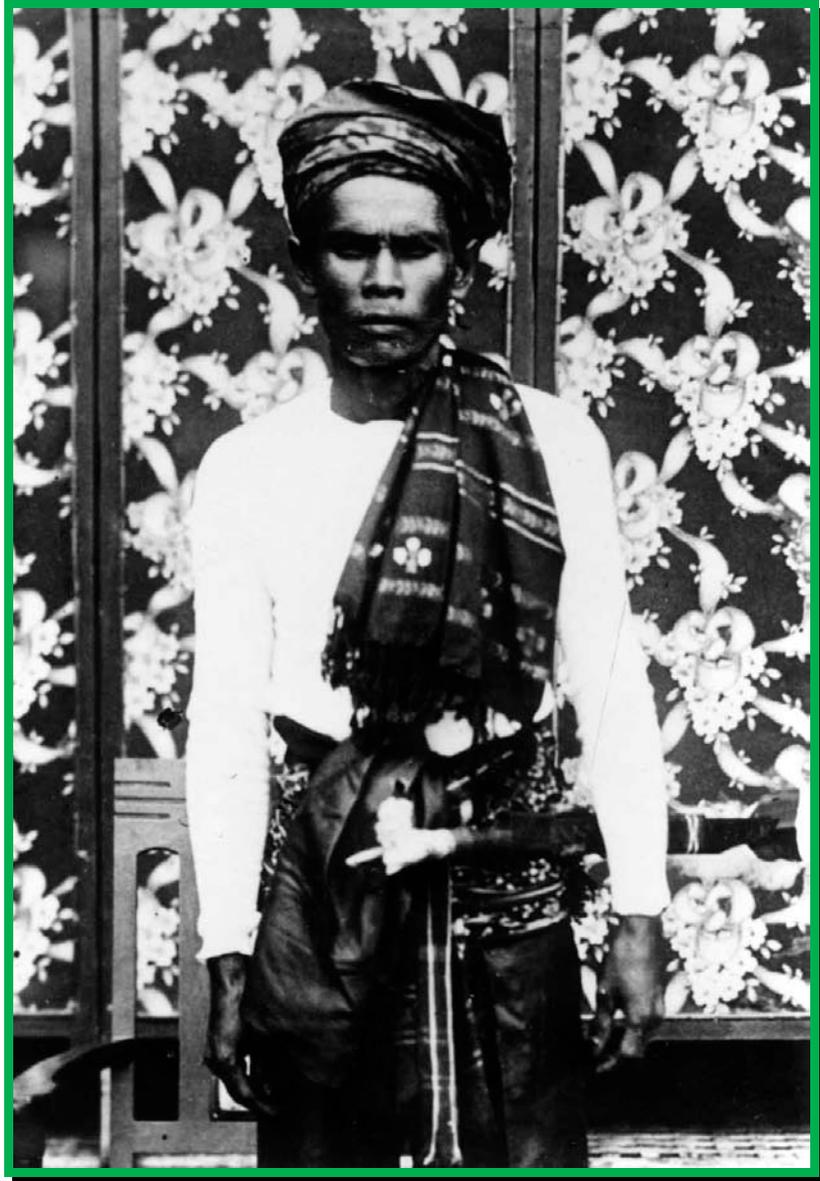


Sultan Maulana Mohammad Kasim Aldin dari Bulungan
dengan istrinya,
tanpa tahun
ANRI: KIT325/40



Datuk Mansaei, pejabat pemerintah pertama dari Bulungan,
tanpa tahun

ANRI: KIT325/48



Sultan Bulungan,
tanpa tahun
ANRI: KIT 444/44



Penguasa daerah Buwak, Kampung Gintan, Kutai,
Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 446/4



Upacara penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Sultan Haji Mohammad Parikesit di Istana Sultan Kutai, Tenggarong, Kalimantan Timur.

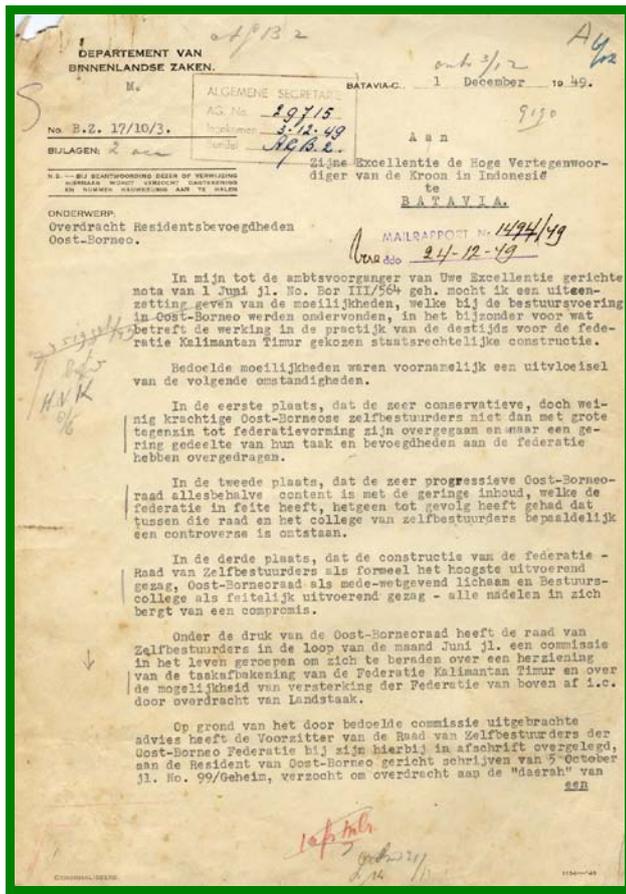
29 Maret 1948

ANRI: RVD 81129 LL 1-60



Sultan Kutai (kiri) dan Sultan Gunung Tabur (kanan)
5 Maret 1949

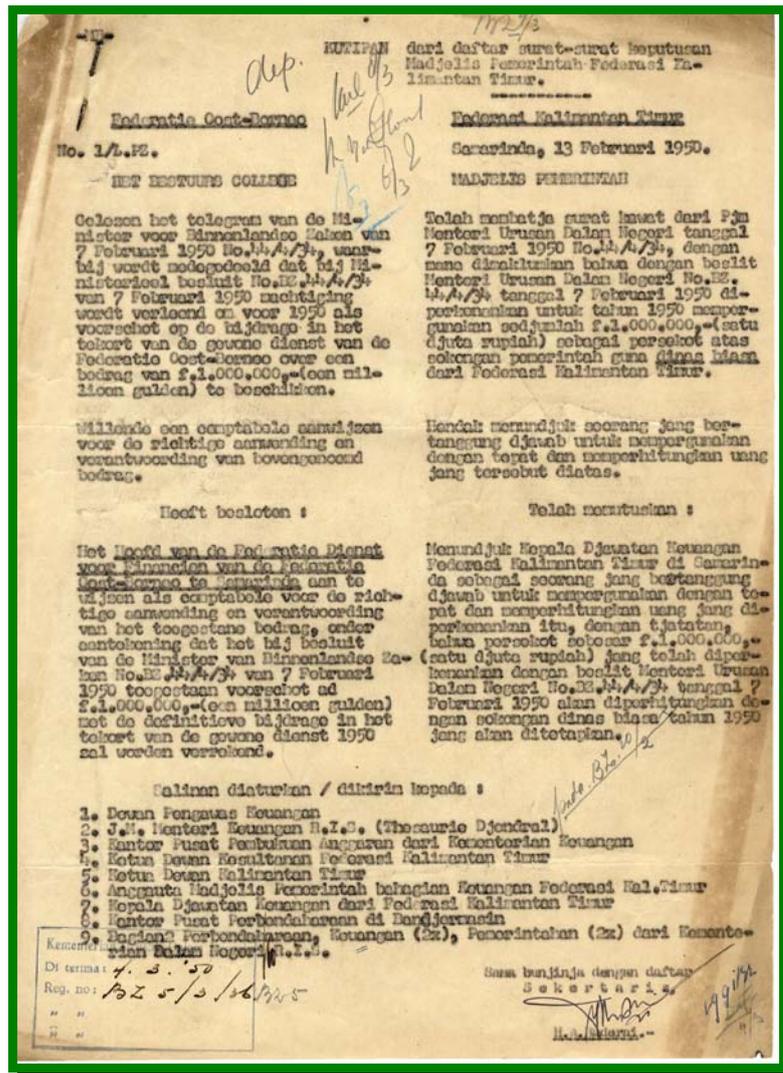
ANRI: RVD 90305 LL1-1



Bagian awal dan akhir dari surat Sekretaris Departemen Urusan Dalam Negeri, Mr. D. A. Scheerboom kepada Wakil Raja Belanda di Indonesia di Batavia mengenai penyerahan kewenangan Residen Kalimantan Timur kepada Negara Federasi Indonesia.

1 Desember 1949

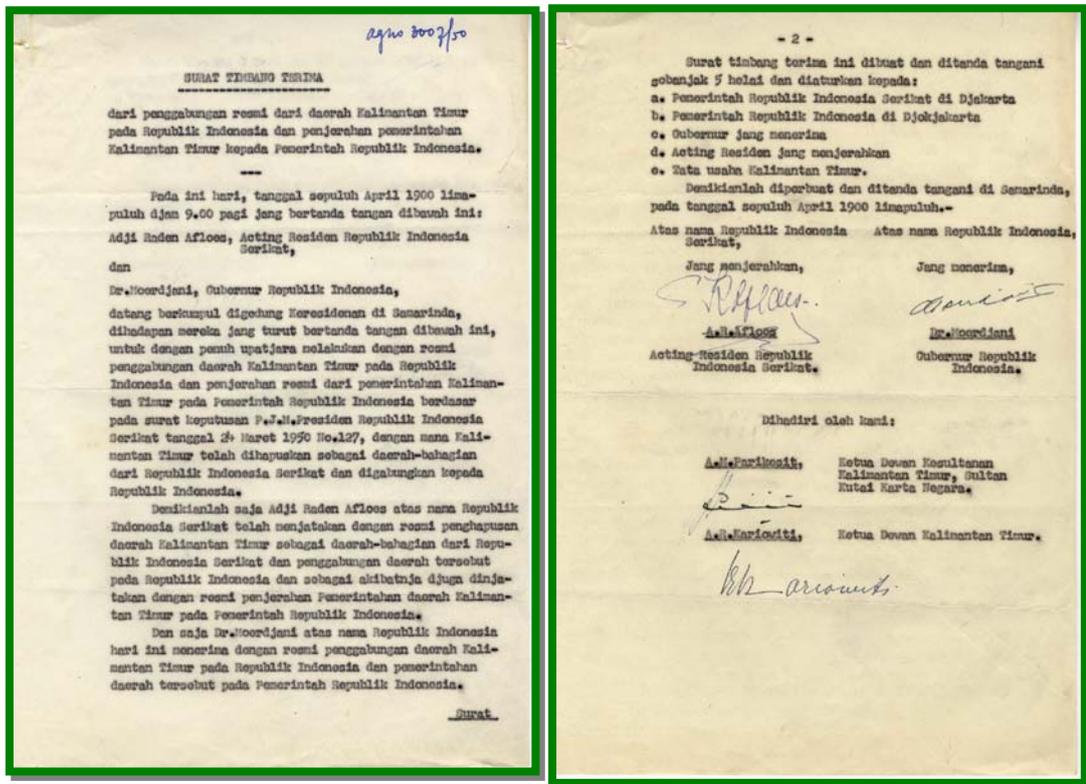
ANRI: Algemeene Secretarie No. 1324



Kutipan dari surat-surat keputusan Majelis Pemerintah Federasi Kalimantan Timur mengenai penunjukan Kepala Jawatan Keuangan Federasi Kalimantan Timur sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk mempergunakan uang persekot dinas biasa Federasi Kalimantan Timur.

13 Februari 1950

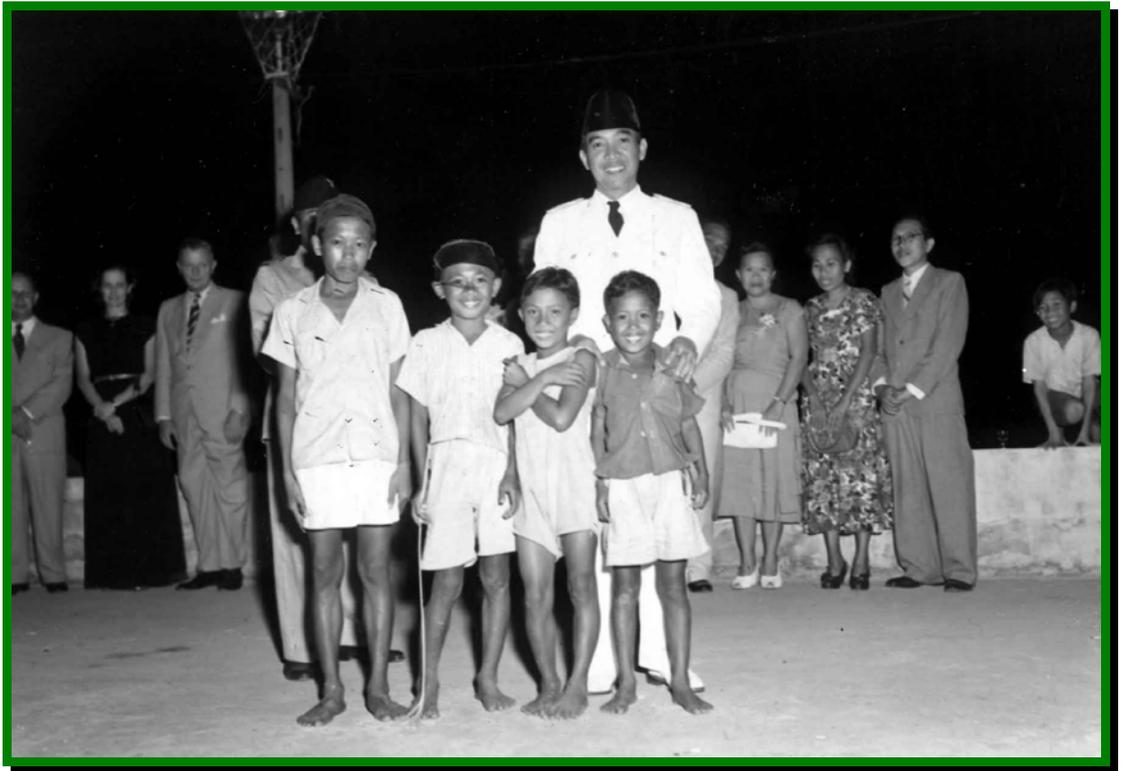
ANRI: Binnenlands Bestuur No. 1135



Surat Timbang Terima penggabungan resmi daerah Kalimantan Timur pada Republik Indonesia dan penyerahan Pemerintahan Kalimantan Timur pada Pemerintah Republik Indonesia.

10 April 1950

ANRI: Kabinet Perdana Menteri Jogja No. 92



Presiden Soekarno berfoto bersama anak-anak dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

15 September 1950

ANRI: Kempen 501265

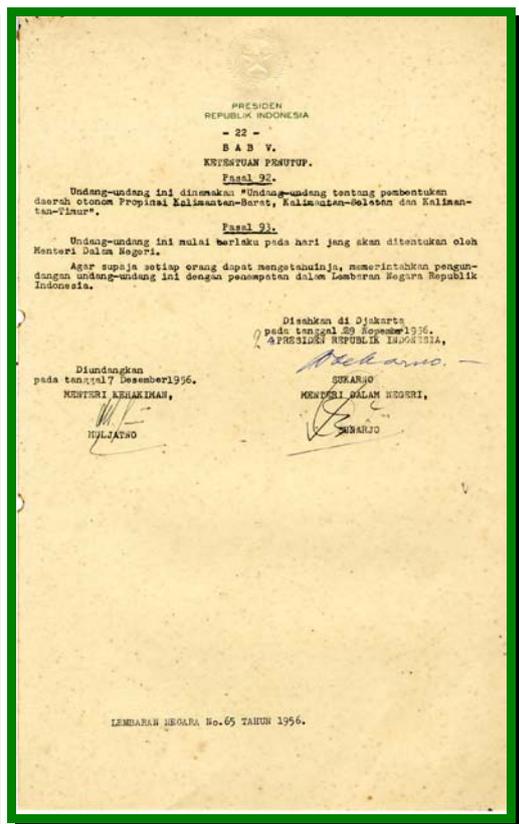
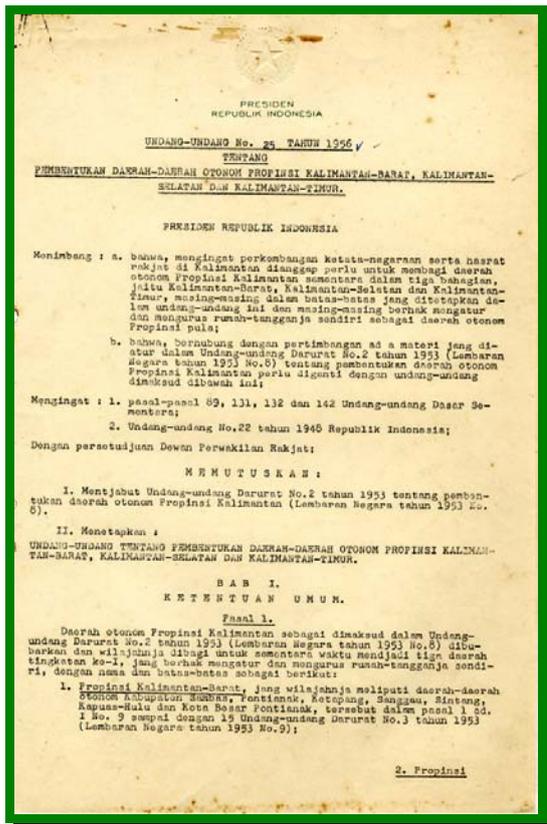


Wakil Presiden Mohammad Hatta memeriksa barisan kehormatan waktu tiba di Lapangan Udara Balikpapan, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden ke Kalimantan Timur
22 Oktober 1956

ANRI: Kempen 561022 LL 2



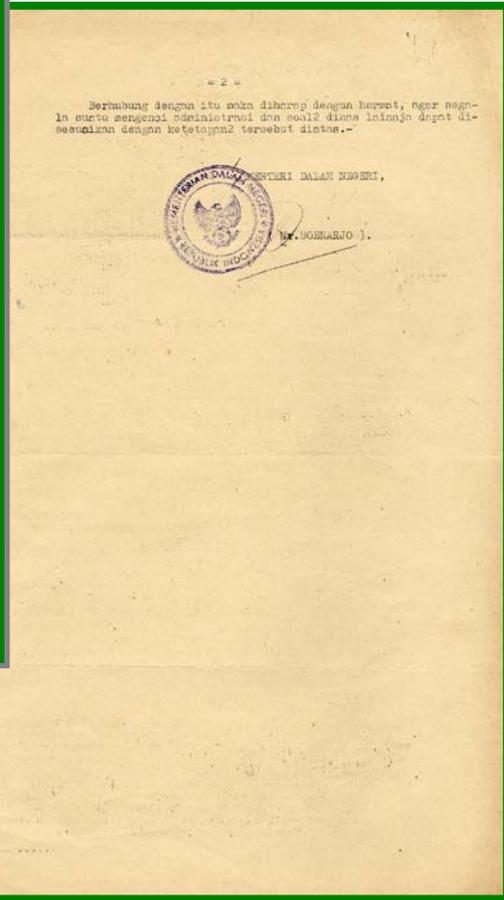
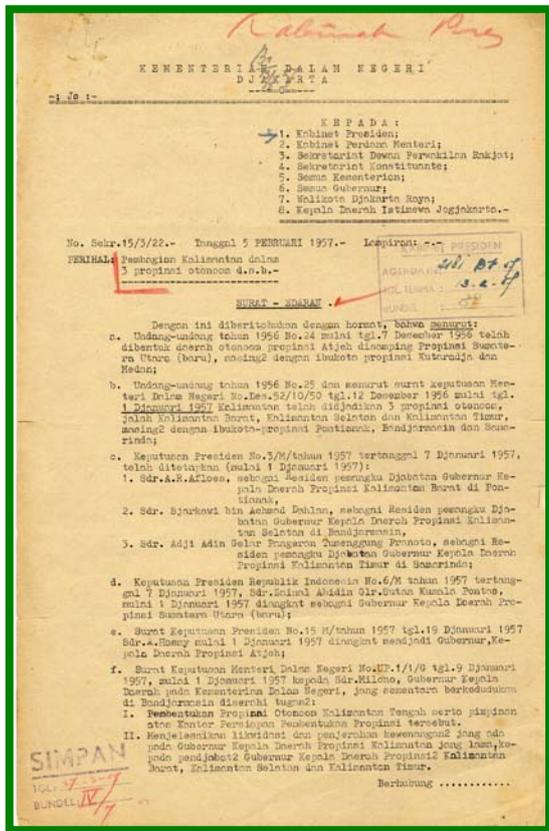
Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut Residen Samarinda
waktu tiba Samarinda, dalam rangka kunjungan kerja Wakil
Presiden ke Kalimantan Timur
24 Oktober 1956
ANRI: Kempen 561024 LL 1



Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

29 November 1956

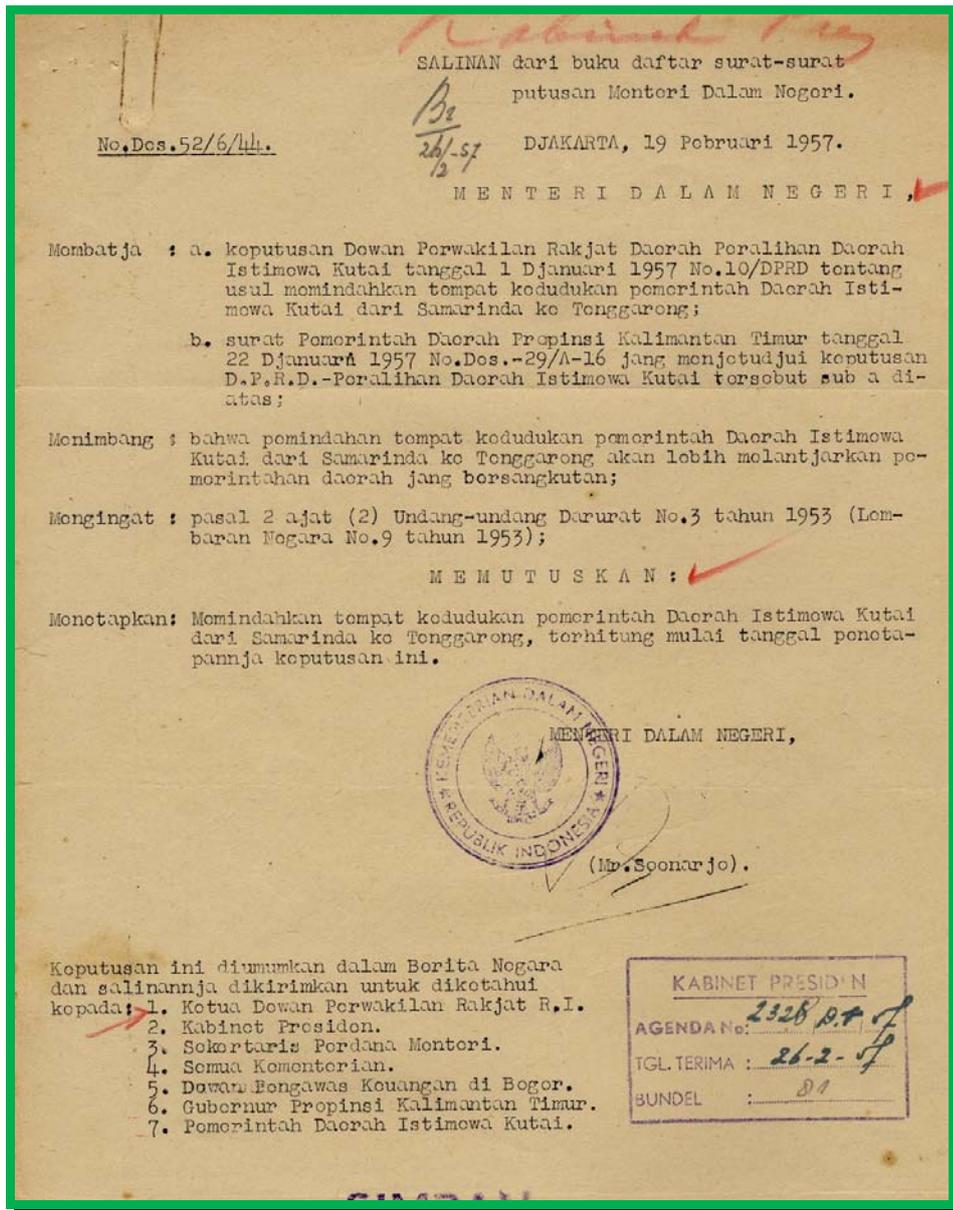
ANRI: Sekretaris Kabinet UU 1950-1960 No. 199



Surat dari Menteri Dalam Negeri, Mr. Soenarjo kepada Kabinet Presiden tentang pembagian Kalimantan dalam 3 provinsi otonom.

5 Februari 1957

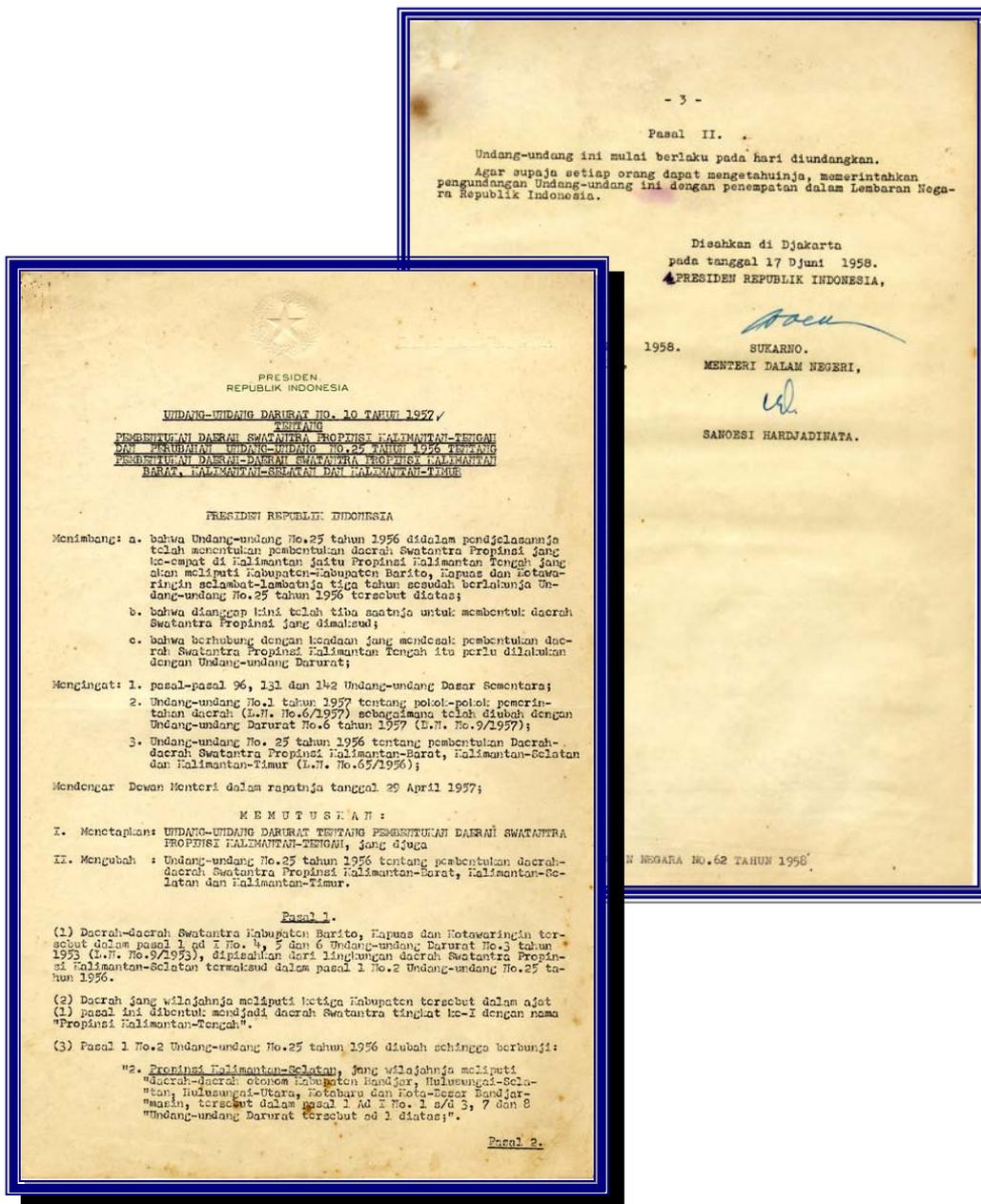
ANRI: Kabinet Presiden No. 901



Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Mr. Soenarjo mengenai
Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Istimewa
Kutai dari Samarinda ke Tenggarong.

19 Februari 1957

ANRI: Kabinet Presiden No. 853



Bagian awal dan akhir dari Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

7 Mei 1957

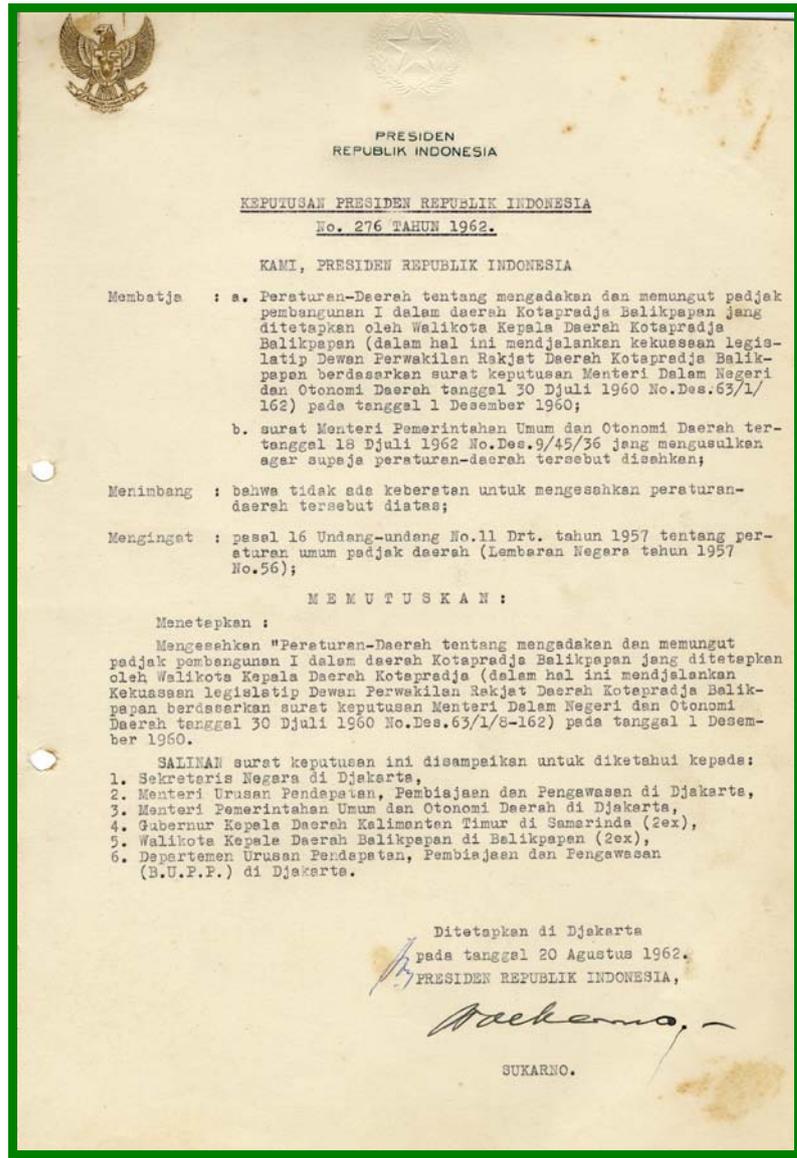
ANRI: Sekkretaris Kabinet (Undang-undang Darurat 1949-1960) No. 145



Pelantikan Adji Adin Gelar Pangeran Tumenggung Pranoto
menjadi Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

5 Februari 1960

ANRI: Deppen No.3/KT/60



Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 276 Tahun 1962 tentang Pengesahan Peraturan Daerah
mengenai Pengadaaan dan Pemungutan Pajak Pembangunan I
dalam Daerah Kotapraja Balikpapan
20 Agustus 1962

ANRI: Sekretaris Kabinet (Keputusan Presiden RI) No. 204

REPUBLIC OF INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 DEPARTEMEN PEMERINTAHAN DAERAH NEGERI
 DAERAH KALIMANTAN TIMUR KE II

Musjawarah Pemerintah Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke II, yang diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 20 s/d 24 Februari 1965 bertempat di Samarinda dan dihadiri oleh :

1. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur dan Staf;
2. Staf Juru Tulis Menteri Dalam Negeri;
3. Wakil Ketua dan para Anggota DPRD-GR Daerah Tk. II Kalimantan Timur dan para Wakil Ketua DPRD-GR Tk. II seluruh Kalimantan Timur;
4. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah diseluruh Kalimantan Timur;
5. Para Medana dan Asisten Medana diseluruh Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas/Djawatan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

Setelah mendengarkan :

1. Asasut Juru Tulis Menteri Dalam Negeri pada pembukaan Musjawarah Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke II;
2. Pidato Pembukaan oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur;
3. Urutan yang dilaksanakan oleh :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur,
 - b. Panitia Daerah dan Ketua Kopolisian Kalimantan Timur,
 - c. Staf/Utusan Menteri Dalam Negeri yang mengikuti sehubungan Musjawarah tersebut;
4. Pendapat-pendapat para peserta Musjawarah dan atas dasar kebijaksanaan Musjawarah untuk menanggapi masalah :

M E M U T A P A N :

M e m u t a p a n : Kesimpulannya-jumlah yang diambil dalam Musjawarah adalah sebagai berikut :

I. Bidang Pemerintahan Umum.

1. Meninjau kedudukan dari Departemen Dalam Negeri, diusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar Departemen Dalam Negeri diikut sertakan dalam semua kegiatan, sesuai dengan kedudukan Gubernur Kepala Daerah sebagai Koordinator bagi Djawatan vertikal di Daerah.
2. Meninjau penjabaran Pemerintahan Umum, supaya dalam waktu yang singkat sesudah pelaksanaan serah-serahi, dan untuk seterusnya, hendaknya disediakan oleh Pemerintah Pusat sumber-sumber dalam penjabaran Pemerintahan Umum.
3. Tama Tjajutan Sigid dan Urusan loka-umum, yang dahulu dipergo oleh Medana supaya diserahkan pada Asisten Medana.
4. Kebersih Kowadaman (jika statusnya telah ditetapkan), supaya tetap sebagai Daerah Koordinator hingga 31 Desember 1965, kemudian letakkan Daerah itu langsung berbatasan dengan apa yang dinamakan negara "Malaysia".

5. Mendiskusikan.....

- 12 -

3. Diusulkan supaya jumlah Transmigrasi ditambah untuk asin² Daerah Tingkat II sebagai berikut :

a. Kutai	: 8.000 KK Transmigrasi Swakarya
	17.000 KK Transmigrasi Perintis
b. Berau	: 150.000 KK Transmigrasi Perintis
c. Pasir	: 2.000 KK Transmigrasi Perintis
d. Balungan	: 250 KK Transmigrasi Perintis
4. Supaya jaminan hidup bagi Transmigrasi Swakarya dipergondangi sampai 8 (delapan) bulan dan elast² pertanian diberikan sama dengan Transmigrasi Perintis.

B. L A N D R E F O R M :

1. Dengan semangat Deklarasi Bogor bertekad melaksanakan landreform, UPA (Undang² Pokok Agraria) dan Undang² Pokok Bagi Hasil dalam waktu yang se-singkat²nya dengan mengingat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur selaku Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 11 Januari 1965 No. 90/XI/Instr/1965 demi untuk meningkatkan produksi dan melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri.
2. Supaya Pemadidan Landreform untuk Daerah Tingkat I Kalimantan Timur terpisah dari Pemadidan Landreform Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin, mengingat hal-hal yang hubungan agar semua keputusan dapat diambil dengan tjepat.
3. Supaya diadakan penerangan yang intensip dan latihan mengenai pelaksanaan Landreform kepada para Asisten Medana dan Pimpinan Organisasi massa Tani Sasakom.

Samarinda, 24 Februari 1965.
 Musjawarah Pemerintah Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke-II
 Ketua,
 d.t.o.
 A. Moesja Hoessein
 Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur.

Diperbarjok oleh Sekretaris Panitia penyelenggara Musjawarah Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke-II.

Musjawarah ini dihadiri oleh para peserta sebagai tertera dalam daftar berikut :

Bagian awal dan akhir dari laporan hasil musyawarah Pemerintah Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke-2 yang diselenggarakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada tanggal 20-24 Februari 1965.

24 Februari 1965

ANRI: Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat No.1062

MENTERI NEGARA
PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jakarta, April 1981.

Nomor : B-~~77~~/MNPPPLH/4/81
Sifat : segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
H a l : Laporan kunjungan kerja
24-28 Maret 1981 di-
daerah Kaltim.

Kepada Yth.
Gubernur/KDH Tk. I
Kalimantan Timur
di
SAMARINDA.

Terima kasih saya sampaikan atas sambutan dan peladenan wakil Saudara, Bupati Berau dan Bupati Bulungan selama kunjungan kerja 24-28 Maret di daerah Kalimantan Timur.

Hasil kunjungan ini telah saya laporkan :

- (1) kepada forum Menteri-Menteri EKUIN, 30 Maret 1981
- (2) kepada Bapak Presiden pada tanggal 2 April 1981.

Memperhatikan hasil pertemuan ini saya minta perhatian Saudara pada hal-hal penting bagi daerah Saudara sbb. :

1. SKB 3 Menteri.

- (1) petunjuk Bapak Presiden ialah agar ekspor kayu gelondongan berangsur-angsur hapus untuk digantikan dengan ekspor kayu plywood. Karena itu maka ekspor kayu gelondongan dikaitkan dengan kegiatan pengusaha membangun industri terpadu yang memuat kayu plywood. Dalam masa peralihan ini masalah buruh ditanggulangi dengan program investasi yang berlangsung di Kaltim (seperti proyek pupuk, kilang minyak, penghijauan-reboisasi, dll.). Dokumen "Perkembangan pelaksanaan surat keputusan bersama tiga Menteri sampai dengan akhir Maret 1981" oleh Menteri Pertanian kiranya menjadi bahan-informasi memahami latar-belakang kebijakan ini ;

- (2) sesuai dengan hasil pembicaraan saya dengan wakil-wakil instansi Pemerintah di daerah Kalimantan Timur, 27 Maret 1981. Kiranya Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengadakan inventarisasi tentang keperluan tenaga kerja bagi proyek-proyek pembangunan di daerah Kaltim untuk digunakan menampung tenaga kerja yang menganggur di daerah.

2. Program Transmigrasi.

- (1) Petunjuk Bapak Presiden ialah agar pemilihan lokasi transmigrasi tidak sampai merugikan hutan. Dalam hubungan ini perlu dinilai usul program "Transmigration Areal Development" (TAD);

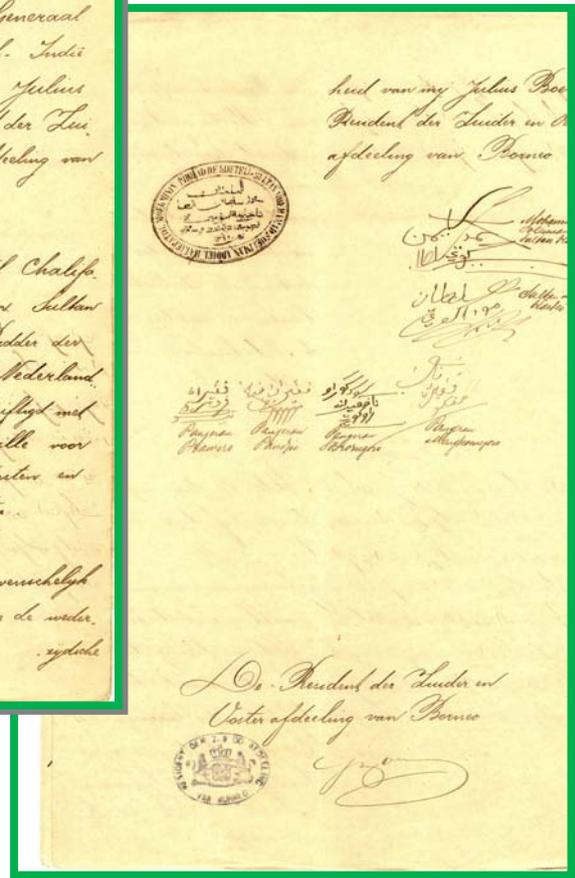
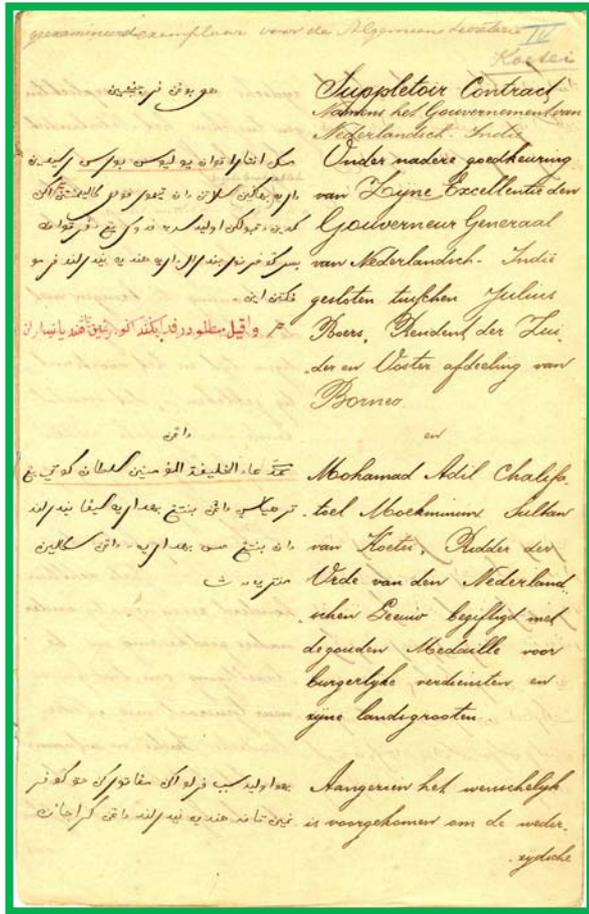
(2)

Surat dari Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim kepada Gubernur/KDH Tk. I di Kalimantan Timur mengenai laporan kunjungan kerja 24-28 Maret 1981 di daerah Kalimantan Timur.

April 1981

ANRI: Adam Malik No. 1165

Pertahanan dan Keamanan



Surat Perjanjian antara Residen Kalimantan Timur-Selatan, Julius Boers dengan Sultan Kutai, Mohamad Adil Chalifatoel Moekminin mengenai pelarangan membawa keluar/masuk senjata api di dalam daerah Kesultanan Kutai.

12 Juli 1896

ANRI: Kontrak Kalimantan 31

V E R S L A G betreffende het organiseeren van den
luchtbeschermingsdienst Tarakan.
(Voorloopige Organisatie).

I. DE STAD (zie platte grond)

Tarakan gelogen in het Z.W.gedeelte van het eiland Tarakan bestaat uit de kustplaats Lingkas en de meer binnenwaarts gelogen plaats Pamocsian.

Te Lingkas wordt de olie verschoopt, waarvoor een tweetal steigers ± 500 m in zee zijn uitgebouwd. Onmiddellijk achter de steigers vindt men een groot tankon-park, eenige magazijnen van de B.P.M. benevens enkele koolie-bangsals.

Het zuivere B.P.M.-bedrijf is op den plattgrond aangegeven.

Van Lingkas voert een behoorlijke rijweg gedeeltelijk langs de kust naar Pamocsian. Aan weerszijden van dezen weg treft men veelal een ondiepe bebouwing aan, grootendeels houten huizen. Alvorens Pamocsian te bereiken wordt een evenwijdig aan de kust loopende heuvelrug gepasseerd. Men komt dan in het eigenlijke Tarakan, dat wederom door een ongeveer N-Z loopende rug in twee deelen wordt gesplitst.

In het W.gedeelte liggen de Militaire Kampementen, het Chinese kamp en tal van Europeesche woningen.

In het O.gedeelte liggen het tankenpark, het hoofdkantoor van de B.P.M., enkele magazijnen, het B.P.M.-ziekenhuis, eenige Europeesche woningen en 2 B.P.M.kampomg-complexen, terwijl zich hier eveneens de boorterrinen van de B.P.M. bevinden.

N. en O. van de boorterrinen vindt men nog een tweetal B.P.M.-Kampomg-complexen; ± 12 km N. van Pamocsian ligt het boorterrin Djocota. Hier vindt men een B.P.M.-kampung; de Europeesche bevolking bestaat hier uit 5 families.

In verband met het bovenstaande werd Tarakan in 3 sectoren verdeeld, waarbij zooveel mogelijk de natuurlijke grenzen (heuvelruggen) als sector-grens werden genomen. Aangezien de sector Lingkas zeer groot is, werd deze sector nog gesplitst.

Het bedrijf van de B.P.M. vormt een eigen lbd. met een eigen hoofd.

Overigens wordt verwezen naar den plattgrond.

LUCHTBEscherMINGSDIENST TARAKAN
ALARMERING- EN VERBINDINGSDIENST
(Voorloopige Organisatie).

Bilanci 1.

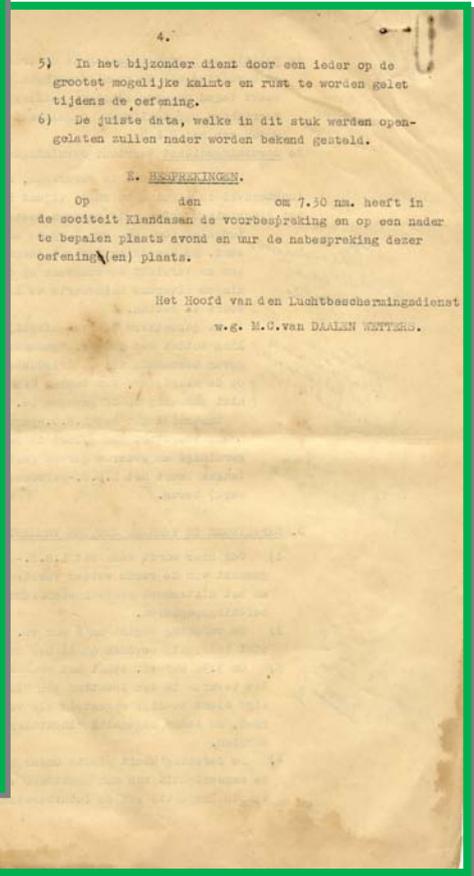
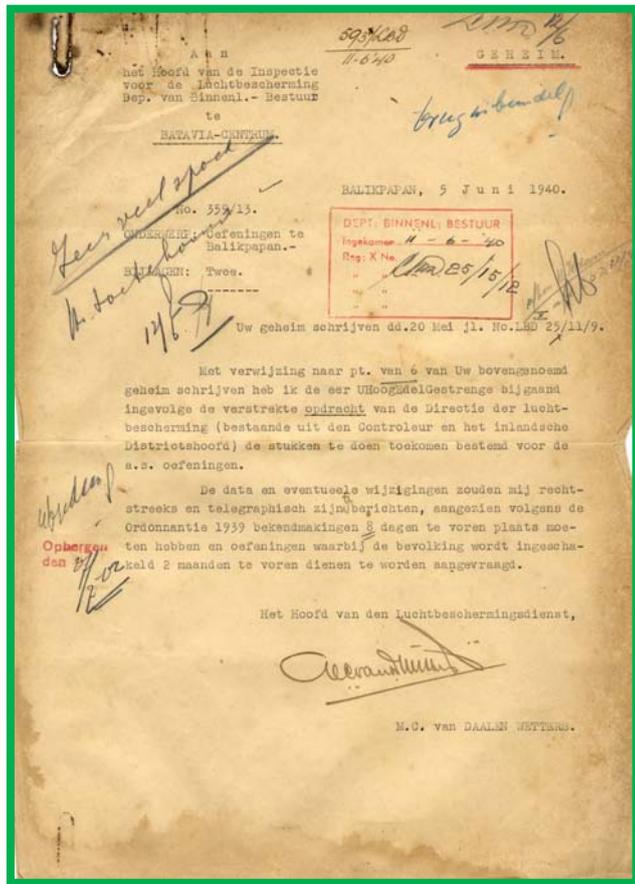
Omschrijving	M a t e r i e e l								Toelichtingen
	Per- sonnel	gasm- trons	si- rems	si- rems	si- rems	radio	alarme- ring	toe- ring	
A. Alarmsingdienst.									
Hoofd 1)									1) Opgezomen in den staf Hd.Lbd. i.v.v. noeligheden met personeelbesetting werd geen onderhoofd uitgetrokken.
Sirems (nieuw) 3 x 4'	15	15	3						2) Electriche sirems.
Sirems (bestaande) 2)	4	4							3) 15 aansluitingen.
Sirems (band)									4) Sector I 3
									Sector II 4
									Sector III 4
									Hd.Lbd. 3
B. Verbindingsdienst.									Totaal 22.
Hoofd 1)									
Personeel telefoon	3	3							
Personeel radio	2	2				1			
Personeel alarmering	4	4							
Personeel alarmering- toestel	2	2							
Ordonnansen	22	22							
Totaal	50	50	3	3	3	1	1	1	

Tarakan, 11 April 1933.
(v.w.) A.J.Th. Boester.

Laporan dari A. J. Th. Boester mengenai Organisasi Dinas Perlindungan Udara (*Luchtbeschermingsdienst*) di Tarakan, Kalimantan Timur.

11 April 1938

ANRI: Binnenlands Bestuur No.3965



Surat dari kepala Dinas Perlindungan Udara kepada Kepala Inspeksi Perlindungan Udara Departemen Dalam Negeri mengenai pelatihan pengawasan dan penanganan bahaya serangan udara di Balikpapan.

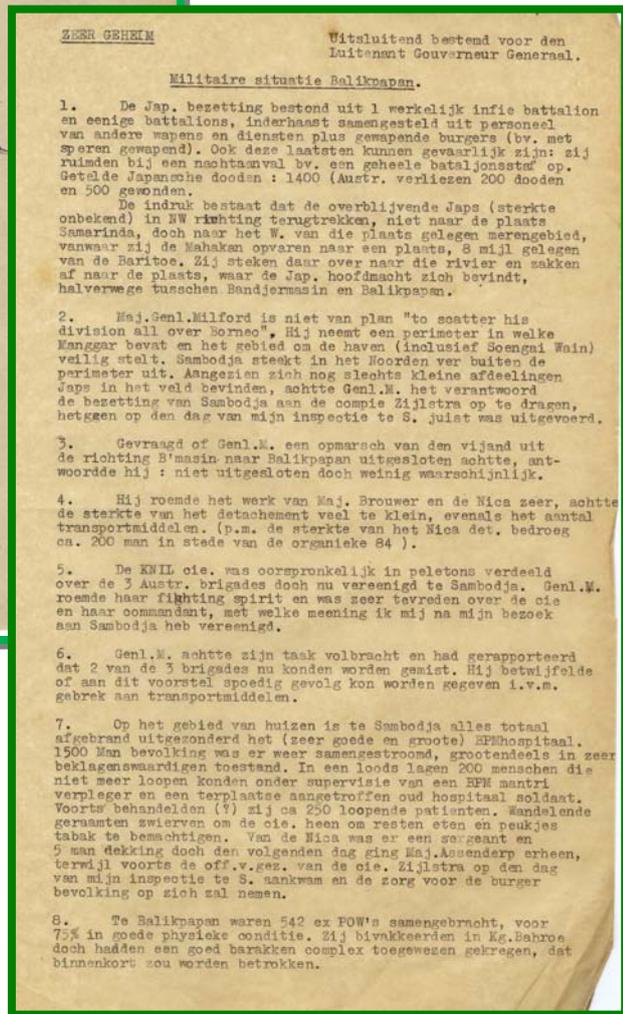
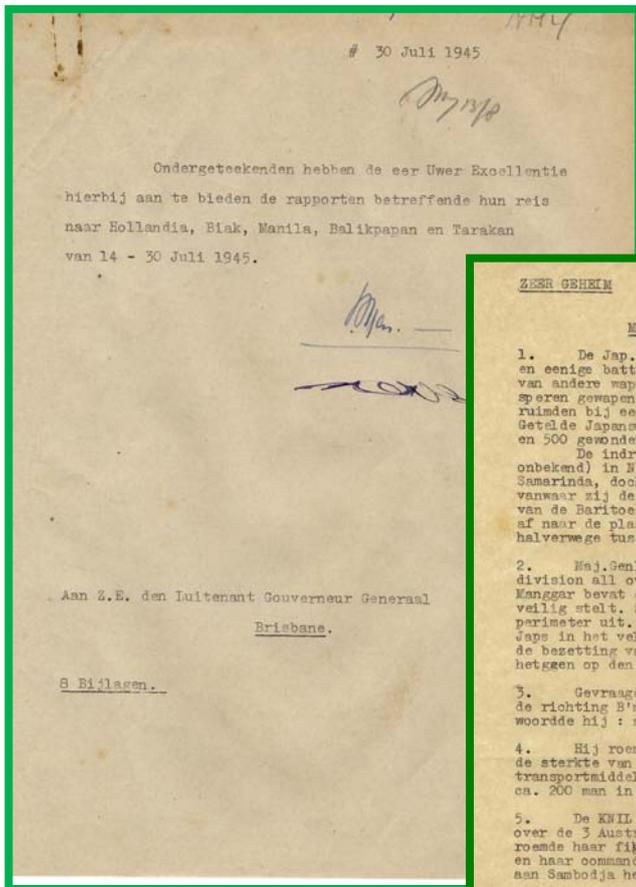
5 Juni 1940

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 4087



Penduduk Pulau Tarakan mengungsi ke tempat aman dari
perang yang terjadi di Tarakan,
30 April 1945

ANRI: NIGIS NO. 1073146



Laporan perjalanan kunjungan sejumlah tentara Belanda ke
Holandia, Biak, Manila, Balikpapan dan Tarakan untuk inspeksi
gedung dan instalasi militer.

30 Juli 1945

ANRI: Algemeene Secretarie No. 1494



Anggota Pembela Tanah Air (Peta) mengadakan patroli dari
Balikpapan ke Samboja, Kalimantan Timur.

Juli 1945

ANRI: NIGIS No. 1073316

PEMBANTU PANITYA GERAKAN MENDALAMI TAVIP
DATI I KALIMANTAN TIMUR.

N o. 10/PMT/1965.

Samarinda, 5 April 1965.-

Lampiran : *6 Rangkap.*

Perihal : Laporan pembentukan
dan rentjana kerja.

K e p a d a
Jth PANITYA GERAKAN MENDALAMI TAVIP
DjL.HOS Tjokroaminoto No.59,
D i - DJAKARTA.

Dengan hormat,

Terlampir dengan ini kami sampaikan Laporan Pembentukan Pembantu Panitia Gerakan Mendalami TAVIP Dati I Kalimantan Timur dan rentjana kerjanya untuk memenuhi permintaan Saudara.

Kami berharap dengan hormat dan dengan sangat agar dijawab sajembara dari Panitia Pusat segera Saudara kiriman kepada kami. Kami harapkan agar sudah dapat kami terima sebelumnya tanggal 30 APRIL 1965 yang akan datang, supaya rentjana kerjanya dapat kami laksanakan tepat pada waktunya.

Mengingat sukarnya perhubungan Djakarta - Samarinda, kami andjurkan agar jawaban tersebut dapat diantarkan oleh seorang korier dari Panitia Pusat langsung ke Samarinda.

Pembantu Panitia Gerakan Mendalami TAVIP
Dati I Kalimantan Timur,

Ketua,

Achmad Ibrahim
Achmad Ibrahim.

Tembusan dikirim dengan hormat kepada :

1. J.W.Minko Perhubungan dengan Rakyat di Djakarta.
2. J.W.Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
3. J.W.Menteri/Sekdjen P.B.Front Nasional di Djakarta.
untuk dimaklumi dan seperlunya.

SURAT M. BUK	
No.:	1141/1965.-
Tgl.:	5 April 1965
Diter.:	

Surat dari Achmad Ibrahim, Panitia Gerakan mendalami *Tahun Vivere Peri Coloso* (TAVIP) Dati I Kalimantan Timur kepada Panitia Gerakan mendalami TAVIP mengenai pembentukan Panitia Mendalami TAVIP Dati I Kalimantan Timur.

5 April 1965

ANRI: Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat No. 1064

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR**

PERNYATAAN :
No. : 02/PRRD/DPD-GR/1965.

Sidang Hari-Rapat Ke-IV tahun 1965 DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang berlangsung pada tanggal 19 November 1965 di Samarinda.

PADA :

1. Pernyataan DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 4 Oktober 1965 No. 07/PRRD/DPD-GR/1965 bertalian dengan peristiwa bentan Revolusioner dari Jawa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
2. Pernyataan rapat Raksasa semesta bulat Gerakan 30 September tanggal 13 Oktober 1965 di Samarinda dengan pimpinan oleh Korpri Tjandjoe Kardi/Wilaga Kalimantan Timur P.N.I., N.U., Z.N.I.I., Partai, Partai Katolik, Serikat, Partindo dan partai revolusioner lainnya, yang memohon kepada P.J.M. Presiden/Panglima Besar Revolusi/Bahwasia Seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pahlawan Jalan dan Kemerdakaan Bung Karno untuk segera membubarkan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-ormas yang berwujud di dalamnya.

PADA :

Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Timur pada saat ini sidang ke-IV tahun 1965 DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 16 November 1965.

1. Bukti2 yang telah ada di tangan yang bertajuk bahwa P.K. Pemuda Rakyat, Gerakan, Sekel, H.P, G.M.I, I.P.P.I. Ieksa, B.T.I. dan Ormas2 amatik lainnya, memalangi dan meronggani gerakan kontra revolusioner gerakan 30 September.
2. Dengan setiap gerakan kontra revolusioner harus segera di kinta lebih lanjut ke-berbagai, deal berkoordinasi untuk memusnahkan semua terpaubunda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pahlawan Jalan dan Kemerdakaan Bung Karno tanggal 21 Oktober 1965.
2. Instruksi KOTI tanggal 15 November 1965 No.22/KOTI/1965.

Munjabarah DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam sidang Hari-Rapat Ke-IV tahun 1965 tanggal 19 November 1965.

MEMUTUSKAN :

1. Memohon kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Revolusi/Pahlawan Jalan dan Kemerdakaan Bung Karno untuk segera membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia beserta ormas2 amatik-chinast, yang berwujud di dalamnya dan seluruh ormas2 yang terlibat dalam gerakan bentan revolusi

- 2 -

Samarinda, 19 November 1965
A.L. Diridwan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Lirantung Timur,
Kalimantan Timur
A. AZVA CHAND

M.M.E ini diturutan/ditandatangani oleh :

M. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
P. Perdana Menteri di Jakarta.
M. Menteri Kabinet di Jakarta.
P. Pimpinan M.P.R.S. Republik Indonesia di Bandung.
P. Pimpinan D.P.R.G.R Republik Indonesia di Jakarta.
P. Ketua Front Nasional di Jakarta.
P. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur.
P. Ketua Orsol/Ormas Daerah Kalimantan Timur.

-----R-----

Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tentang permohonan kepada Presiden Soekarno untuk segera membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormasnya.

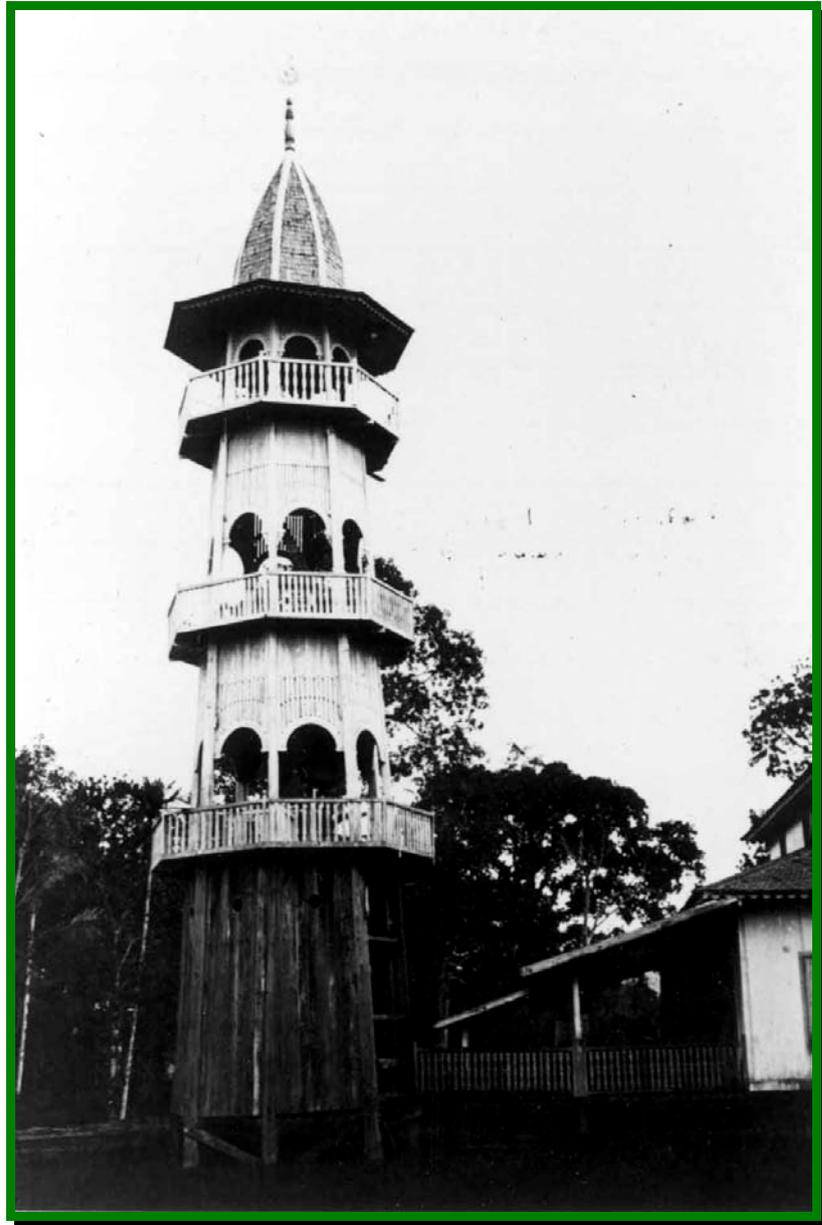
19 November 1965

ANRI: Roeslan Abdul Gani No. 1619

Keagamaan



Mesjid Sultan Kutai, di Tenggarong Barat, Kalimantan Timur.
tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 807/2



Menara Masjid di Samarinda, Kalimantan Timur.
tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 803/6



Gereja di Mahakam Atas, Kalimantan Timur.
tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 809/37



Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur.
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: NIGIS NO. A 1031

Kesehatan



Rumah Sakit di Nunukan, Kalimantan Timur
1940
ANRI: KIT 356/13



Rumah Sakit di Balikpapan, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/90



Suasana di dalam ruangan Rumah Sakit di Balikpapan,
Kalimantan Timur
Tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/10



Rumah Sakit di Samarinda, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/18



Rumah Sakit di Tanjung Redeb, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/30



Kunjungan Sultan Kutai ke "Margriet Hospital" di Balikpapan,
18 Juli 1947

ANRI: RVD No. 70718 LL 24



Palang Merah Indonesia Cabang Balikpapan, Kalimantan Timur.

24 Mei 1958

ANRI: Kempen 1958

Pendidikan



Murid-murid Sekolah Kristen di Laham, Kalimantan Timur
tanpa tanggal (+ 1940)

ANRI: KIT 308/71



Pemberantasan buta huruf di Samarinda, Kalimantan Timur
7 Mei 1949

ANRI: Kempen RIS 90507 LL ii

Jogjakarta, 10 Oktober 1949.

658/Um/49.

Kepada

Jth. Sekretariat Gerakan
Panduan Indonesia Tenggara

di

KALIMANTAN-TIMUR.

Merdeka.

Memenuhi surat saudara-saudara tertanggal 13 September 1949 yang ditujukan kepada P.J.M. Presiden Soekarno bersama ini saja sampaikan kepada saudara-saudara hadiah P.J.M. Presiden berupa sebuah Korek Api untuk dipergunakan guna menyalakan api unggun yang akan saudara-saudara adakan nanti pada hari ulang tahun pertama dari Gerakan Kepanduan di Tenggara pada tanggal 16 malam 17 Oktober j.a.d.

Mudah-mudahan njalanja api unggun itu akan mendjadi njalanja api tjita-tjita Kemerdekaan bangsa Indonesia yang tidak mungkin dapat dipadamkan lagi.

Selanjutnja P.J.M. menasehatkan kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara menggabungkan diri kepada Panduan Rakjat Indonesia di Djakarta agar Gerakan Kepanduan ditengah air kita ini tidak berdiri sendiri-sendiri akan tetapi merupakan satu kesatuan yang kuat dan teguh.

Dan sebagai penutup beliau mendoakan agar peringatan hari ulang tahun pertama dari Gerakan Kepanduan Indonesia di Tenggara ini dapat berlangsung dengan selamat dan dikemudian hari akan mentjapai kemajuan yang pesat.

Wk. SEKRETARIS NEGARA,

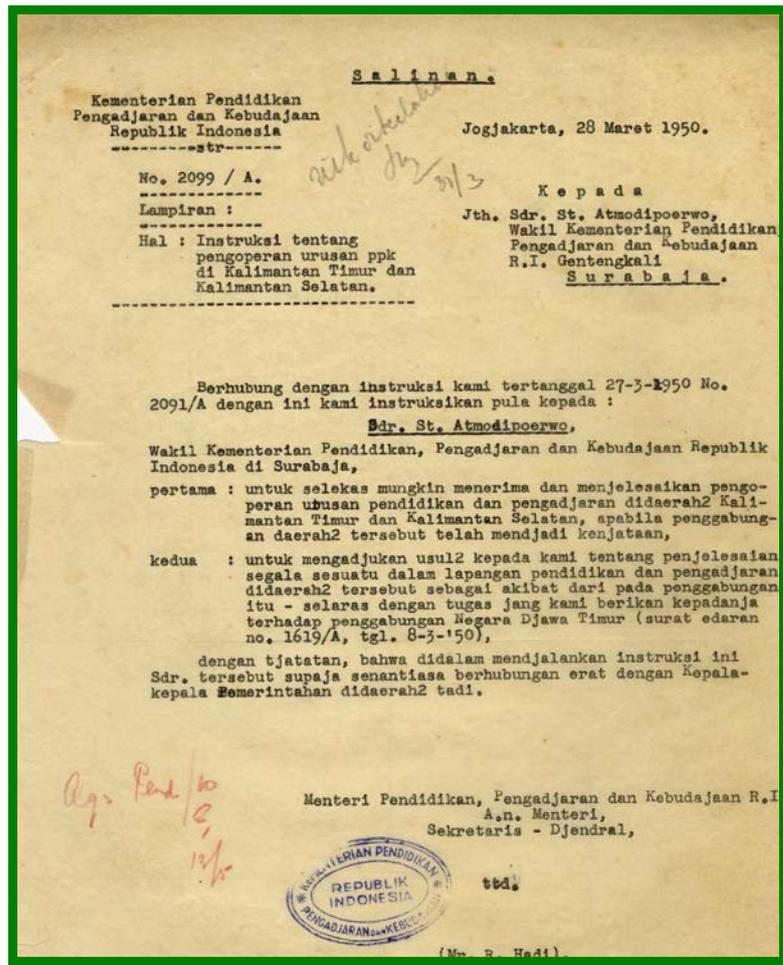
Tembusan ke
Panduan Rakjat di Djakarta.

(Mr. RATMOKO)

Surat dari Wakil Sekretaris Negara, Mr. Ratmoko kepada Sekretaris Gerakan Panduan Indonesia Tenggara mengenai pemberian hadiah dari Presiden Soekarno berupa sebuah korek api yang akan digunakan untuk menyalakan api unggun pada perayaan ulang tahun pertama Gerakan Kepanduan di Tenggara.

10 Oktober 1949

ANRI: Sekretariat Negara RI 1945-1949 No. 78



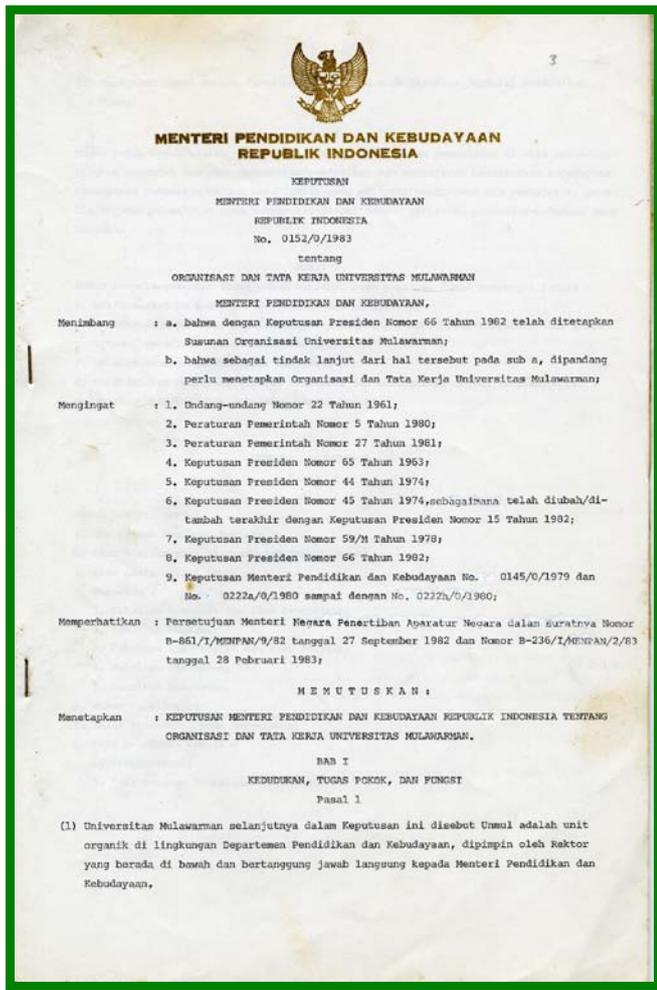
Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Hadi kepada Wakil Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jawa Timur, St. Atmodipuro mengenai instruksi untuk mengadakan perjalanan orientasi urusan pendidikan dan pengajaran di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan instruksi tentang pengoperan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

28 Maret 1950

ANRI: Sekretariat Negara RI Jogja No. 91



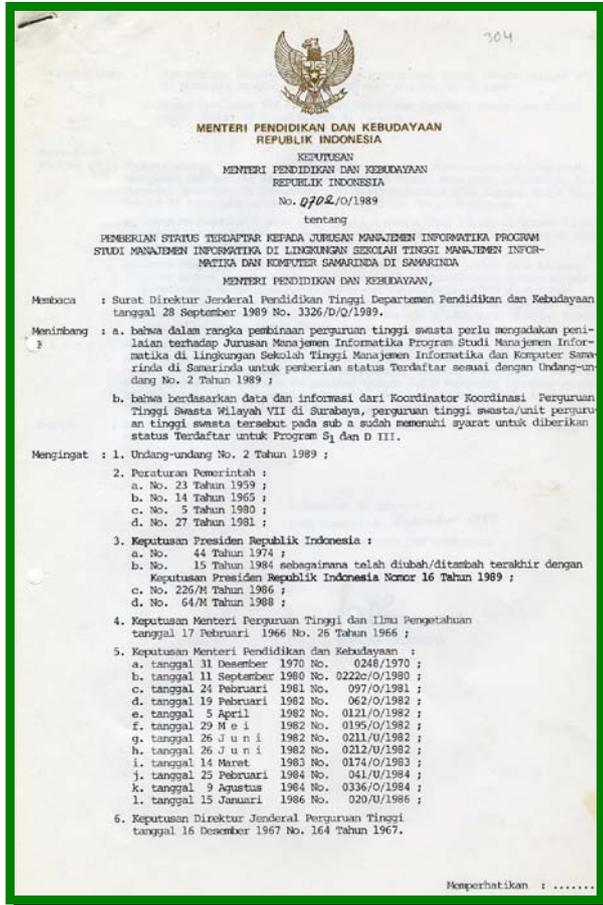
Kunjungan Presiden Soekarno ke sekolah teknik yang didirikan oleh *Bataafsche Petroleum Mascaappij* (BPM- sekarang menjadi Pertamina), di Balikpapan, Kalimantan Timur.
September 1950
ANRI: Kempen 501248



Bagian awal dan akhir dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0152 /O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.

5 Maret 1983

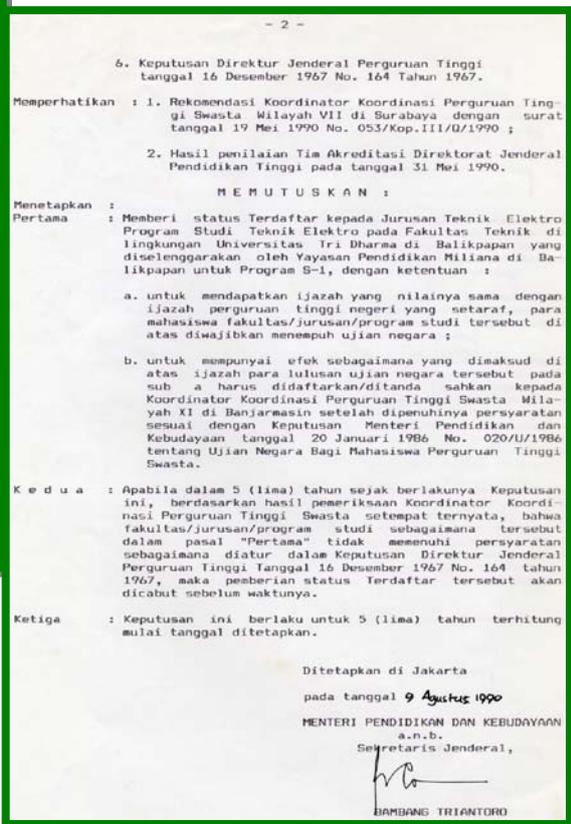
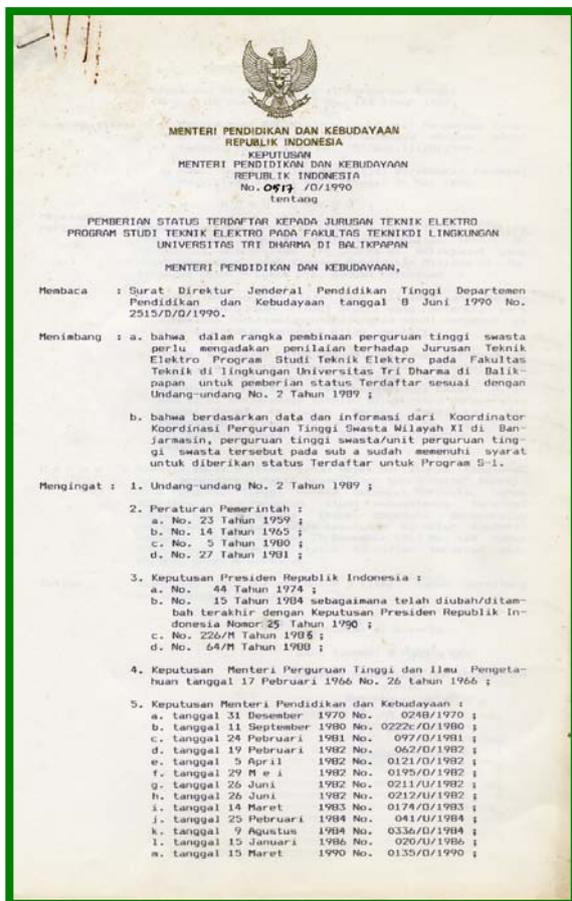
ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1952-2004 No.3



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0702/0/1989 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Manajemen Informatika di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Samarinda di Samarinda, Kalimantan Timur.

2 November 1989

ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1952-2004 No.304



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0517/0/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Elektro pada Fakultas Teknik di Lingkungan Universitas Tri Dharma di Balikpapan, Kalimantan Timur.
9 Agustus 1990
ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1952-2004 No.305

Kebudayaan

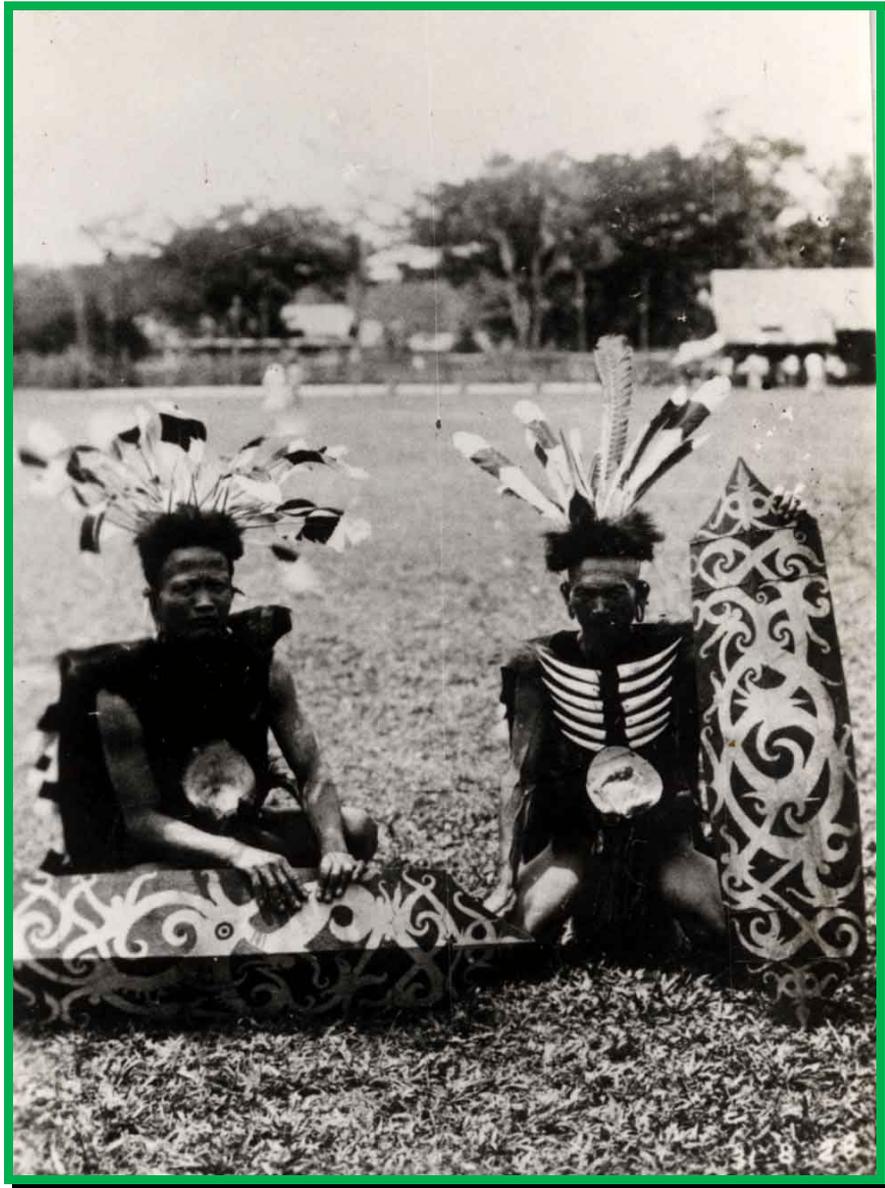


Putri Sultan Kutai, Kalimantan Timur
tahun 1901

ANRI: KIT727/51



Profil anak-anak Dayak di Kalimantan Timur,
tanpa tanggal (\pm 1940)
ANRI: KIT 448/18



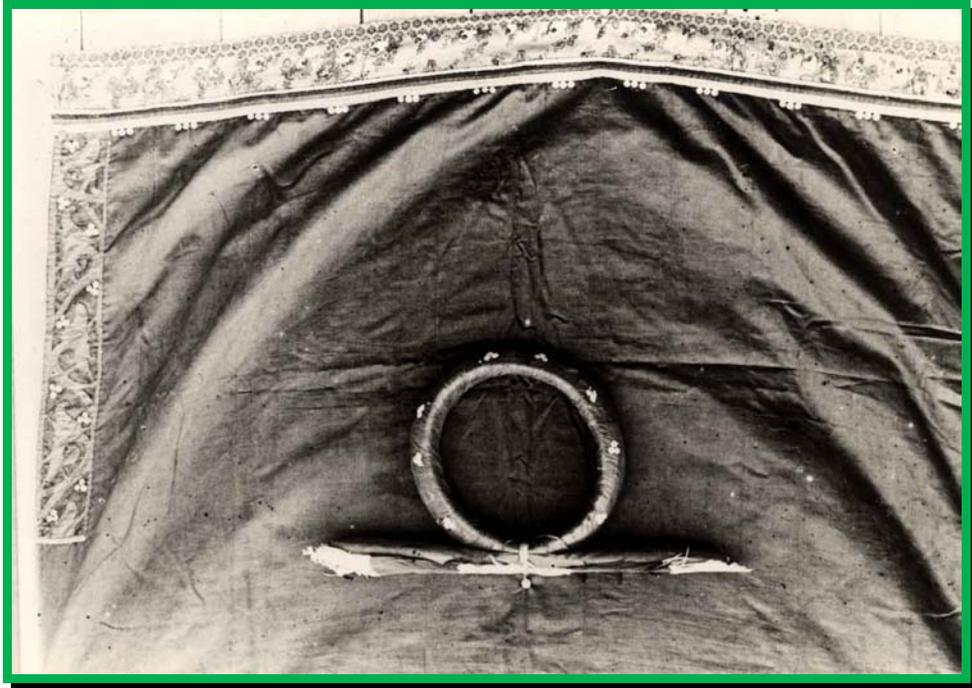
Dua laki-laki Dayak Kenyah dalam Pakaian perang,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT336/52



Alat musik kecapi Dayak Kenyah di Bulungan,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT909/49



Tiga Wanita Dayak Kenyah di depan rumahnya,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT443/44



Kain khas Dayak dan ikat kepala dari Mahakam,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT727/51



Tari adat Suku Dayak,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: Kempen 501283



Profil laki-laki Dayak Kayan dengan rambut panjang di Samarinda, tanpa tahun (\pm 1940)

ANRI: KIT444/12



Makam Sultan Alinudin di Bukit Gandeh, Tenggarong,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 823/49



Monumen di Tanjung Selor, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT790/49



Tugu makam tempat abu jenazah di Pasir Atas,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 814/53



Pernikahan Putra Mahkota Sultan Kutai di Tenggarong,
27 Agustus 1947
ANRI: RVD No. 70827 LL.6

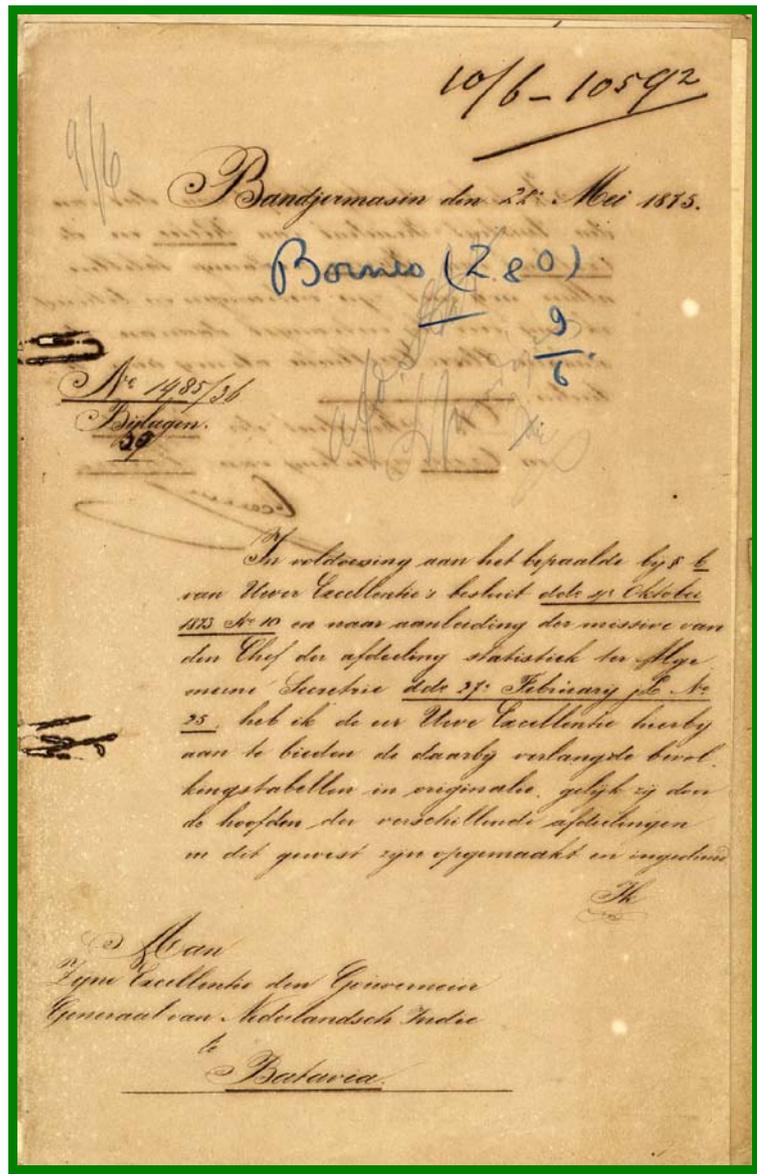


Kelompok Gamelan Sultan Kutai, Kalimantan Timur
22 Mei 1949
ANRI: RVD No. 90522 LL.34



Presiden Soekarno sedang menari bersama
di Malam Kesenian Daerah di Samarinda, Kalimantan Timur
19 Juli 1957
ANRI: Kempen 570719 LL 2-14

Pemukiman dan Kependudukan



Surat dari Residen Kalimantan Timur-Selatan kepada Gubernur Jenderal tentang data/Jumlah penduduk di Pagatan, Sabambar, Tanah Bamboe, Pasier, Koetai, Sambalireng, Gunung Tabur dan Bulungan pada tahun 1873 berjumlah 450.000 orang.

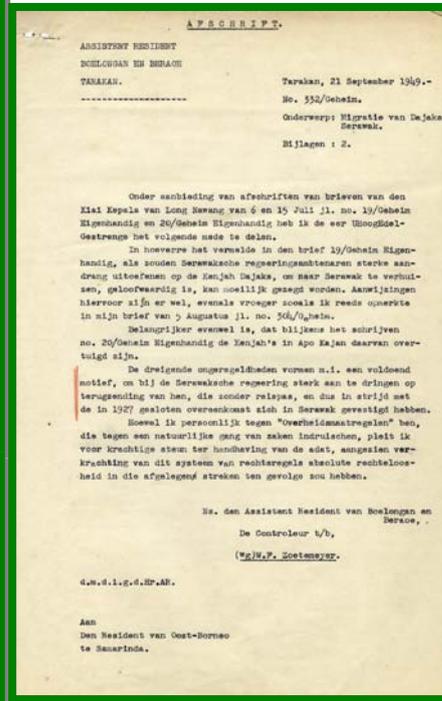
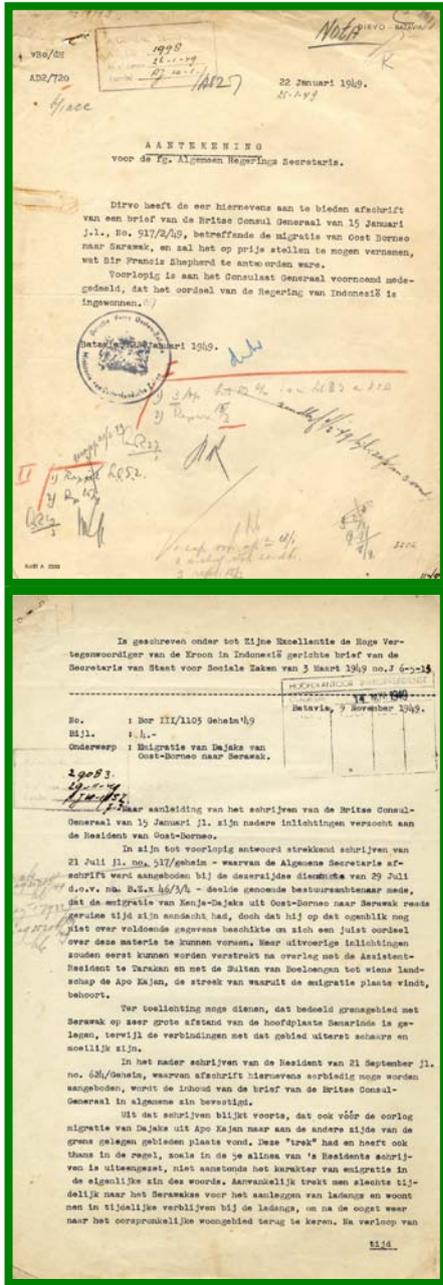
12 Juni 1875

ANRI: Borneo Zuid en Oost 9/6



Suasana perkampungan di Nunukan, Kalimantan Timur
1938

ANRI: KIT 829/34



Surat-surat tentang emigrasi penduduk
dari Kalimantan Timur ke Serawak,
Januari – November 1949
ANRI: Algemeene Secretarie No. 1059



Pemukiman di sepanjang tepi Sungai Mahakam, Samarinda 17
Mei 1949

ANRI: RVD No. 90517 LL.6.



Pemukiman nelayan Beloti di Kemohan Jempang, Kutai, tanpa tahun (± 1940)

ANRI: KIT 831/24



Pemukiman Dayak Kenyah di Apokayan, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 830/90



Rumah Panjang di Apokayan, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 830/40



Kampung nelayan Loa Pah Ping,
di tepi Sungai Kedang Kepala, Kutai, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 829/82



Kampung Tering di Mahakam Atas, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 829/72



Pemukiman nelayan di Muara Alik, Kutai, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)

ANRI: KIT 829/80



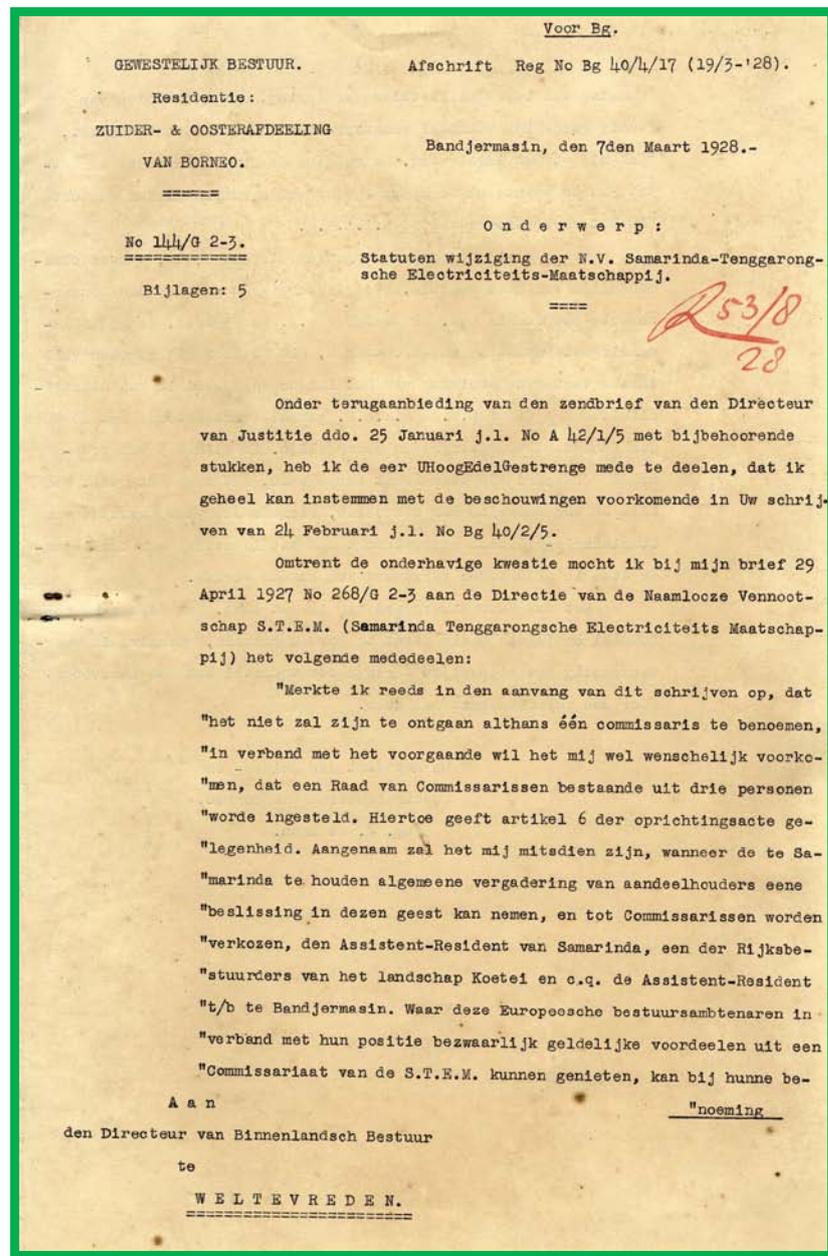
Keadaan alam di pemukiman Dayak Punjungan,
Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 829/20



Pembangunan rumah untuk pegawai negeri di Samarinda,
tanpa tahun (\pm 1960)

ANRI: Djapenpro Kalimantan II-18

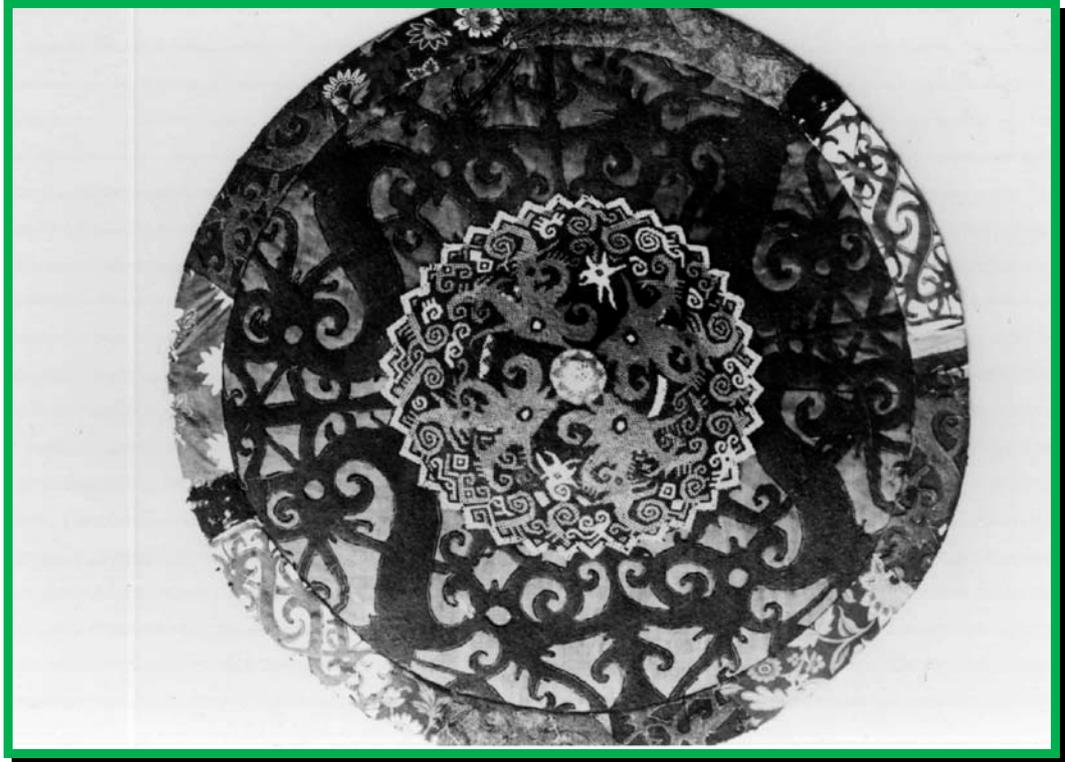
Perdagangan dan Perindustrian



Surat dari Residen Kalimantan Timur-Selatan kepada Direktur Departemen Dalam Negeri mengenai perubahan ketentuan-ketentuan dasar dari *N.V. Samarinda Tenggara Electriciteits-Maatschappij*.

7 Maret 1928

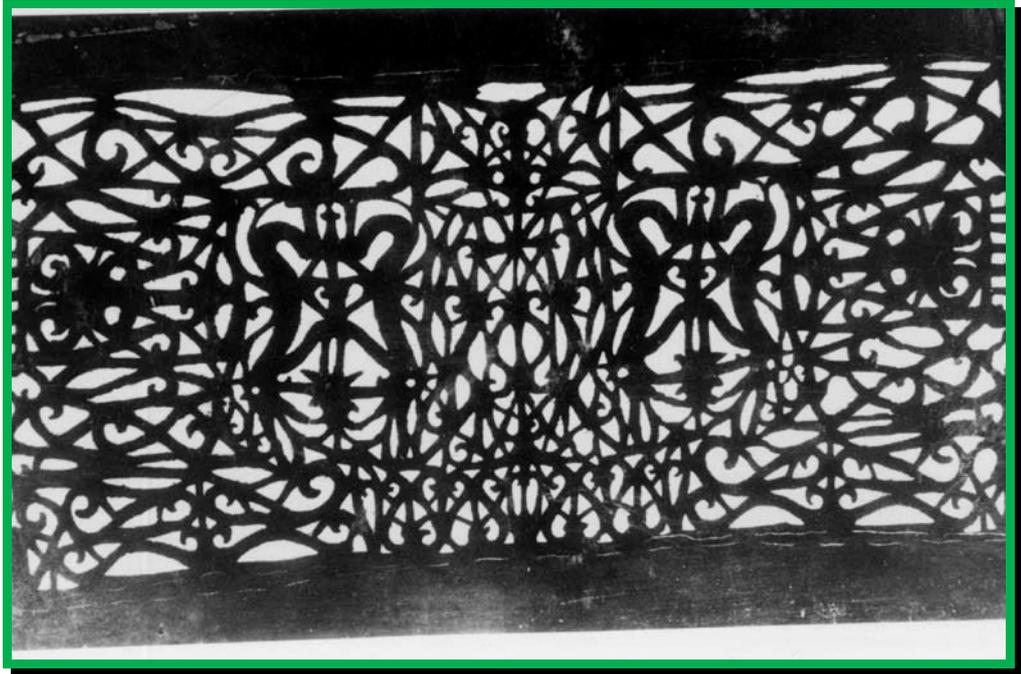
ANRI: Binnenlandsch Bestuur 1238



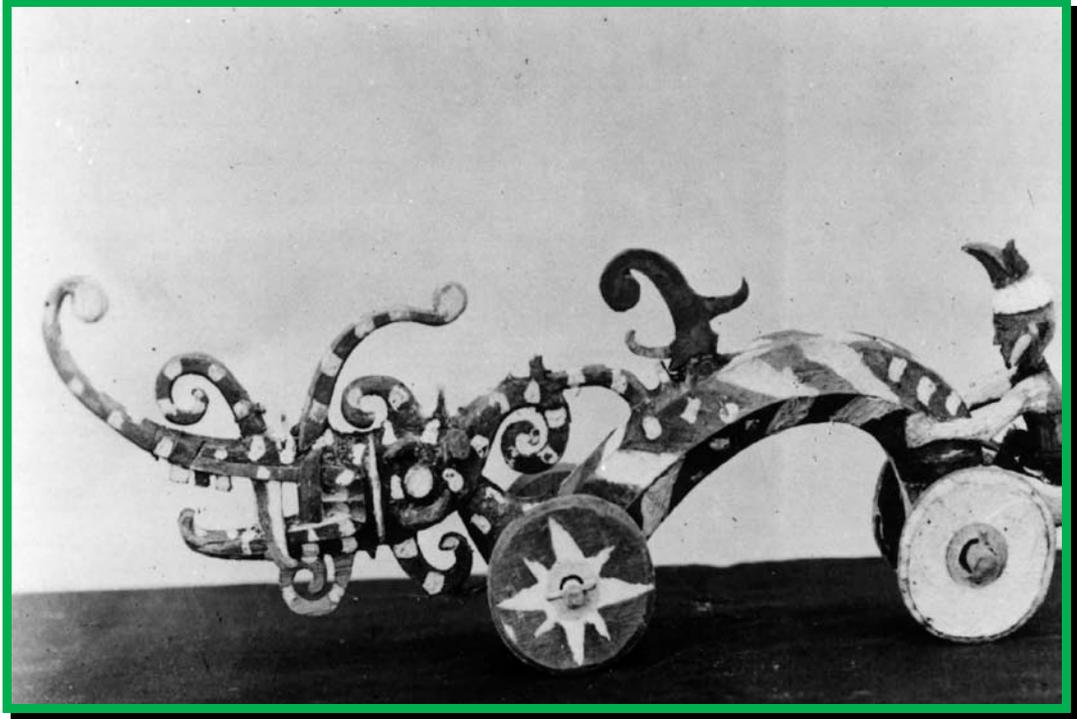
Kerajinan topi yang diberi manik-manik dari Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 691/74



Kerajinan tikar anyaman bermotif di Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 738/21



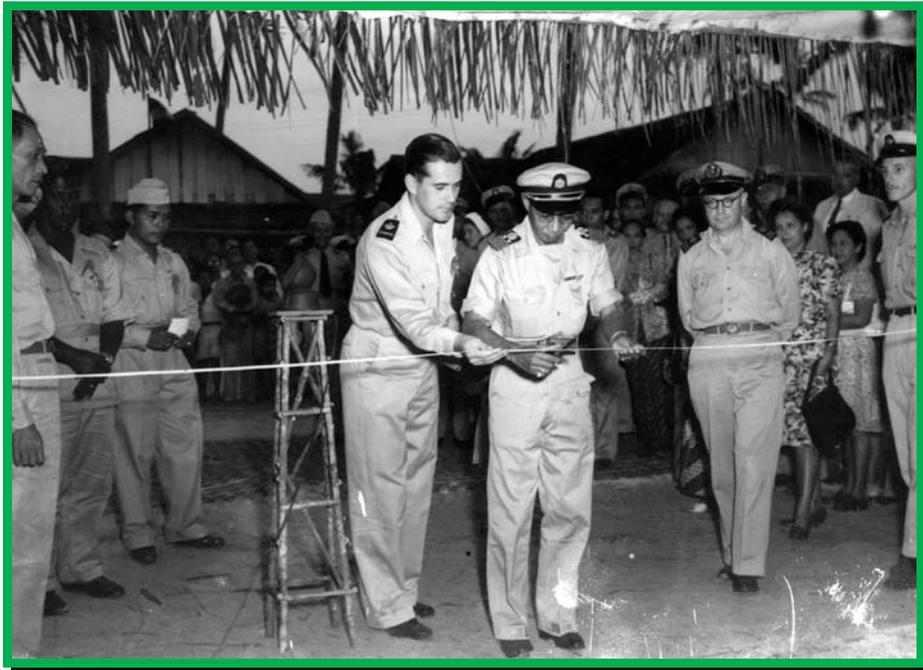
Kerajinan ukiran kayu yang dibuat oleh kaum wanita
dari Mahakam, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 740/74



Kerajinan hiasan kayu dibentuk menyerupai naga di Bulungan,
Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 694/46



Kerajinan berupa tas anyaman tempat menyimpan alat-alat berburu dari Bulungan, Kalimantan Timur tanpa tahun (+ 1930)
ANRI: KIT 738/13



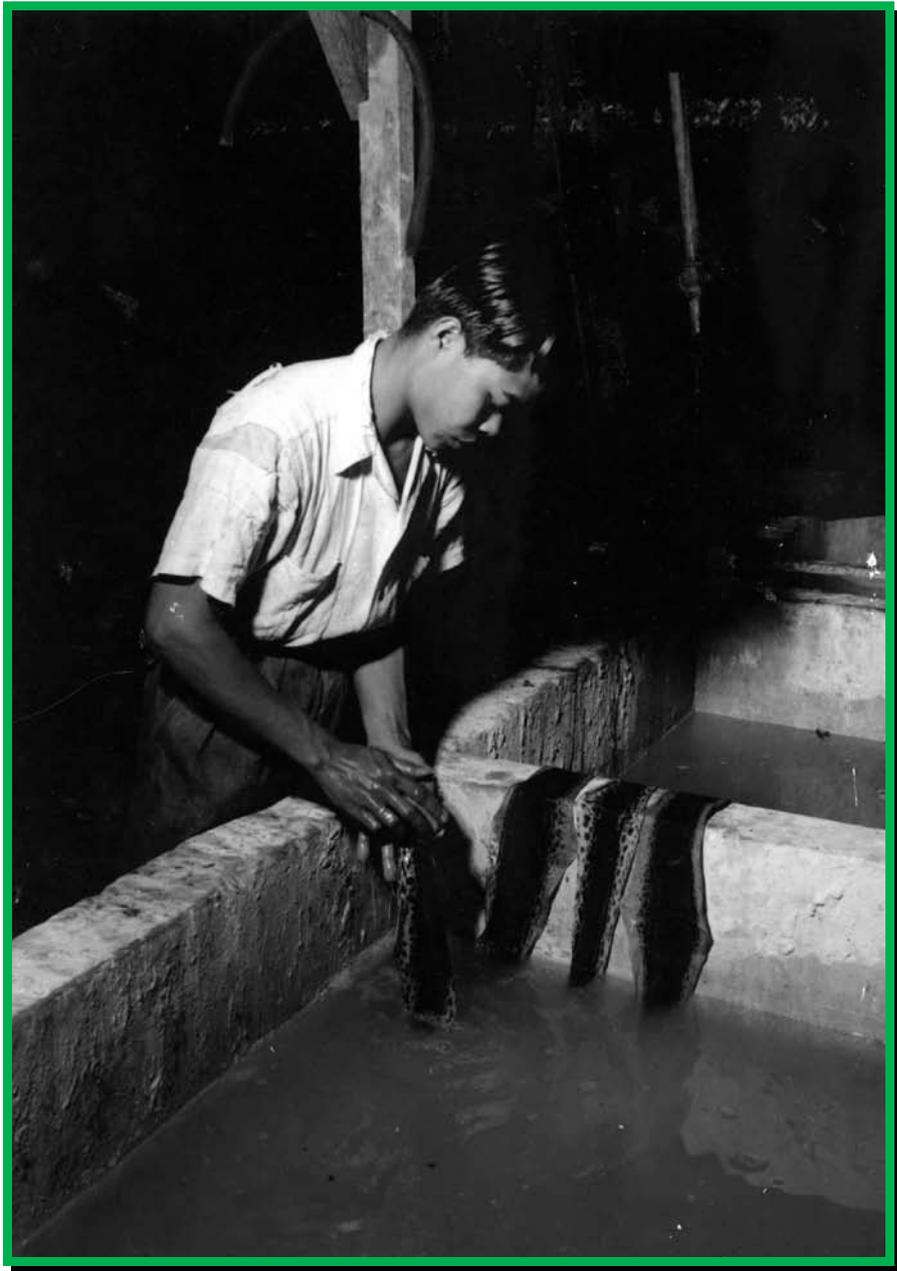
Pembukaan Pasar Malam di Balikpapan oleh Sultan Kutai,
15 Juli 1947

ANRI: RVD No.70715 LL.4



Industri kerajinan kulit dari Samarinda,
5 Mei 1949

ANRI: RVD No. 90505 LL 8



Proses perendaman kulit ular sebagai industri tas dan sepatu,
5 Mei 1949

ANRI: RVD No. 90505 LL 1



Pasar di Samarinda dalam keadaan banjir,
19 Mei 1949
ANRI: RVD No.90519 LL ii

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 106 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat bersama dari Menteri Pertanian, Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 2 Desember 1953 No. Des-9/95/34 dan surat Menteri Kehakiman tanggal 15 April 1954 No.Js.8/33/4;
- b. peraturan daerah Propinsi Kalimantan tentang larangan menangkap, membunuh atau mengambil hasilnya dari ikan djenis sepat-siam dalam Daerah Istimewa Kutai tanggal 3 Nopember 1953 No.6;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;

Mengingat : pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 3 Undang-undang No.22/1948, pasal-pasal 45, 46 dan 82 ayat (1) Undang-undang Darurat No.2 tahun 1953;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan daerah Propinsi Kalimantan tanggal 3 Nopember 1953 No.6, tentang larangan menangkap, membunuh atau mengambil hasilnya dari ikan djenis sepat-siam dalam Daerah Istimewa Kutai.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Menteri Pertanian,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan di Bandjarmasin,
5. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta,
6. Kepala Djawatan Kepolisian Propinsi Kalimantan di Bandjarmasin,
7. Kepala Djawatan Perikanan di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 April 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO
MENTERI PERTANIAN,

Sadjarwo
SADJARWO
MENTERI KEHAKIMAN,

Gondokusumo
GONDOKUSUMO
MENTERI DALAM NEGERI,

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1954 mengenai Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 3 November 1953 Nomor 6 tentang Larangan Menangkap, Membunuh atau Mengambil Hasilnya dari Ikan Jenis Sepat-Siam dalam Daerah Istimewa Kutai.

23 April 1954

ANRI: Sekretaris Kabinet Keputusan Presiden No. 999

Perhubungan



Kapal uap berlayar dekat Pelabuhan Balikpapan,
Kalimantan Timur
18 April 1924
ANRI: KIT 117/48



Jembatan di sekitar pemukiman penduduk di Nunukan,
Kalimantan Timur
1938

ANRI: KIT 514/22



Jalan Kereta Api di tengah hutan Nunukan, Kalimantan Timur
1938

ANRI: KIT 661/46



Pembukaan jalan baru di Nunukan, Kalimantan Timur
1938

ANRI: KIT 555/76



Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 64/21



Perahu pengangkut barang-barang militer
di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Timur
± 1940
ANRI: KIT 704/56



Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Balikpapan,
Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 528/14

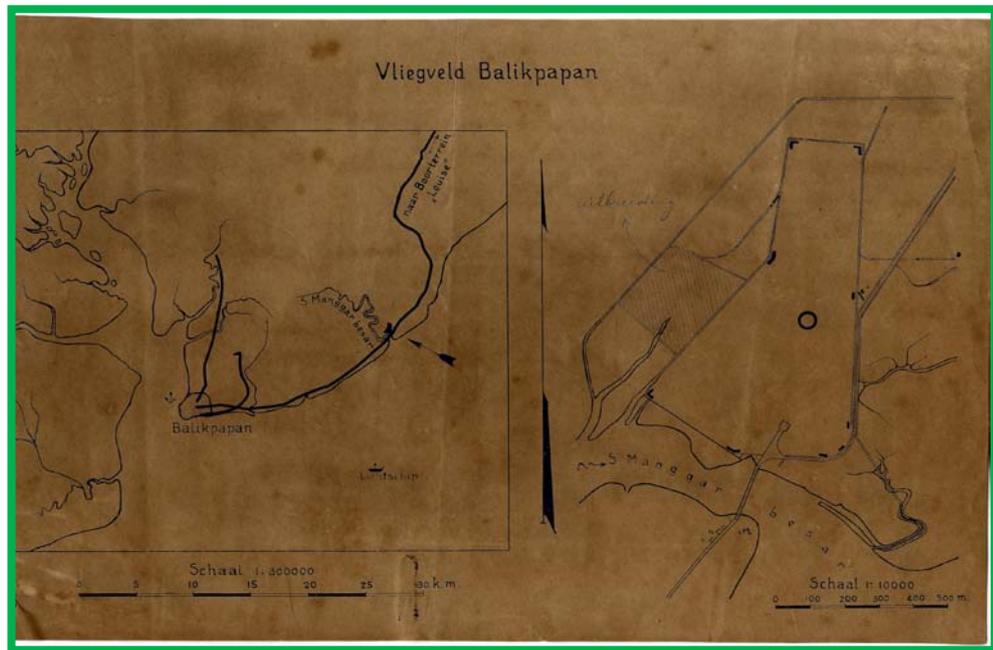
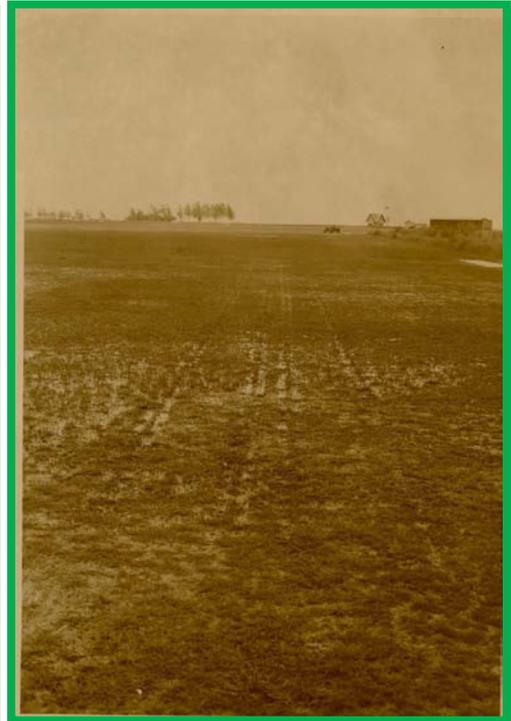
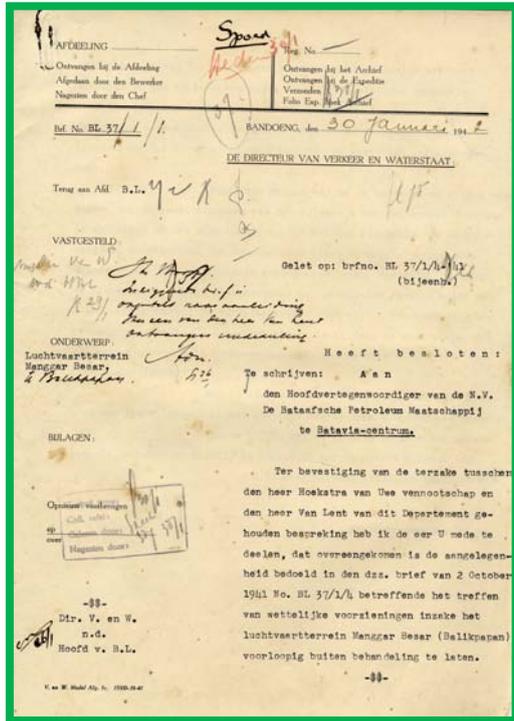


Perahu transportasi di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)

ANRI: KIT 536/35



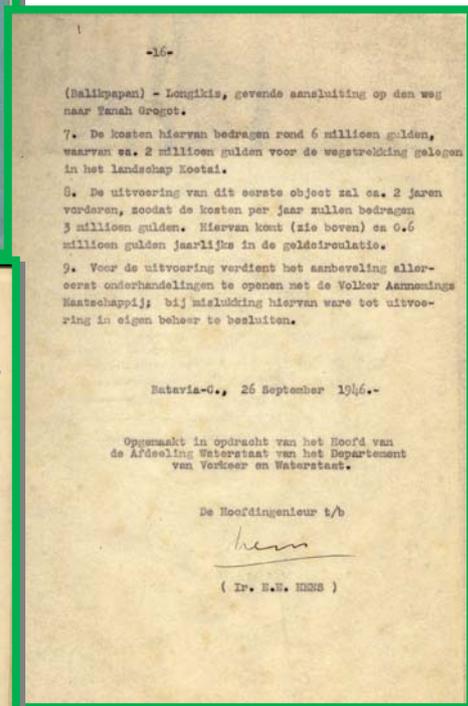
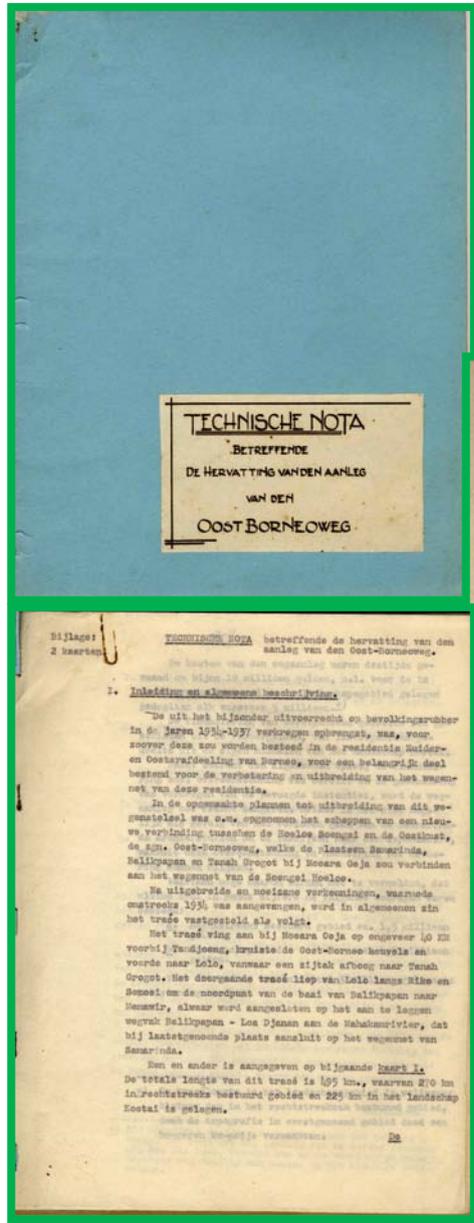
Barang-barang yang akan diangkut di Dermaga Tarakan,
Kalimantan Timur
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 529/52



Surat dari Direktur Perhubungan dan Pengairan (*Verkeer en Waterstaat*) tentang pembangunan lapangan terbang dan Hanggar Besar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

30 Januari 1942

ANRI: BOW No. BL.552



Bagian awal dan akhir dari catatan teknis Direktur Perhubungan dan Pengairan tentang pelaksanaan pembuatan jalan di Kalimantan Timur,
26 September 1946
ANRI: Algemeene Secretarie No. 899



Jalan Jendral Winkelman di tepi Sungai Mahakam,
Kalimantan Timur,
17 Mei 1949

ANRI: RVD No.90517.LL.8

Kehutanan



Hutan Jati di Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 655/34



Pohon Madu berdiameter 1 meter di daerah Prapak dekat tangsi
Sekuyu, Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 635/20



Pohon Murasas di sekitar Danau Sagoentoeng Kutai,
Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 654/42



Pohon Rupuh Batu yang telah berakar besar
di Muara Ancalong, Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 657/26



Pohon Perurupuh di hutan Rapah, Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 657/29



Penebangan pohon di Sangkulirang,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 660/9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1972
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ✓

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2183) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) ;

6. Peraturan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

26 Juni 1972

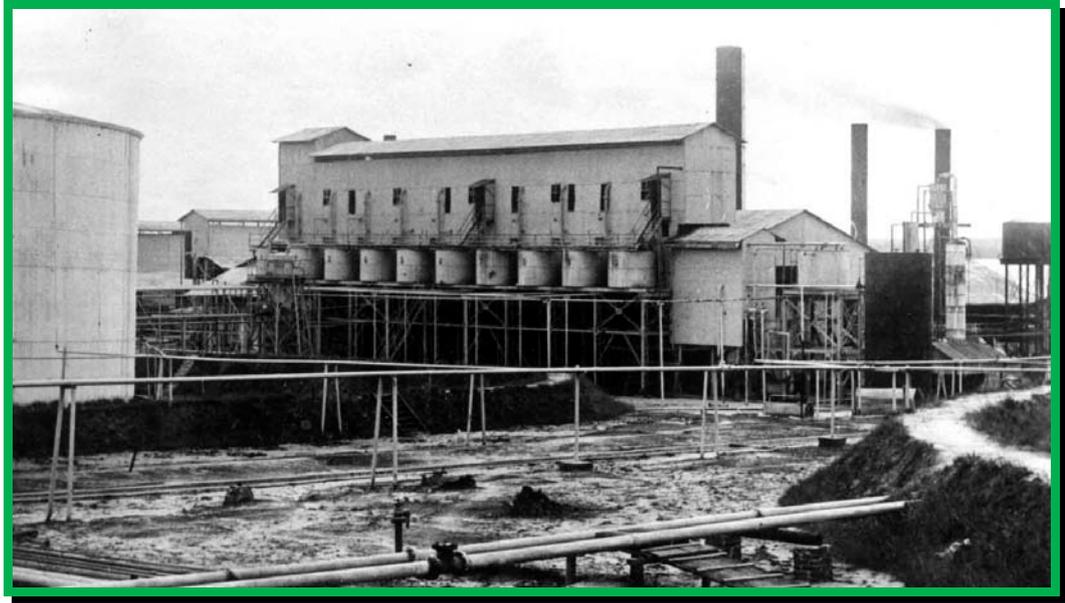
ANRI: Sekretariat Negara Peraturan Pemerintah No. 437

Pertambahan



Tangki instalasi minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)

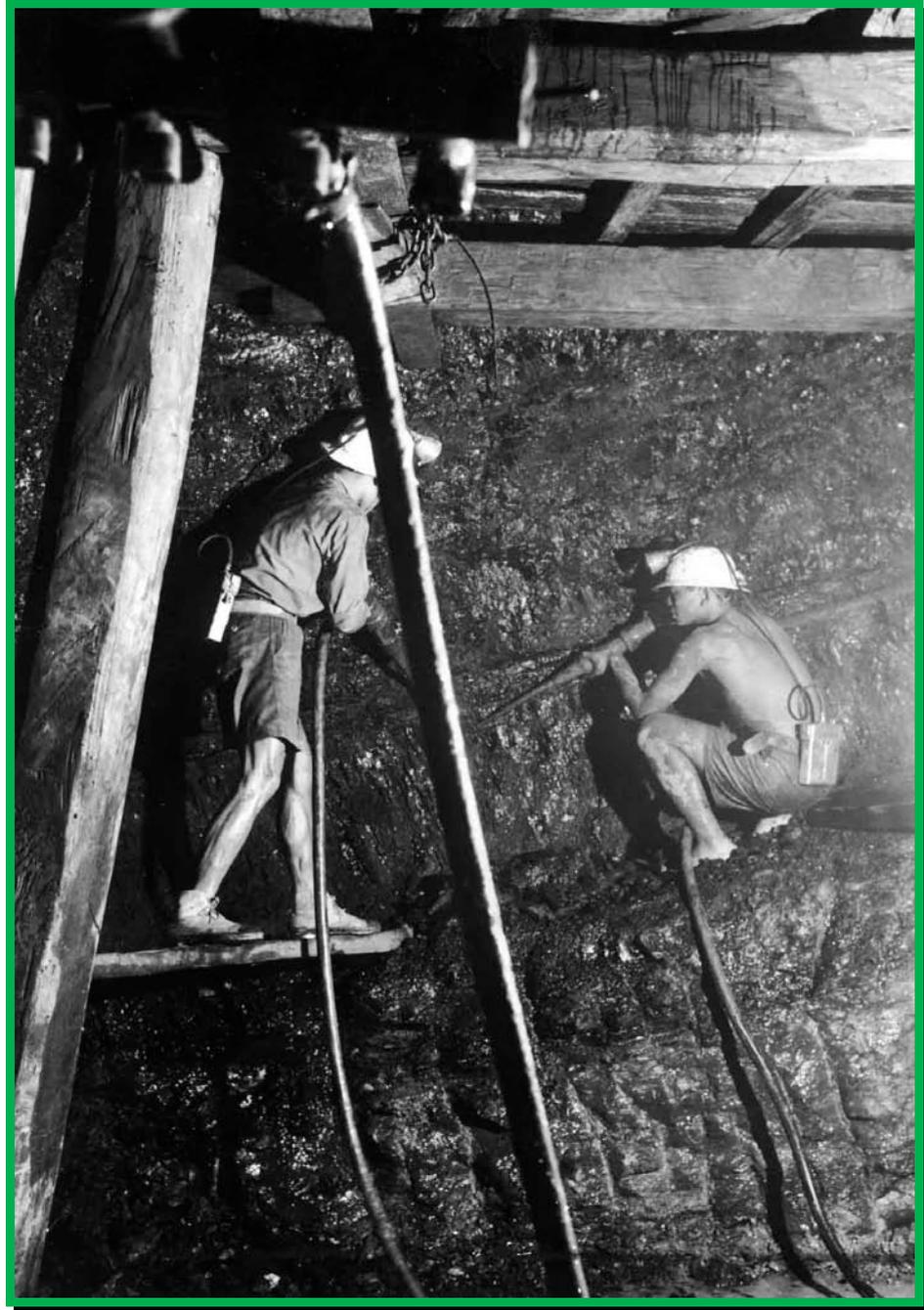
ANRI: KIT 475/20



Pabrik parafin di Balikpapan, Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 476/14



Tangki instalasi minyak di Tarakan, Kalimantan Timur,
tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 475/18



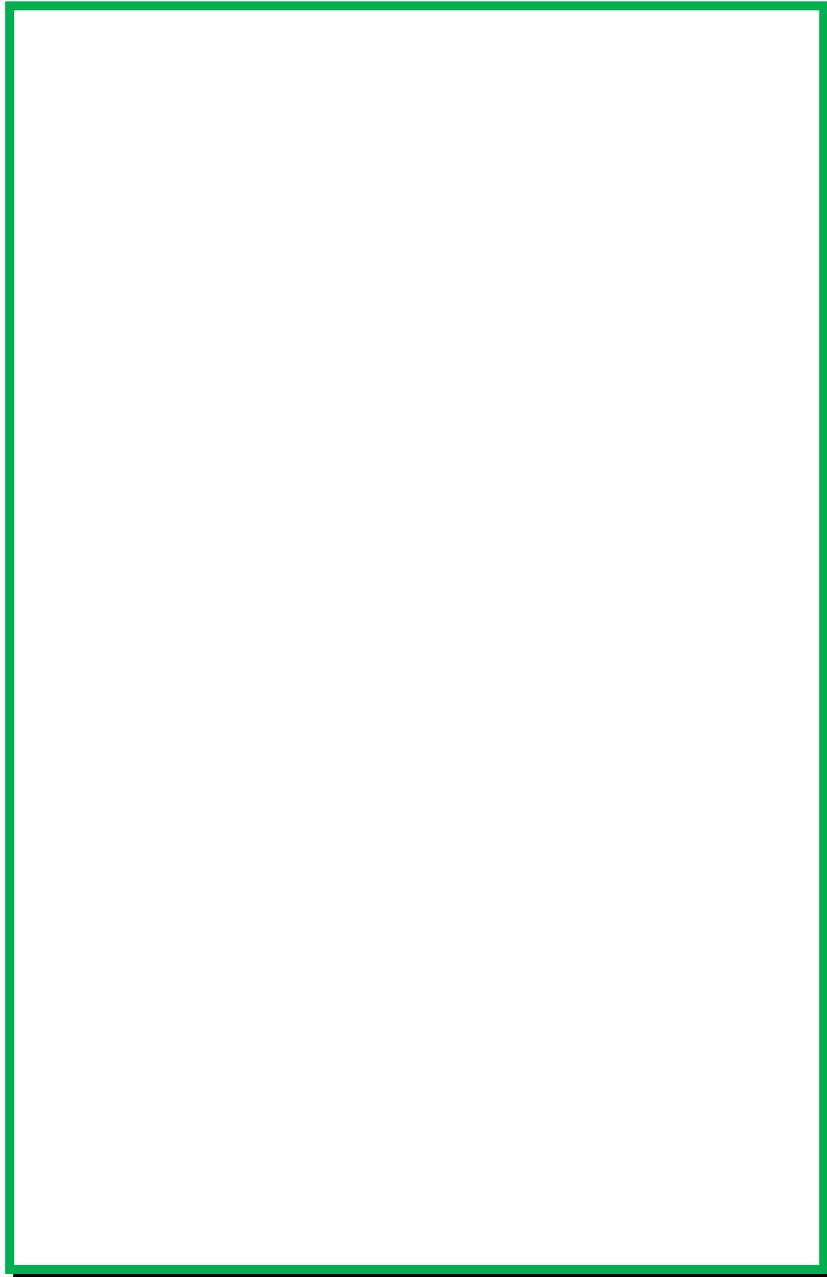
Para pekerja tambang batu bara di Loakulu,
tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur,
18 Mei 1949

ANRI: RVD No.90518.LL.3



Perluasan kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Balikpapan,
Kalimantan Timur
1984

ANRI: Deppen AQ 4



Surat dari Presiden Republik Indonesia, Soeharto kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai persetujuan penanaman modal asing dari Kyung Dong Co.Ltd. (Korea) di Kabupaten Kutai-Kalimantan Timur.

10 November 1997

ANRI: Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan (ASMIN) No. 6067

Daftar Arsip

DAFTAR ARSIP CITRA DAERAH KALIMANTAN TIMUR

A. GEOGRAFI DAN KEADAAN ALAM

1. Peta Pulau Kalimantan (*Kaart van het Eyland Borneo*), tanpa tahun (\pm 1900).
ANRI: J. Van Braam et G.Onder de Linden exc Cu.m Privilegie No.2.
2. Peta Tarakan, tahun 1945.
ANRI: Dinas Topografi No. 2392/NA No D/129.
3. Peta Malinau, tahun 1945.
ANRI: Dinas Topografi No. 63/NA 50 NW/5.
4. Peta Kalimantan Timur (*Oost Borneo*), tahun 1946.
ANRI: Dinas Topografi No. 10/NA-50/3.
5. Peta Samarinda, tahun 1946.
ANRI: Dinas Topografi No.2394/SA 50 D/129.
6. Pemandangan di sungai Mahakam, Samarinda, 1946.
ANRI: KIT 762/47
7. Pegunungan Kapur Liang Karing di daerah Mahakam Atas, tanpa tahun.
ANRI: KIT 968/1
8. Peta Balikpapan, tahun 1946.
ANRI: Dinas Topografi No. 2397/SA 50 i/129.
9. Pemandangan di Teluk Balikpapan, tanpa tahun
ANRI: KIT 64/23

10. Peta Bontang, tahun 1946.
ANRI: Dinas Topografi No.2597/Blad 13 B (Alg No. XXXIV-75 B) 147.
11. Pegunungan kapur di tepi sungai Kutai, Kalimantan Timur, tanpa tahun
ANRI: KIT 966/6
12. Pemandangan di sekitar sungai Pujungan, Kalimantan Timur, tanpa tahun
ANRI: KIT 945/41
13. Pemandangan di sepanjang sungai Sanga Muara, Balikpapan, Kalimantan Timur, tanpa tahun
ANRI: KIT 472/70
14. Peta Provinsi Kalimantan Timur, 2003.
ANRI: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

B. PEMERINTAHAN

15. Surat perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Kutai, Muhamad Sholehudin tentang pembagian wilayah Kutai dan penggunaan bendera Hindia Belanda dan Kerajaan Kutai, 11 Oktober 1844
12 Lembar
ANRI: Kontrak Kalimantan No. 28
16. Kontrak antara Residen Kalimantan Timur-Selatan, Jacobus Gerardus Gallois dengan Sultan Gunung Taboer, Maharaja Dindah mengenai pembagian daerah (wilayah) Gunung Taboer.
20 Oktober 1850
18 Lembar
ANRI: Kontrak Kalimantan No.11

17. Surat Pernyataan dari Sultan Mohamad Soelaiman Adil Chalifatul Moekminin dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang penyerahan sebidang tanah sebelah kiri sungai Mahakam.
23 Juli 1894
5 Lembar
ANRI: Kontrak Kalimantan No.30
18. Akta Penyerahan dari Raja Kutai, Mohamad Alimoedin Adil Chalifatoel Moekminin kepada Pemerintah Hindia Belanda mengenai penyerahan sebidang tanah (16.100 m²) di gunung Taluk Balikpapan (Konsesi tambang *Mathilde*).
1 Maret 1900
5 Lembar
ANRI: Kontrak Kalimantan No.2 (F.IX a)
19. Surat perjanjian antara Kerajaan Kutai dengan Residen Kalimantan Timur-Selatan tentang pembagian wilayah yang termasuk kerajaan Kutai (Bongan dan Bengalon).
19 Oktober 1911
2 Lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 115
20. Surat Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Kutai mengenai batas-batas wilayah Kerajaan Kutai.
22 November 1938
68 lembar
ANRI: Kontrak Kalimantan No. 3
21. Sultan Maulana Mohammad Kasim Aldin dari Bulungan, tanpa tahun
ANRI: KIT. NO.325/44
22. Sultan Maulana Mohammad Kasim Aldin dari Bulungan dengan istrinya, tanpa tahun
ANRI: KIT. NO.325/40

23. Datuk Mansaei, pejabat pemerintah pertama dari Bulungan, tanpa tahun
ANRI: KIT325/48
24. Penguasa daerah Buwak dengan seorang wanita dari Kampung Gintan, Kutai, Kalimantan Timur, tanpa tahun
ANRI: KIT446/4
25. Sultan Bulungan, tanpa tahun
ANRI: KIT 444/44
26. Upacara penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Sultan Haji Mohammad Parikesit di Istana Sultan Kutai, Tenggarong, Kalimantan Timur.
29 Maret 1948
ANRI: RVD. NO. 81129 LL 1-60
27. Sultan Kutai (Kiri) dan Sultan Gunung Tabur (Kanan)
5 Maret 1949
ANRI: RVD. NO. 90305 LL 1-1
28. Surat dari Sekretaris Departemen Urusan Dalam Negeri, Mr. D. A. Scheerboom kepada Wakil Raja Belanda di Indonesia di Batavia mengenai penyerahan kewenangan Residen Kalimantan Timur kepada Negara Federasi Indonesia.
1 Desember 1949
17 Lembar
ANRI: Algemeene Secretarie No. 1324.
29. Kutipan dari Surat-surat Keputusan Majelis Pemerintah Federasi Kalimantan Timur mengenai Penunjukan Kepala Jawatan Keuangan Federasi Kalimantan Timur sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk mempergunakan uang persekot dinas biasa Federasi Kalimantan Timur.
13 Februari 1950
1 Lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur 1135

30. Surat Timbang Terima Penggabungan Resmi Daerah Kalimantan Timur pada Republik Indonesia dan penyerahan Pemerintahan Kalimantan Timur pada Pemerintah Republik Indonesia.
10 April 1950
9 Lembar
ANRI: Kabinet Perdana Menteri Jogja No. 92
31. Presiden Soekarno berfoto bersama anak-anak dalam rangka perjalanan Presiden ke Balikpapan, 15 September 1950.
ANRI: Kempen 501265
32. Wakil Presiden Mohammad Hatta sedang memeriksa barisan kehormatan waktu tiba di Lapangan Udara Balikpapan, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden ke Kalimantan Timur, 22 Oktober 1956
ANRI: Kempen 561022 LL 2
33. Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut Residen Samarinda waktu tiba Samarinda, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden ke Kalimantan Timur, 24 Oktober 1956.
ANRI: Kempen 561024 LL 1
34. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
38 Lembar
29 November 1956
ANRI: Sekretariat Kabinet (Undang-Undang 1950-1960) No. 199
35. Surat dari Menteri Dalam Negeri, Mr. Soenarjo kepada Kabinet Presiden tentang pembagian Kalimantan dalam 3 propinsi otonom.
5 Februari 1957
2 Lembar
ANRI: Kabinet Presiden No. 901

36. Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
7 Mei 1957
4 Lembar
ANRI: Sekretariat Kabinet (Undang-Undang Darurat 1949-1960) No.145
37. Pelantikan Adji Adin Gelar Pangeran Tumenggung Pranoto menjadi Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda,
5 Februari 1960
ANRI: Deppen No.3/KT/60
38. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1962 mengenai Pengesahan Peraturan Daerah tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan I dalam daerah kotapraja Balikpapan,
20 Agustus 1962
1 Lembar
ANRI: Sekretaris Kabinet (Keputusan Presiden RI) No. 204
39. Laporan hasil musyawarah Pemerintah Dalam Negeri Daerah Kalimantan Timur ke-2 yang diselenggarakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada tanggal 20-24 Februari 1965.
24 Februari 1966
12 Lembar
ANRI: Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat No. 1062.

C. PERTAHANAN KEAMANAN

40. Surat perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda, Julius Boers dengan Sultan Kutai, Mohamad Adil Chalifatoel Moekminin mengenai pelarangan membawa keluar/masuk senjata api di dalam daerah pemerintahan kerajaan Kutai.
12 Juli 1896
9 Lembar
ANRI: Kontrak Kalimantan No. 31
41. Laporan dari A.J. Th. Boester mengenai Organisasi Dinas Perlindungan Udara (*Luchtbeschermingsdienst*) di Tarakan.
11 April 1938
25 Lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 3965
42. Surat dari Kepala Dinas Pertahanan Udara, M.C. van Dallen Wetters kepada Kepala Inspeksi Pertahanan Udara Departemen Dalam mengenai pelatihan pengawasan dan penanganan bahaya serangan udara di Balikpapan.
5 Juni 1940
16 Lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 4087.
43. Penduduk Pulau Tarakan mengungsi ke tempat yang aman dari perang yang terjadi di Tarakan.
30 April 1945
ANRI: NIGIS NO. 1073146
44. Laporan perjalanan kunjungan sejumlah tentara Belanda ke Hollandia, Biak, Manila, Balikpapan dan Tarakan untuk inspeksi gedung dan instalasi militer.
Juli 1945
2 lembar
ANRI: Algemeene Secretarie No. 1494
45. Anggota Pembela Tanah Air (Peta) mengadakan patroli dari Balikpapan ke Samboja, Kalimantan Timur, Juli 1945
ANRI: NIGIS NO. 1073316

46. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Mr. Soenarjo mengenai pemindahan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Istimewa Kutai dari Samarinda ke Tenggarong.
19 Februari 1957
1 Lembar
ANRI: Kabinet Presiden No. 853
47. Surat dari Panitia Gerakan mendalami Tahun Vivere Peri Coloso (TAVIP) Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Achmad Ibrahim kepada Panitia Gerakan mendalami TAVIP mengenai Pembentukan Panitia Mendalami TAVIP Dati I Kalimantan Timur.
5 April 1965
12 Lembar
ANRI: Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat No. 1064
48. Surat pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPR-GR) Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tentang permohonan kepada Presiden Soekarno untuk segera membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormasnya.
19 November 1965
3 Lembar
ANRI: Roeslan Abdul Gani No. 1619

D. KEAGAMAAN

49. Masjid Sultan Kutai, Tenggarong Barat, Kalimantan Timur, anpa tahun
ANRI: KIT 807/2
50. Menara Masjid di Samarinda, Kalimantan Timur, tanpa tahun
ANRI: KIT 803/6

51. Gereja di Mahakam Atas, Kalimantan Timur, tanpa tahun
ANRI: KIT 809/37

52. Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur, tanpa tahun
ANRI: NIGIS NO. A 1031

E. KESEHATAN

53. Rumah Sakit di Nunukan, Kalimantan Timur, 1940
ANRI: KIT 356/13

54. Rumah Sakit di Balikpapan, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/90

55. Suasana di dalam ruangan Rumah Sakit di Balikpapan, Kalimantan Timur, (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/10

56. Rumah Sakit di Samarinda, Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/18

57. Rumah Sakit di Tanjung Redeb, Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 348/30

58. Kunjungan Sultan Kutai ke "Margriet Hospital" di Balikpapan, Kalimantan Timur, 18 Juli 1947
ANRI: RVD. NO. 70718 LL. 24

59. Palang Merah Indonesia Cabang Balikpapan, Kalimantan Timur, 24 Mei 1958
ANRI: Kempen 1958

F. PENDIDIKAN

60. Murid-murid Sekolah Kristen di Laham, tanpa tanggal (\pm 1940)
ANRI: KIT 308/71
61. Pemberantasan buta huruf di Samarinda, 7 Mei 1949
ANRI: Kempen RIS 90507 LL ii
62. Surat dari Wakil Sekretaris Negara, Mr. Ratmoko kepada Sekretaris Gerakan Pandu Indonesia, Tenggarong mengenai pemberian hadiah dari Presiden Soekarno berupa sebuah korek api yang akan digunakan untuk menyalakan api unggun pada perayaan ulang tahun pertama Gerakan Kepanduan di Tenggarong.
10 Oktober 1949
3 Lembar
ANRI: Sekretariat Negara RI 1945-1949 No. 78
63. Surat dari Sekretaris Jenderal Kemenreian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Mr. Hadi kepada St. Atmodipuro mengenai instruksi untuk mengadakan perjalanan orientasi urusan pendidikan dan pengajaran di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan instruksi tentang pengoperan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, 27-28 Maret 1950
2 Lembar
ANRI: Setneg RI Jogja No. 91
64. Kunjungan Presiden Soekarno ke sekolah yang didirikan oleh *Bataafsche Petroleum Mascaappij* (BPM, sekarang Pertamina), September 1950.
ANRI: Kempen 501248
65. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0152 /0/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, 5 Maret 1983
22 Lembar
ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1952-2004 No.3

66. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0702/0/1989 tentang pemberian status terdaftar kepada Jurusan Manajemen Informatika di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Samarinda di Samarinda.
2 November 1989
2 Lembar
ANRI: Departemen Pendidikan Nasional 1952-2004 No.304
67. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0517/0/1990 tentang pemberian status terdaftar kepada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Elektro pada Fakultas Teknik di Lingkungan Universitas Tri Dharma di Balikpapan.
9 Agustus 1990
2 Lembar
ANRI: Departemen Pendidikan tahun 1952-2004 No.305

G. KEBUDAYAAAN

68. Putri Sultan Kutai, 1901
ANRI: KIT 727/51
69. Profil anak-anak Dayak di Kalimantan Timur, tanpa tanggal (\pm 1940)
ANRI: KIT 448/18
70. Dua laki-laki Dayak Kenyah dalam Pakaian perang, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 336/52
71. Alat musik kecapi Dayak Kenyah di Bulungan, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 909/49

72. Tiga Wanita Dayak Kenyah di depan rumahnya, tanpa tahun(± 1940)
ANRI: KIT 443/44
73. Kain khas Dayak dan ikat kepala dari Mahakam, tanpa tahun (± 1940)
ANRI: KIT 727/51
74. Tari adat Suku Dayak, tanpa tahun (± 1940)
ANRI: Kempen 501283
75. Profil laki-laki Dayak Kayan dengan rambut panjang di Samarinda, tanpa tahun (± 1940)
ANRI: KIT444/12
76. Makam Sultan Alinudin di Bukit Gandeh, Tenggarong, tanpa tahun (± 1940)
ANRI: KIT 823/49
77. Monumen di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Timur, tanpa tahun (± 1940)
ANRI: KIT790/49
78. Tugu makam tempat abu jenazah di Pasir Atas, tanpa tahun (± 1940)
ANRI: KIT 814/53
79. Pernikahan Putra Mahkota Sultan Kutai di Tenggarong, 27 Agustus 1947
ANRI: RVD. NO. 70827 LL.6
80. Kelompok Gamelan Sultan Kutai, 22 Mei 1949
ANRI: RVD NO. 90522 LL.34
81. Presiden Soekarno sedang menari di Malam Kesenian Daerah di Samarinda, 19 Juli 1957
ANRI: Kempen 570719 LL 2-14

H. PEMUKIMAN KEPENDUDUKAN

82. Surat dari Residen Kalimantan Timur-Selatan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang data/Jumlah penduduk Pagatan, Sabambar, Tanah Bamboe, Pasier, Koetai, Sambalireng, Gunung Tabur dan Bulungan pada tahun 1873 berjumlah 450.000 orang.
12 Juni 1875
4 lembar
ANRI: Borneo Zuid en Oost 9/6
83. Suasana perkampungan di Nunukan, Kalimantan Timur, 1938
ANRI: KIT 829/34
84. Surat-surat tentang migrasi penduduk dari Kalimantan Timur ke Serawak
Januari – November 1949
44 lembar
ANRI: Algemeene Secretarie No. 1059
85. Perkampungan di sepanjang tepi Sungai Mahakam, Samarinda 17 Mei 1949
ANRI: RVD. NO. 90517 LL.6.
86. Perkampungan nelayan Beloti di Kemohan Jempang, Kutai, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 831/24
87. Perkampungan Dayak Kenyah di Apokayan, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 830/90
88. Rumah Panjang di Apokayan, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 830/40
89. Kampung nelayan Loa Pah Ping, di tepi Sungai Kedang Kepala, Kutai, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 829/82

90. Kampung Tering di Mahakam Atas, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 829/72
91. Perkampungan nelayan di Muara Alik, Kutai, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 829/80
92. Keadaan alam di Kampung Dayak, Punjungan, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT829/20
93. Pembangunan rumah untuk pegawai negeri di Samarinda, tanpa tahun (\pm 1960)
ANRI: Djapenpro Kalimantan II-18

I. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

94. Surat dari Residen Kalimantan Timur-Selatan kepada Direktur Departemen Dalam Negeri mengenai perubahan ketentuan-ketentuan dasar dari N.V. Samarinda *Tenggarong Electriciteit-Maatschappij*.
7 Maret 1928
22 Lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur 1238
95. Kerajinan topi yang diberi manik-manik dari Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 691/74
96. Kerajinan tikar anyaman bermotif di Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 738/21
97. Kerajinan ukiran kayu yang dibuat oleh wanita-wanita di Mahakam, tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 740/74

98. Kerajinan hiasan kayu dibentuk menyerupai naga di Bulungan, tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 694/46
99. Kerajinan berupa tas anyaman tempat menyimpan alat-alat berburu dari Bulungan, tanpa tahun (\pm 1930)
ANRI: KIT 738/13
100. Pembukaan Pasar Malam di Balikpapan oleh Sultan Kutai, 15 Juli 1947
ANRI: RVD NO. 70715.LL.4
101. Industri kerajinan kulit dari Samarinda, 5 Mei 1949
ANRI: RVD.NO. 90505 LL 8
102. Proses perendaman kulit ular sebagai industri tas dan sepatu, 5 Mei 1949
ANRI: RVD.NO. 90505 LL 1
103. Pasar di Samarinda dalam keadaan banjir, 19 Mei 1949
ANRI: RVD.NO. 90519 LL ii
104. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 1954 mengenai pengesahan peraturan daerah Propinsi Kalimantan tanggal 3 November 1953 No. 6 tentang larangan menangkap, membunuh atau mengambil hasilnya dari ikan jenis sepat-siam dalam Daerah Istimewa Kutai.
23 April 1954
1 Lembar
ANRI: Sekretarian Kabinet, Keppres No. 999

J. PERHUBUNGAN

105. Kapal Uap berlayar dekat Pelabuhan Balikpapan, 18 April 1924
ANRI: KIT 117/48

106. Jembatan di Nunukan, 1938
ANRI: KIT 514/22
107. Jalan Kereta Api di tengah hutan Nunukan, 1938
ANRI: KIT 661/46
108. Pembukaan jalan baru di Nunukan, 1938
ANRI: KIT 555/76
109. Pelabuhan Balikpapan, tanpa tahun
ANRI: KIT 64/21
110. Perahu pengangkut barang-barang militer di Tanjung Selor (Bulungan), tanpa tahun
ANRI: KIT 704/56
111. Aktivitas bongkar muat di Balikpapan, tanpa tahun
ANRI: KIT 528/14
112. Perahu transportasi di Sungai Mahakam, tanpa tahun
ANRI: KIT 536/35
113. Barang-barang yang akan diangkut di Dermaga Tarakan, tanpa tahun
ANRI: KIT 529/52
114. Surat dari Direktur Perhubungan dan Pengairan tentang pembangunan lapangan terbang dan hanggar Besar di Balikpapan, disertai peta dan foto.
1936 – 1942
99 lembar
ANRI: BOW No. BL.552
115. Catatan teknis dari Departement Perhubungan dan Pengairan tentang pelaksanaan pembuatan jalan di Kalimantan Timur,
26 September 1946
17 lembar
ANRI: Algemeene Secretarie No. 899

116. Jalan Jendral Winkelman di tepi Sungai Mahakam, 17 Mei 1949
ANRI: RVD NO.90517.LL.8

K. KEHUTANAN

117. Hutan Jati di Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 655/34

118. Pohon Madu berdiameter 1 meter di daerah Prapak dekat tangsi Sekuyu, Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 635/20

119. Pohon Murasas di sekitar Danau Sagoentoeng Kutai, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 654/42

120. Pohon Rupuh Batu yang telah berakar besar di Muara Ancalung Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 657/26

121. Pohon Perurupuh di hutan Rapah, Kalimantan Timur, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 657/29

122. Penebangan pohon di Sangkulirang, tanpa tahun (\pm 1940)
ANRI: KIT 660/

123. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
26 Juni 1972
5 lembar
ANRI: Sekretariat Negara seri PP NO. 437

L. PERTAMBANGAN

124. Tangki instalasi minyak di Balikpapan, tanpa tahun (\pm 1940)

ANRI: KIT 475/20

125. Pabrik parafin di Balikpapan, tanpa tahun (\pm 1940)

ANRI: KIT 476/14

126. Tangki instalasi minyak di Tarakan, tanpa tahun (\pm 1940)

ANRI: KIT 475/18

127. Para pekerja di tambang batu bara di Loakulu, 18 Mei 1949

ANRI: RVD NO.90518.LL.3

128. Perluasan kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Balikpapan, 1984

ANRI: Deppen AQ 4

129. Surat dari Presiden Republik Indonesia, Soeharto kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM mengenai persetujuan penanaman modal asing dari Kyung Dong Co.Ltd. pertambangan umum dengan lokasi kantor di Kabupaten Kutai-Kalimantan Timur.

10 November 1997

7 Lembar

ANRI: Eks Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan (ASMIN) No. 6067

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kalimantan Timur Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.